

**ARAHAN LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN
(TPI) KOTA TANJUNGPINANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

IPAN

L4D 003 098



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**ARAHAN LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN
(TPI) KOTA TANJUNGPINANG**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Semarang

Oleh :

IPAN
L4D 003 098

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 30 Juni 2006

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Juli 2006

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP

Drs. PM. Broto Sunaryo, MSP

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/ Institusi lain, maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Juli 2006

IPAN

NIM L4D 003 098

Manusia dinilai berdasarkan perbuatan mereka. Kebesaran jiwa mereka yang menentukan karya besar mereka memang besar. Di mata orang-orang kerdil, masalah-masalah sepele menjadi besar. Bagi yang berjiwa besar, masalah-masalah besar menjadi kecil (Ali Mutanabbi).

Kupersembahkan kepada:

Ayah dan Bunda tercinta
Istri dan anak-anakku
tersayang

ABSTRAK

Kota Tanjungpinang memiliki wilayah lautan yang lebih besar daripada daratannya, yaitu sebesar 70,59% dari luas wilayah kota tersebut. Dengan kondisi tersebut menyebabkan sektor perikanan sangat berpotensi untuk menjadi sektor andalan yang dapat mengangkat perekonomian Kota Tanjungpinang. Karena beberapa permasalahan di sektor perikanan, yang salah satunya adalah belum terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menyebabkan potensi di sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai salah satu kota yang berbentuk kepulauan, Tanjungpinang mempunyai banyak lokasi pendaratan ikan, tetapi belum terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Oleh karena itu, aktivitas pendaratan ikan dan transaksi pelelangan ikan terjadi secara alamiah, tanpa adanya campur tangan dan pelayanan pihak pemerintah. Dengan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak dapat menarik retribusi dari aktivitas pelelangan ikan dan transaksi hasil tangkapan ikan dikendalikan oleh toke (sebagai penghubung antara nelayan dengan konsumennya), yang menyebabkan harga ikan tidak dapat dikendalikan.

Berkaitan dengan fenomena tersebut di atas, Pemerintah Kota Tanjungpinang merencanakan membangun lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan tiga alternatif lokasi, yaitu di Pelantar II, Senggarang, dan Dompok Lama. Untuk menentukan lokasi yang optimal dari ketiga alternatif lokasi tersebut, diperlukan arahan yang didasarkan pada kriteria-kriteria dalam pemilihan lokasi Tempat Pelelangan Ikan (menurut standard di Indonesia). Sehingga tujuan penelitian ini adalah memberikan arahan lokasi Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang yang paling optimal dan menetapkan zona pengembangan atas lokasi Tempat Pelelangan Ikan yang terpilih.

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka digunakan analisis penentuan lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan metode *scoring*. Analisis ini akan menilai tiap alternatif lokasi TPI, berdasarkan tiga kriteria penentu, yaitu: kondisi fisik alternatif lokasi, pendukung perkembangan perikanan, dan teknologi penangkapan ikan. Alternatif lokasi yang mempunyai nilai tertinggi merupakan lokasi TPI yang terpilih di Tanjungpinang. Data yang digunakan sebagian besar adalah data-data sekunder dan data lainnya yang didapat dari observasi lapangan (dokumentasi dan wawancara).

Melalui analisis *scoring*, maka lokasi Dompok Lama terpilih sebagai lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tanjungpinang, dengan skor tertinggi yaitu 948. Selain itu, agar Dompok Lama berfungsi secara optimal, maka penelitian ini juga mengkaji arahan pengembangan yang mengatur peletakan bangunan atau prasarana pendukung TPI.

Dengan penelitian ini juga didapat beberapa rekomendasi bagi pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Kota Tanjungpinang, yaitu: sebaiknya di lokasi Tempat Pelelangan Ikan terpilih, perlu dibangun industri perikanan yang dapat mendukung aktivitas pelelangan ikan, seperti pabrik es untuk pengawetan ikan atau industri pengalengan ikan. Selain itu agar TPI dapat berfungsi optimal, maka diperlukan penentuan skala pelayanan TPI yang melingkupi seluruh kota dan pengadaan prasarana pendukung.

Kata kunci: arahan lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

ABSTRACT

Tanjungpinang City have larger ones ocean region than continent, that is equal to 70,59% from wide of city region. With the condition cause fishery sector have potency to become a pledge sector that able to lift economics of Tanjungpinang City. Because some problems in fishery sector (which one of them is inexistence of TPI/ auction place of fish) cause this potency can not been exploited in an optimal condition.

As one of the city which in form of archipelago, Tanjungpinang have many location landing of fish, but this city don't have a TPI (auction place of fish). Therefore, activity landing of transaction and auction of fish happened naturally, without interference and service of governmental. With this condition, hence Government of Tanjungpinang city cannot add Earnings of Genuiness Area (PAD) passing retribution from activity auction of fish haul. Beside that, fish haul transaction controlled by toke (fishmonger), as link between fisherman with the consumer, which cause uncontrollable fish price.

With this fact, Government of Tanjungpinang City planned to develop a TPI (auction place of fish) with three location alternative, that is in Pelantar II, Senggarang, and Dompak Lama. To determine optimal location, hence have to relied on criterions location choice of TPI (according to standard in Indonesia). From that description, the purpose of this research is to studying a optimized location of TPI and dtermining a development zone of TPI chosen.

To reach the purpose of reseach, hence used a analysis determination of location of TPI with method of scoring. This analysis will assess every location alternative of TPI, pursuant of three criterion, they are the physical condition, support in growth of fishery, and fishery technology. The research used directly data from the object study (specially from documentation and interview).

Through analysis of scoring, Dompak Lama is selected as location of TPI at Tanjungpinang City, with highest score that is 948. This research also studying development zones which arranging buildings or facilities of TPI

With this research also got some recommendation to develop auction place of fish at Tanjungpinang City, are: at the location of TPI chosen, should builds a industrial of fishery which support activity auction of fish; needs determination of service scale this TPI, which embosoming Tanjunpinang; and finally, this TPI needs some facilites for optimized function.

Keywords: determination of TPI's location (auction place of fish)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan segala doa kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga karya ilmiah yang berjudul “**Arahan Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tanjungpinang**” telah dapat diselesaikan dengan baik menjadi sebuah tesis sebagai tugas akhir pada Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Dra. Hj. Suryatati A. Manan, selaku Walikota Tanjungpinang yang telah memberikan dukungan moril dan materiil selama saya menyusun tesis ini;
3. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA selaku ketua Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro;
4. Drs. PM. Broto Sunaryo, MSP selaku mentor, atas waktu dan bimbingannya dalam penyusunan tesis;
5. Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP selaku co-mentor, atas masukan yang diberikan guna penyelesaian tesis saya;
6. Ir. Wisnu Pradoto, MT dan Ir. Mardwi Rahdriawan, MT; selaku dosen penguji sidang ujian akhir; atas waktu, kritikan dan saran yang selalu diberikan dalam setiap ujian sehingga berguna bagi pengembangan materi tesis saya;
7. Keluarga saya, atas kesabaran dan perhatiannya selama saya menyusun tesis ini;
8. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam tesis ini, sehingga kritik dan masukan masih diperlukan untuk sempurnanya karya ilmiah ini. Namun, saya berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca lainnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juli 2006

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	7
1.2.1 Rumusan Masalah.....	7
1.2.2 Pertanyaan Penelitian	11
1.3 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Sasaran Penelitian	12
1.3.3 Manfaat Penelitian	12
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	13
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial	13
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial.....	14
1.5 Pendekatan dan Metode Penelitian	16
1.5.1 Pendekatan Penelitian	16
1.5.2 Langkah-Langkah Penelitian	18
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	19

1.5.3.1 Kebutuhan Data	19
1.5.3.2 Tahap Pengumpulan Data	20
1.5.3.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	22
1.5.4 Teknik Analisis	23
1.5.5 Teknik Sampling	25
1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian	26
1.7 Sistematika Pembahasan	29

BAB II ARAHAN LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN

2.1 Teori Lokasi	31
2.2 Pengolahan Sumberdaya Perairan	34
2.3 Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan	37
2.4 Tahapan Pembangunan Pelabuhan Perikanan	38
2.4.1 Studi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	38
2.4.2 Investigasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	39
2.5 Karakteristik Masyarakat Nelayan	39
2.5.1 Pengertian Nelayan	39
2.5.2 Nelayan Tradisional Melayu dan Modern	42
2.5.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Nelayan	44
2.5.4 Tipologi Rumah Tangga Nelayan	46
2.6 Arahkan Lokasi Tempat Pelelangan Ikan	47
2.6.1 Sejarah TPI	47
2.6.2. Faktor-Faktor Lokasi Tempat Pelelangan Ikan	50
2.6.3 Kriteria dan Pertimbangan Lokasi TPI	52
2.6.4. Pendekatan Lokasi TPI	54

BAB III KARAKTERISTIK WILAYAH DAN KELAUTAN KOTA TANJUNGPINANG

3.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang	58
3.1.1 Letak Geografis	58
3.1.2 Kependudukan	60
3.1.3 Pendidikan	61

3.1.4 Sistem Perekonomian.....	62
3.1.5 Sosial Budaya.....	63
3.1.6 Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Lapangan Kerja	64
3.1.7 Transportasi.....	66
3.2 Potensi Sumberdaya Perikanan Kota Tanjungpinang	67
3.2.1 Potensi Perkembangan Produksi	70
3.2.2 Potensi Perkembangan Pasca Panen dan Pemasaran	73
3.2.3 Perkembangan Pembinaan Usaha	74
3.3 Pola Koleksi dan Rantai Distribusi Hasil Penangkapan Ikan di Kota Tanjungpinang	76
3.4 Peningkatan Nilai Ekspor Sektor Perikanan	78
3.5 Lokasi Potensial Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tanjungpinang....	79

BAB IV ARAHAN LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KOTA TANJUNGPINANG

4.1 Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan TPI Kota Tanjungpinang Berdasarkan Persepsi <i>Stakeholder</i> Terkait.....	94
4.1.1 Identifikasi <i>Stakeholder</i> yang Terkait	94
4.1.2 Permasalahan Bidang Perikanan dan Kebutuhan TPI.....	95
4.1.3 Kecenderungan Peletakan TPI	99
4.2 Identifikasi Kriteria-Kriteria dalam Penentuan Lokasi TPI.....	100
4.3 Penentuan Nilai Kriteria dan Variabel Penentuan Lokasi TPI	103
4.4 Analisis Penentuan Lokasi TPI	106
4.4.1 Analisis Kondisi Alternatif Lokasi TPI	106
4.4.1.1 Kriteria Fisik Alternatif Lokasi TPI.....	106
4.4.1.2 Kriteria Pendukung Perkembangan Perikanan	115
4.4.1.3 Kriteria Teknologi Penangkapan Ikan	119
4.4.2 Analisis Penentuan Lokasi TPI Kota Tanjungpinang	120
4.5 Arahan Lokasi TPI Kota Tanjungpinang Terpilih	123
4.5.1 Kondisi Eksisting Dompok Lama	124
4.5.2 Skala Pelayanan dan Kebutuhan Fasilitas Pendukung TPI.....	128
4.5.3 Zona Pengembangan Dompok Lama Sebagai TPI Kota Tanjungpinang.....	130

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 134

5.2 Rekomendasi 135

DAFTAR PUSTAKA 137

LAMPIRAN 139

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Luasan Kecamatan Kota Tanjungpinang.....	2
Tabel I.2	: Perkembangan Produksi Perikanan di Wilayah Kota TPI Tahun 2004	3
Tabel I.3	: Daerah Potensial Pengembangan Budidaya Ikan di Perairan Kepulauan Riau	4
Tabel I.4	: Volume dan Nilai Pemasaran Hasil Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2004	5
Tabel I.5	: Kebutuhan Data Studi Arahan Lokasi TPI Kota Tanjungpinang.....	19
Tabel I.6	: Teknik Penilaian Kondisi Lokasi Berdasarkan Standar atau Kriteria Tertentu	24
Tabel II.1	: Kriteria Lokasi TPI	52
Tabel II.2	: Pertimbangan Lokasi PPI.....	53
Tabel II.3	: Klasifikasi Pelabuhan Perikanan di Indonesia.....	54
Tabel II.4	: Pengelompokan Variabel dan Pengelompokan Kriteria Pemilihan Lokasi TPI.....	56
Tabel III.1	: Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tanjungpinang dan Luas Wilayahnya Tahun 2003	59
Tabel III.2	: Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang Berdasarkan Kecamatan, Kelurahan Jenis Kelamin dan Kewarganegaraan Tahun 2003	60
Tabel III.3	: Daerah Potensial Pengembangan Budidaya Ikan di Perairan Kepulauan Riau	68
Tabel III.4	: Kisaran Kedalaman Perairan di Wilayah Kota Tanjungpinang.....	69
Tabel III.5	: Produksi Perikanan Menurut Asal Produksi Kota Tanjungpinang Tahun 2003 (Ton)	69
Tabel III.6	: Perkembangan Produksi Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2003 (Ton)	72
Tabel III.7	: Perkembangan Unit Pengolahan di Wilayah Kota Tanjungpinang (Ton)	72
Tabel III.8	: Volume dan Nilai Pemasaran Hasil Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2004	73

Tabel III.9	: Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perikanan di Wilayah Kota Tanjungpinang	75
Tabel III.10	: Pendapatan Kotor RTP Petani Nelayan Kota Tanjungpinang Tahun 2004	76
Tabel III.11	: Ekspor Menurut Pelabuhan Muat Kota Tanjungpinang Tahun 2003	78
Tabel III.12	: Volume Hasil Perikanan Senggarang, Pelantar II dan Dompok Tahun 2004	81
Tabel IV.1	: Kondisi dan Kebutuhan Bidang Perikanan Berdasarkan Persepsi <i>Stakeholder</i> Terkait	98
Tabel IV.2	: Peletakan Lokasi TPI Kota Tanjungpinang Berdasarkan Persepsi <i>Stakeholder</i> Terkait	99
Tabel IV.3	: Bobot Tiap Kriteria Penentu Lokasi TPI.....	103
Tabel IV.4	: Kriteria, Uraian, dan Nilai Variabel Penentu Lokasi TPI	105
Tabel IV.5	: Kedalaman Perairan Pada Alternatif Lokasi TPI	108
Tabel IV.6	: Kondisi Lahan Alternatif Lokasi TPI.....	109
Tabel IV.7	: Prasarana Pendukung Pengembangan TPI.....	111
Tabel IV.8	: Jumlah Nelayan (RTP) DI Tiap Alternatif Lokasi TPI Tahun 2004	117
Tabel IV.9	: Jenis dan Jumlah Alat Tangkap Ikan di Kota Tanjungpinang.....	119
Tabel IV.10	: Perbandingan Variabel Kondisi Fisik.....	121
Tabel IV.11	: Perbandingan Variabel Pendukung Perkembangan Perikanan.....	121
Tabel IV.12	: Perbandingan Variabel Alat Tangkap Ikan	122
Tabel IV.13	: Penilaian Bobot Akhir dari Kriteria Penentu Lokasi Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Rantai Pemasaran Hasil Perikanan di Kota Tanjungpinang	8
Gambar 1.2	: Peta Wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang	15
Gambar 1.3	: Kerangka Pemikiran Studi Arahkan Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tanjungpinang.....	28
Gambar 2.1	: Perkembangan Wilayah Pasaran Heksagonal dan Hirarki Tempat Tinggal.....	33
Gambar 3.1	: Rantai Pemasaran Hasil Perikanan di Kota Tanjungpinang	77
Gambar 3.2	: Aktivitas Perikanan dan Permukiman	84
Gambar 3.3	: Sarana Transportasi Laut	86
Gambar 3.4	: Sarana dan Alat Tangkap Ikan.....	88
Gambar 3.5	: Kondisi Pantai Wilayah Senggarang	89
Gambar 3.6	: Kondisi Pantai Wilayah Dompok Lama	90
Gambar 3.7	: Aktivitas Transaksi Jual Beli Ikan.....	92
Gambar 3.8	: Peta Alternatif Lokasi Tempat Pelelangan Ikan Kota Tanjungpinang	93
Gambar 4.1	: Alat Tangkap Ikan Nelayan Kota Tanjungpinang	96
Gambar 4.2	: Kondisi Lahan di Alternatif Lokasi Dompok Lama	110
Gambar 4.3	: Jalan Menuju Pelantar II	112
Gambar 4.4	: Jalan Menuju Senggarang.....	112
Gambar 4.5	: Peta Jangkauan Penangkapan Ikan Tiap Alternatif Lokasi TPI....	114
Gambar 4.6	: Aktivitas Pelelangan Ikan	115
Gambar 4.7	: Peta Kondisi Eksisting dan Rencana Pengembangan Bidang Perikanan.....	120
Gambar 4.8	: Permukiman Nelayan di Kelurahan Dompok Lama	126
Gambar 4.9	: Denah Lokasi Tempat Pelelangan Ikan	131
Gambar 4.10	: Zoning Lokasi TPI Terpilih (Dompok Lama).....	133

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	: Form Wawancara	139
Lampiran B	: Kondisi Eksisiting Wilayah Alternatif Lokasi	145

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Propinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari berbagai pulau memiliki letak yang strategis. Propinsi ini berlokasi pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia antara Timur dan Barat, serta antara Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan. Kedudukan strategis ini mendorong Kepulauan Riau menjadi salah satu sentra perdagangan dan pelayaran di kawasan Selat Malaka. Kedudukan dan peranan otonomis yang penting itu, telah mendorong Pulau Bintan dan kawasan sekitarnya tumbuh dan berkembang menjadi tempat-tempat yang ramai didatangi dan dikenal luas negara lain. Salah satu tempat tersebut adalah Tanjungpinang yang terletak di bagian timur Teluk Bintan dan merupakan Ibukota Propinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang juga berperan sebagai pusat perkembangan wilayah hinterland tepi, sebagai titik navigasi, dan fungsi maritim lainnya dengan posisinya yang agak ke dalam, terlindung dari pengaruh cuaca buruk, dan alur laut yang cukup ideal bagi armada pelayaran untuk berlindung dari serangan badai, atau untuk berlabuh.

Luas keseluruhan Kota Tanjungpinang adalah 239,5 km². Wilayah kota ini dapat dibagi menjadi dua kategori wilayah, yaitu Tanjungpinang daratan dan lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 29,41%, sedangkan luas wilayah lautan sebesar 70,59%.

TABEL I.1
LUASAN KECAMATAN DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2003

No.	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Tanjungpinang Barat	34,5
2	Tanjungpinang Kota	52,5
3	Bukit Bestari	69
4	Tanjungpinang Timur	83,5

Sumber: Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2003

Besarnya luas wilayah lautan tersebut menyebabkan sektor perikanan sangat berpotensi untuk menjadi sektor andalan yang dapat mengangkat perekonomian Kota Tanjungpinang. Indikasi potensi perkembangan sektor ini telah terlihat pada sebagian masyarakat setempat yang tinggal di wilayah pesisir pantai dan yang berada di pulau-pulau, yang mata pencahariannya bertumpu produksi perikanan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2003 tercatat jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) sebanyak 1.318 RTP dan pada tahun 2004 meningkat 0,02% atau bertambah 28 RTP (RTRW Kepri Tahun 2005). Disamping itu, kegiatan perikanan tangkap merupakan kegiatan dominan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir/ nelayan di Kota Tanjungpinang, sehingga produksi perikanan Kota Tanjungpinang hampir 98 % berasal dari usaha penangkapan ikan. Adapun total produksi perikanan Kota Tanjungpinang pada tahun 2004 mengalami peningkatan rata-rata 26,6% yakni dari 5.716,003 ton pada tahun 2003 menjadi 8.453,630 ton pada tahun 2004.

TABEL I.2
PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN (Ton)
DI WILAYAH KOTA TEMPAT PELELANGAN IKAN TAHUN 2004

No	Produksi	Tahun		Perkembangan Produksi	
		2003	2004	Pertambahan	(%)
1.	Penangkapan	5.466.855	8.171.640	2.704.785	49,5
2.	Budidaya laut	144.000	136.895	-7.105	-4,9
3.	Budidaya air tawar	33.000	36.841	3.841	11,6
4.	Pengolahan	72.148	108.254	36.106	50,0
J u m l a h		5.716.003	8.453.630	2.737.627	Rata-rata 26,6

Sumber: Dinas SDA dan PMD, 2004

Banyaknya jumlah armada perikanan juga mendorong meningkatnya jumlah produksi perikanan di kota Tanjungpinang, yaitu 899 unit armada dengan rincian kapal motor 536 unit dan perahu tanpa motor 360 unit.

Perairan Tanjungpinang juga dijadikan tempat berlabuhnya kapal-kapal pukat ikan yang beroperasi di laut (ZEE 1) yang hingga kini memiliki izin penangkapan berjumlah 101 unit. Hal ini disebabkan karena Kota Tanjungpinang lebih mudah dan dekat untuk memasarkan hasil produksi tangkapan ikan, demikian juga halnya dengan kapal-kapal nelayan yang berukuran 6 GT ke bawah yang berasal dari pulau-pulau kecil.

Pada saat ini, banyak nelayan yang mengambil tangkapan ikan dan menjual hasil tangkapannya kepada toke, sehingga pendapatan yang diperoleh cenderung hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibat posisi tawar mereka yang rendah. Disamping itu peralatan yang ada masih sederhana dan terbatas, belum adanya tempat pelelangan dan industri pengolahan ikan, belum memadainya fasilitas pelabuhan ikan, dan belum adanya tata ruang pesisir, serta

tidak adanya pelabuhan ekspor. Hal tersebut menunjukkan potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kota Tanjungpinang mempunyai banyak lokasi pendaratan ikan yang tersebar di sepanjang pantai. Selain sebagai tempat pendaratan ikan dapat juga dijadikan sebagai budidaya ikan serta transaksi jual beli ikan. Adapun yang terbesar terdapat di 3 lokasi yaitu Senggarang, Pelantar II dan Dompok Lama. Ketiga lokasi ini dijadikan sebagai tempat pendaratan ikan bagi para nelayan, tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan dan budidaya ikan

TABEL I.3
DAERAH POTENSIAL PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN DI
PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

Kecamatan	Daerah / perairan	Jenis ikan	Jenis Kegiatan Budidaya
1. Senayang	Selat Senayang, Rejai, Tajur Biru, Tekoleh, P. Medong, P. Mamut	Kerapu Sunuk, Kerapu Tikus, Ketarap dan Lebam.	Keramba jaring apung, keramba tancap
2. Singkep	Kuala Raya, Bakong, Kota, Teluk Sekana.	Kerapu Sunuk	Tambak, Keramba jaring apung
3. Lingga	Teluk Limbung, Penuba, Pancur, Kelumun, Merawang / Tg. Buton.	Kerapu	Keramba jaring apung.
4. Bintan Timur	P. Mantang, P. Serai, Selat Gin, Dan Numbing, Siulung, Telang, Kelong Dan Mapor, P. Ajap Dan Ngali, P. Bunut, P. Dendun.	Kerapu Sunuk	Keramba jaring apung
5. T. Pinang Timur / Barat	Selat Dompok, Selat Air Raya, Sei Jang, Kampung Lama Dan Dompok, Kampung Kelam Pagi, P. Los. Senggarang, Pelantar	Kerapu Sunuk, Kerapu Hitam, Kakap Merah, Dingkis	Keramba jaring apung, Keramba Tancap
6. T.Pinang Kota		Kerapu, Kakap Merah	Keramba jaring apung

Lanjutan

Kecamatan	Daerah / perairan	Jenis ikan	Jenis Kegiatan Budidaya
7. Teluk Bintan	Pulau Penghujan	Kerapu, Kakap Merah	Keramba tancap
8. Bintan Utara	-	-	-
9. Tambelan	P. Tembelan, P. Bedua	Kerapu	keramba jaring apung

Sumber: Bappeda Riau dan PKSPL IPB, 2003 : Bappeda Kepri dan PPLH UNRL, 2003

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga lokasi tersebut sebagai embrio Tempat Pelelangan Ikan yang tersebar di Kota Tanjungpinang. Tingginya nilai ekspor perikanan juga menjadi faktor dalam penentuan lokasi bagi pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dan berikut adalah volume nilai ekspor Kota Tanjungping baik lokal, antar pulaumaupun ke luar negeri.

TABEL I.4
VOLUME DAN NILAI PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004

No.	Pemasaran	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
1.	Lokal	4.243,358	23.743.571.250,-
2.	Antar Pulau	1.818,582	10.175.816.250,-
3.	Eksport	2.391,690	52.707.303.000,-
J u m l a h		8.453,630	86.626.690.500,-

Sumber: Dinas SDA dan PMD, 2004

Memperhatikan pada fenomena tersebut diatas, sektor perikanan merupakan potensi yang sangat mendukung bagi perkembangan Kota Tanjungpinang dan karena belum tersedianya Tempat Pelelangan Ikan, maka perlu disediakan Tempat Pelelangan Ikan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan potensi perikanan tersebut. Dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk

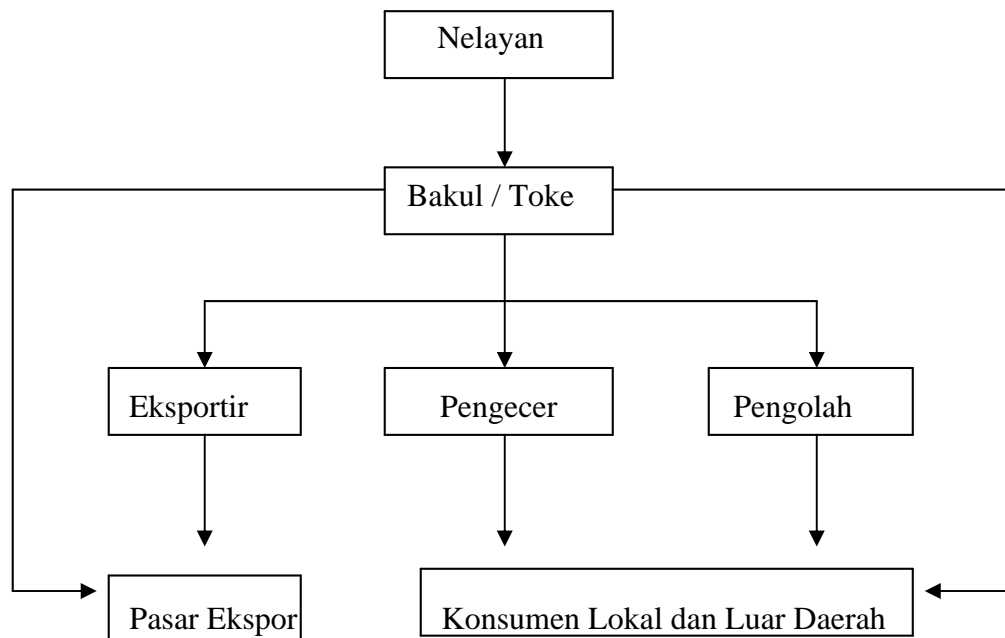
perikanan dan mampu memberikan kemudahan bagi para nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya yang dalam hal ini posisi tawarnya berada di tangan para toke, serta mempermudah dalam memperoleh produk sesuai dengan produk perikanan yang mereka inginkan. Disamping itu, diharapkan mampu menarik zona-zona penangkapan ikan di sekitar Kota Tanjungpinang, seperti Pulau Singkep, Pulau Karimun, Pulau Batam, Pulau Lingga, Pulau Senayang, dan pulau-pulau terdekat yang belum mempunyai Tempat Pelelangan Ikan, untuk melakukan transaksi pelelangan ikan di lokasi Tempat Pelelangan Ikan yang direncanakan. Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan dapat memberikan retribusi bagi pemerintah, sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

Banyaknya pusat penangkapan/ pendaratan ikan dan zona penangkapan ikan tersebut mendorong Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk membangun suatu Tempat Pelelangan Ikan sebagai wadah dalam menampung dan mendistribusikan ikan dari berbagai lokasi pendaratan ikan yang ada secara optimal. Adapun lokasi yang dijadikan alternatif Tempat Pelelangan Ikan didasarkan pada tempat berlabuh kapal-kapal nelayan, sekaligus transaksi hasil tangkapan ikan, yang merupakan embrio Tempat Pelelangan Ikan bagi Kota Tanjungpinang. Karena terdapat beberapa alternatif lokasi Tempat Pelelangan Ikan, maka diperlukan suatu arahan lokasi alternatif Tempat Pelelangan Ikan yang diangkat dalam penelitian ini dengan judul arahan lokasi Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Banyaknya tempat penangkapan/ pendaratan ikan di Kota Tanjungpinang menjadikan harga yang terjadi akan bersaing antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya karena adanya peran toke yang dominan dalam penjualan hasil tangkapan ikan. Disamping itu pola koleksi dan distribusi penjualan ikan yang kurang optimal menyebabkan kerugian khususnya bagi para nelayan. Secara umum para nelayan menjual hasil tangkapan ikannya kepada toke/ bakul yang selanjutnya dari bakul akan dipasarkan kembali kepada eksportir, pengecer, dan pengolah. Setelah mengalami proses pengolahan kemudian dipasarkan kepada pasar ekspor maupun konsumen lokal serta luar daerah. Dari hal tersebut jelas bahwa nelayan cenderung dirugikan karena peran toke yang dominant dalam pemasaran ikan. Bila pemasaran dapat dilakukan oleh nelayan secara langsung kepada pihak pengecer/ ekspor maka nelayan akan mendapatkan keuntungan tanpa melalui perantara toke. Berikut adalah gambar rantai distribusi penjualan/ pemasaran ikan



Sumber: observasi dan hasil analisis, 2006

GAMBAR 1.1
RANTAI PEMASARAN HASIL PERIKANAN DI KOTA
TANJUNGPINANG

Melihat kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk membangun suatu Tempat Pelelangan Ikan sebagai pusat aktivitas pelelangan ikan di Kota Tanjungpinang. Perlunya Tempat Pelelangan Ikan ini diharapkan dapat mengendalikan/ menghindarkan adanya persaingan harga yang terjadi di pasaran, sehingga tidak merugikan konsumen serta proses koleksi dan distribusi ikan dapat dilaksanakan secara optimal. Namun demikian, dalam penentuan lokasi Tempat Pelelangan Ikan tersebut perlu dilakukan kajian terhadap alternatif lokasi yang ada.

Dari tinjauan yang telah dilakukan terhadap beberapa alternatif lokasi yang ada, kondisi tempat penangkapan/ pendaratan ikan yang akan dijadikan sebagai Tempat Pelelangan Ikan, secara umum terdapat beberapa permasalahan,

yaitu adanya bakul/ toke yang memiliki peran yang sangat menentukan dalam kegiatan pemasaran ikan, karena sebagian besar nelayan di wilayah ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan toke. Nelayan setempat masih sangat tergantung pada keberadaan toke. Bila toke tersebut tidak bersedia untuk menyalurkan hasil tangkapan ikan mereka, maka para nelayan akan kesulitan untuk menjual hasil tangkapannya. Hal ini menyebabkan sebagian besar harga ditentukan oleh keberadaan toke, karena kurangnya pantauan dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengurangi hal tersebut dan mengoptimalkan kegiatan koleksi dan distribusi ikan di Kota Tanjungpinang, maka perlu adanya suatu Tempat Pelelangan Ikan.

Adapun faktor-faktor yang mendorong perlunya pengembangan lokasi Tempat Pelelangan Ikan Kota Tanjungpinang adalah:

1. Penduduk usia kerja, yaitu untuk penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Tanjungpinang pada umumnya bekerja di sektor perdagangan (Data Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Pada Tahun 2004). Jumlah ini akan terus meningkat mengingat tingginya *interest* para penduduk. Hal tersebut sebaiknya didukung dengan pengembangan pusat perdagangan perikanan di Kota Tanjungpinang ini agar tidak terjadi penumpukan tenaga kerja.
2. Pemanfaatan perairan dan laut di Kota Tanjungpinang, secara umum meliputi kegiatan perikanan, dan transportasi barang dan penumpang. Namun hingga saat ini penggunaan perairan yang paling strategis adalah sebagai sarana penghubung antarpulau dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu perlu dilakukan

pengembangan potensi ini melalui penentuan pusat tangkapan ikan didukung dengan pemanfaatan fungsi perairan yang telah ada, yaitu sebagai sarana penghubung antarpulau.

3. Sektor perikanan dan kelautan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu komponen penting pada sektor ini adalah keberadaan Tempat Pelelangan Ikan. Oleh karena itu, peningkatan sektor perikanan dan kelautan harus didukung dengan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan.

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan sektor perikanan, maka diperlukan suatu upaya untuk mendukung kelancaran aktivitas nelayan, khususnya dalam kegiatan koleksi dan distribusi ikan. Salah satu usaha Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan membangun Tempat Pelelangan Ikan, sebagai pusat utama dalam kegiatan di bidang perikanan. Adapun penentuan lokasi ini didasarkan pada alternatif lokasi yang telah ada yang merupakan embrio dan dapat dijadikan sebagai Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang. Merujuk pada RTRW Kota Tanjungpinang (BAPPEDA Kota Tanjungpinang tahun 2003), alternatif lokasi Tempat Pelelangan Ikan yang telah dipilih ada tiga lokasi, yaitu Senggarang yang terletak di BWK V, Dompok lama yang terletak di BWK II, dan Pelantar II yang terletak di BWK I. Penentuan alternatif lokasi tersebut dikarenakan ketiga lokasi tersebut merupakan embrio bagi pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Kota Tanjungpinang, disamping itu ketiga lokasi tersebut memiliki aktivitas perikanan (transaksi) yang cukup tinggi serta banyaknya kapal-

kapal yang berlabuh di ketiga lokasi tersebut, oleh karenanya ketiga lokasi tersebut dapat dijadikan sebagai lokasi alternatif bagi pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, perlu adanya kajian terhadap tiga lokasi tersebut untuk menentukan lokasi yang paling optimal dalam pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang sebagai tempat menampung dan pemasaran ikan di Kota Tanjungpinang.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa banyaknya lokasi penangkapan/ pendaratan ikan di Kota Tanjungpinang menjadikannya kurang optimal dalam aktivitas penampungan dan distribusi ikan di Kota Tanjungpinang, hal ini dapat menimbulkan persaingan harga antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karenanya salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah dengan membangun Tempat Pelelangan Ikan sebagai pusat utama bagi penampungan dan distribusi dari berbagai tempat pendaratan ikan yang ada di Kota Tanjungpinang. Dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan ini diharapkan proses tersebut dapat dilakukan secara optimal dan tidak bergantung kepada toke dalam memasarkan hasil tangkapan, sehingga harga yang terjadi dapat dikendalikan. Dari beberapa alternatif lokasi yang akan dijadikan Tempat Pelelangan Ikan terdapat tiga alternatif lokasi yaitu Senggarang, Dompok lama, dan Pelantar II. Dari hal tersebut maka pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah ***"Dimanakah Lokasi Yang Terbaik Bagi Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang?"***

1.3 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan arahan lokasi Tempat Pelelangan Ikan Kota Tanjungpinang, dan menetapkan zona pengembangan Tempat Pelelangan Ikan terpilih, berdasar kondisi eksisting yang ada.

1.3.2 Sasaran Penelitian

- 1 Mengidentifikasi kondisi eksisting Kota Tanjungpinang
- 2 Melakukan kajian terhadap kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan lokasi Tempat Pelelangan Ikan
- 3 Identifikasi alternatif-alternatif lokasi Tempat Pelelangan Ikan
- 4 Identifikasi permasalahan dan kebutuhan Tempat Pelelangan Ikan berdasar persepsi *stakeholder*
- 5 Analisis penentuan lokasi dan arahan lokasi Tempat Pelelangan Ikan terpilih
- 6 Merekomendasikan hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam membuat kebijakan penataan, dan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang.

1.3.3. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penetapan kebijakan lokasi dan kebijakan penataan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara umum. Dengan penelitian ini diharapkan sebelum Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan penataan, pengelolaan, dan pengembangan dalam bentuk lokasi Tempat Pelelangan

Ikan, terlebih dahulu mempertimbangkan persepsi dan preferensi masyarakat agar kebijakan yang dilaksanakan tidak salah sasaran.

2. Manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan konsep, khususnya yang berkaitan dengan konsep-konsep lokasi Tempat Pelelangan Ikan yang dipadukan dengan pertimbangan persepsi dari *stakeholder* yang terkait dengan bidang perikanan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri dari ruang lingkup substansial dan spasial.

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Dalam lingkup substansial ini adalah untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang dibahas, penulis perlu untuk membatasi agar tidak menjadi bias dari permasalahan yang ada, yaitu: pengkajian difokuskan pada analisis terhadap alternatif lokasi yang akan dijadikan sebagai pengembangan Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan kriteria-kriteria penentunya.

Adapun literatur yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- teori lokasi yang terkait dengan penelitian (von Thunen, *Central Place*, Weber, dan lainnya.
- materi pengolahan sumberdaya perairan dan tahapan pembangunan pelabuhan perikanan.

- materi mengenai arahan lokasi Tempat Pelelangan Ikan, yaitu faktor, kriteria, dan pendekatan pemilihan lokasi Tempat Pelelangan Ikan.

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Penelitian ini akan dilaksanakan mencakup wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota, dan Kecamatan Tanjungpinang Barat, serta zona-zona penangkapan ikan yang ada di sekitar Kota Tanjungpinang

1.5 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Kajian ini akan menggunakan pendekatan studi kualitatif dan kuantitatif, dengan penekanan pada studi kualitatif sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian yang akan dicapai. Pendekatan kualitatif dilakukan juga karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui data-data statistik sehingga diperlukan suatu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial yang merupakan serangkaian kegiatan atau upaya untuk menjangkau informasi secara mendalam dari berbagai fenomena atau permasalahan yang ada di dalam suatu obyek yang diteliti, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris. Sedangkan metode pendekatan kuantitatif yang dilakukan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memformulasikan data-data kualitatif yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk numerik..

Menurut Bogdan dan Taylor, 1973 dalam monolog, 2002: 3, metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para responden maupun dari hasil pengamatan di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif ini diartikan juga sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana yang dilihat (Nawawi, 1993: 24). Pendekatan kualitatif ini memungkinkan seorang peneliti mendapatkan data primer dari

sumbernya sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang bersifat analitis, konseptual, dan kategoris dari data itu sendiri.

Miles (1992: 1) mengatakan bahwa data kualitatif merupakan suatu sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup sektoral. Penemuan-penemuan dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif mempunyai mutu yang tidak dapat disangkal. Kalimatnya bersifat khusus bilamana disusun ke dalam bentuk cerita atau peristiwa mempunyai kesan yang lebih nyata, hidup, dan penuh makna, sehingga dapat jauh lebih meyakinkan para pembacanya daripada halaman-halaman yang penuh dengan angka-angka (Miles, 1992: 2).

Selain itu pendekatan yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah metode pendekatan survai, yaitu suatu penelitian yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak. Van Dalen dalam Arikunto (2002: 93) mengatakan bahwa pendekatan survai ini merupakan bagian dari metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status) fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan.

Menurut Whitney dalam Nazir (1988: 63), berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berbagai pengaruh dari suatu permasalahan. Dengan

menggunakan metode penelitian deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga terbentuk sebuah studi yang komparatif.

1.5.2 Langkah–Langkah Penelitian

Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, agar pendapatan daerah dari sektor perikanan laut ini mampu meningkatkan sumber penerimaan APBD melalui retribusi, agar mampu berperan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan kota, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan perijinan survai kebeberapa instansi sebagai obyek penelitian.
Instansi yang dimaksud adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tanjungpinang, Dinas Sumber Daya Alam, dan Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang.
- b. Melakukan pengumpulan data sekunder di beberapa instansi tersebut dan perpustakaan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan perikanan laut yang telah melakukan transaksi pelelangan ikan laut pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004.
 2. Melakukan identifikasi terhadap kriteria penentuan lokasi pelelangan yang dikaitkan dengan proses penetapannya.
 3. Melakukan pendataan harga dalam proses pelelangan.
 4. Pengolahan data, melalui editing, data sekunder dan primer yang diolah menjadi bentuk tabel-tabel silang, yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan analisis.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

1.5.3.1 Kebutuhan Data

Data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk dimanfaatkan dalam penelitian ini. Berdasarkan atas sasaran yang telah ditentukan, maka data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel I.5.

TABEL I.5
KEBUTUHAN DATA STUDI ARAHAN LOKASI
TEMPAT PELELANGAN IKAN KOTA TANJUNGPINANG

No.	Sasaran	Data	Manfaat	Jenis Data	Sumber
1.	Mengidentifikasi kondisi eksisting Kota Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah administrasi Kota Tanjungpinang - Kondisi nelayan - Sistem transportasi - Potensi sumberdaya kelautan - Potensi pengembangan produksi 	Mengetahui kondisi eksisting Kota Tanjungpinang	Primer Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi lapangan • Bappeko Kota Tanjungpinang
2.	Identifikasi kriteria-kriteria dalam penentuan lokasi Tempat Pelelangan Ikan Kota Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana dan prasarana - Aksesibilitas - Transportasi - Jumlah nelayan - Kajian lokasi tempat pelelangan ikan 	Menentukan kriteria-kriteria yang digunakan sebagai perbandingan dalam menentukan alternatif lokasi	Primer Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas SDA dan Pemberdayaan • Dinas Pendapatan • Observasi pangan • Kajian literatur
3.	Identifikasi lokasi alternatif untuk pengembangan Tempat Pelelangan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Data lokasi alternatif Tempat Pelelangan Ikan - Data sarana dan prasarana - Kondisi eksisting alternatif Tempat Pelelangan Ikan 	Mengetahui kondisi eksisting alternatif lokasi Tempat Pelelangan Ikan	Primer Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Kajian literatur

lanjutan

No	Sasaran	Data	Manfaat	Jenis Data	Sumber
4.	Identifikasi masalah dan kebutuhan Tempat Pelelangan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Stakeholder</i> terkait - Data kebutuhan Tempat Pelelangan Ikan berdasar persepsi <i>stakeholder</i> 	Mengetahui kebutuhan Tempat Pelelangan Ikan berdasar persepsi <i>stakeholder</i>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara
5.	Analisis penentuan lokasi dan arahan lokasi Tempat Pelelangan Ikan terpilih	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi eksisting alternatif lokasi Tempat Pelelangan Ikan - Peta eksisting dan rencana Kota Tanjungpinang 	Menentukan lokasi alternatif Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan analisis yang dilakukan	Primer Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • RTRW Kota Tanjungpinang • Kajian literatur

Sumber: hasil analisis 2006

1.5.3.2 Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian digunakan sebagai *input* pada saat melakukan analisis. Tahap pengumpulan data meliputi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pengumpulan data primer, yaitu survai yang dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dari data sekunder. Survai primer dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
 - a. Observasi; merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang gejala-gejala di lapangan yang dimaksudkan untuk menyamakan informasi yang diperoleh dari data sekunder dengan kondisi lapangan.
 - b. Wawancara; pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada para responden yang terdiri dari pihak pengusaha, warga masyarakat (nelayan) dan nara sumber dari pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terpilih, baik dari kalangan para ahli maupun pejabat

yang berwenang. Dalam penelitian ini pertanyaan dalam wawancara terbatas pada sektor perikanan dan pengadaan Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang.

Dengan wawancara ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang mendukung dalam studi ini terutama terkait dengan Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang

Dalam mengolah data dan informasi ini dilakukan kodenisasi dan kategorisasi data yaitu sebagai berikut (Indrianingrum, 2004):

1. Dalam tahap ini data dan informasi yang dikumpulkan mengalami seleksi berupa reduksi dan diinterpretasi dengan menggunakan skema, gambar dan narasi
 2. Data/ informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dituliskan kategori, nomor narasumber, nomor halaman dan nomor alenia. Misalnya OR untuk organisasi, PE untuk pengaturan dan lain-lain. Contoh penulisan OR/01/01/01 yang artinya informasi yang diperoleh dari narasumber nomor satu, pada catatan halaman pertama, alinea pertama
 3. untuk data yang sama dikelompokkan dan disusun menurut kategorisasi untuk mempermudah dalam proses analisis dan interpretasi
- c. Dokumentasi lapangan (observasi visual foto), merupakan salah satu survei primer yang dilakukan dengan cara observasi ke lapangan dengan membawa alat bantu berupa kamera untuk mendapatkan gambaran kondisi

eksisting wilayah studi secara visual. Kegiatan ini digunakan untuk mendokumentasikan keadaan eksisting, sehingga membantu dalam upaya pendeskripsian keadaan eksisting.

2. Pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada instansi-instansi terkait seperti Dinas Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappeko Tanjungpinang, Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang.

1.5.3.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah terlebih dahulu dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel guna kepentingan analisis kegiatan pengolahan data yang meliputi :

a. Editing

Merupakan data yang masuk kemudian diperiksa kembali apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiannya atau mungkin datanya tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh data yang valid dan reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Coding

adalah proses pemberian tanda, simbol ataupun kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama, tanda tersebut dapat berupa angka atau huruf.

c. Tabulating

adalah pengelompokan jawaban-jawaban yang serupa dengan teliti dan teratur, kemudian dihitung dan dijumlah berapa banyak peristiwa, gejala,

items yang termasuk dalam satu kategori, kegiatan tersebut dilaksanakan sampai terwujud tabel/ grafik yang berguna.

1.5.4 Teknik Analisis

Penggunaan teknik analisis akan disesuaikan dengan kondisi eksisting dan pendekatan penelitian yang digunakan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam analisis yang dilakukan. Dalam hal ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Pada pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan pengolahan data yang bersifat non-numerik. Identifikasi ini merupakan penggambaran secara deskripsi terhadap data-data eksisting yang telah dikumpulkan, yaitu hasil dari *Direct Observation*, dan survei instansional. Adapun analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, baik terhadap kondisi eksisting Tempat Pelelangan Ikan, faktor-faktor penentu lokasi Tempat Pelelangan Ikan, dan alternatif lokasi Tempat Pelelangan Ikan di kota tanjungpinang.
- Pada pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan pengolahan data dengan menggunakan teknik analisis bersifat kuantitatif. Penggunaan pendekatan ini untuk mengolah data-data numerik melalui pemberian skor terhadap faktor-faktor dalam penentuan lokasi Tempat Pelelangan Ikan. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Hasil dari pengolahan data tersebut akan memberikan lokasi alternatif yang optimal bagi Tempat Pelelangan Ikan. Hasil dari analisis

di atas masih berupa angka-angka, sehingga diperlukan deskripsi terhadap hasil analisis tersebut.

Adapun analisis yang digunakan adalah analisis *scoring*, yaitu untuk memberikan penilaian perbandingan terhadap kriteria-kriteria penentu lokasi Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang. Teknik analisis ini digunakan untuk menilai tingkat keunggulan atau kondisi yang ideal dari suatu lokasi. Untuk pembobotan yang berdasarkan standar yang mana pengukuran nilainya menggunakan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kondisi yang paling baik diberi skor tertinggi, dan kondisi terburuk diberi skor terendah, yaitu 1 (Vrendenbert, 1983: 103-111). Pembobotan dengan skala ini dilakukan untuk menentukan skala prioritas penentuan lokasi. Dalam analisis ini lebih sesuai, bila digunakan skala *likert* karena tidak ada pengurangan nilai, dengan nilai antara 1 (untuk kondisi terburuk/ kurang memenuhi) sampai 3 (untuk kondisi terbaik/ memenuhi). Hal ini berdasarkan pada analisis yang dilakukan, yaitu skor 1 untuk yang terburuk/ tidak memenuhi, skor 2 untuk yang cukup memenuhi, skor 3 untuk yang terbaik/ memenuhi.

TABEL I.6
TEKNIK PENILAIAN KONDISI LOKASI
BERDASARKAN STANDAR ATAU KRITERIA TERTENTU

No.	Kesesuaian Dengan Kondisi Ideal/ Standar	Bobot/ Nilai
1	Sesuai/ lebih dari kondisi ideal/ standar (memenuhi)	3
2	Hampir/ sesuai dengan kondisi ideal/ standar (cukup memenuhi)	2
3	Kurang dari kondisi ideal/ standar (tidak memenuhi)	1

Sumber Vrendenbert J, 1983

Pada penelitian ini, pemberian skor disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di lokasi studi yaitu skor 1, apabila kondisi yang ada kurang sesuai dengan standar yang telah ditentukan; skor 2, apabila kondisi yang ada mendekati standar yang telah ditentukan; sedangkan skor 3, apabila kondisi yang ada memenuhi standar yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Adapun standar yang dimaksud adalah kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Sampling

Semua wilayah kota dijadikan sebagai daerah atau area penelitian. Peneliti berusaha agar populasi yang ada dalam area populasi terdapat wakil-wakil sebagai respondennya. Dengan demikian, diusahakan agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif. Ciri-ciri apa yang esensial, strata apa yang harus diwakili bergantung karakteristik populasinya. Karena adanya karakteristik yang berbeda dalam populasinya, maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Stratified Random Sampling*.

Dalam penelitian ini responden yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Tanjungpinang

Sebagai pihak yang merencanakan dan mengatur penataan ruang Kota Tanjungpinang.

2. Dinas Sumber Daya Alam (SDA)

Sebagai pihak yang berkompeten dalam bidang kelautan dan perikanan untuk wilayah Kota Tanjungpinang.

Dua sampel diatas mewakili *stakeholder* pemerintah

3. pengusaha perikanan

pengusaha perikanan akan mewakili *stakeholder* dari pihak yang terlibat dalam bidang perikanan, baik untuk penangkapan, pengadaan peralatan, budidaya, atau transaksi hasil tangkapan ikan.

4. ketua perkumpulan nelayan di tiga alternatif lokasi Tempat Pelelengan Ikan

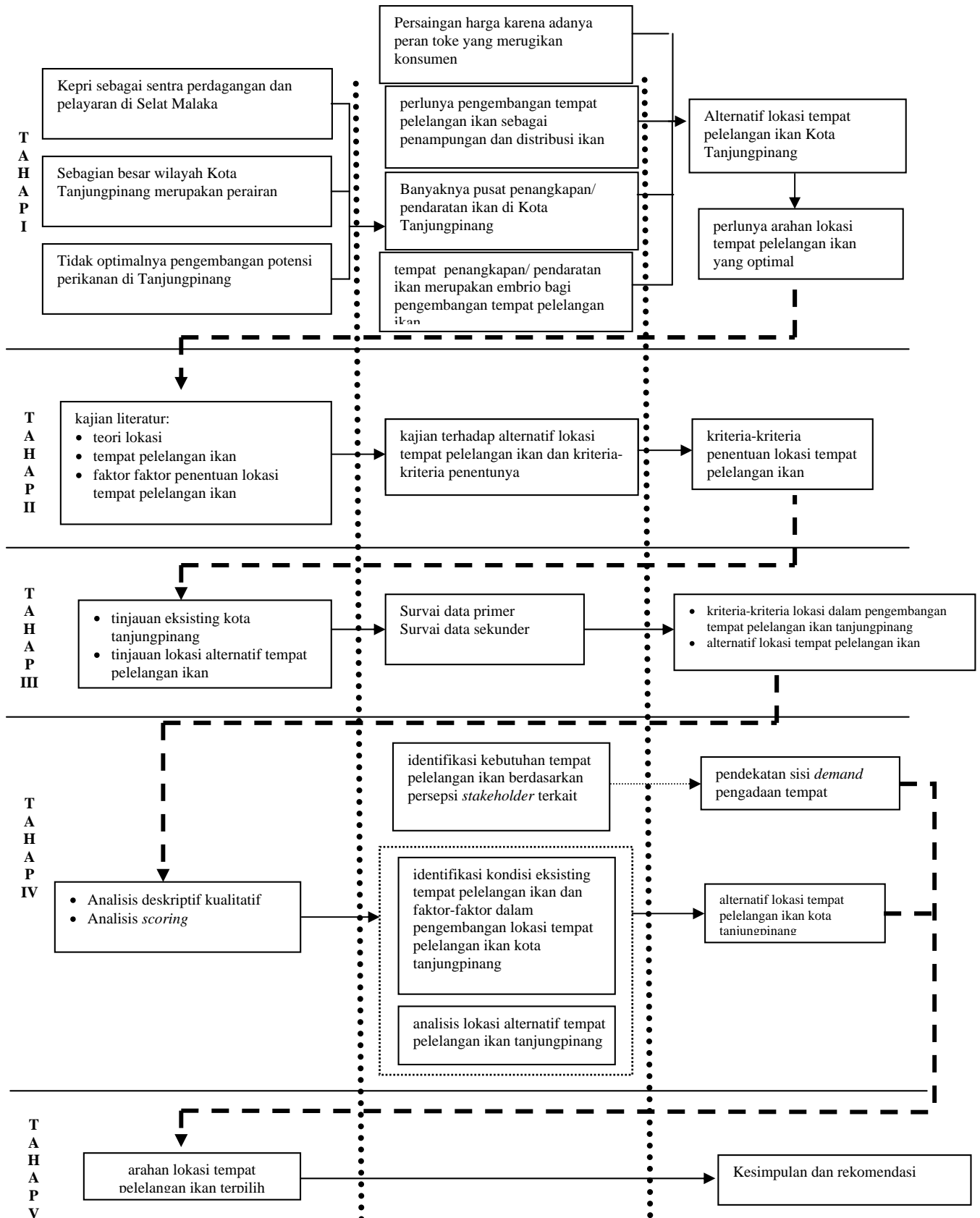
Sebagai aktor utama dalam hal penangkapan ikan, sehingga mereka mengetahui kondisi, perkembangan, dan permasalahan bidang kelautan dan perikanan, maka ketua perkumpulan nelayan akan mewakili *stakeholder* nelayan.

1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Kota Tanjungpinang memiliki potensi perikanan yang cukup besar mengingat sebagian besar wilayah Kota Tanjungpinang merupakan perairan, adanya hal tersebut menjadikan sebagian besar rumah tangga bergerak di sektor perikanan. Disamping itu, produksi perikanan terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2003, yaitu 5.716,003 ton menjadi 8.453,630 ton pada tahun 2004, dengan jumlah produksi 2.737.627 Ton. Namun demikian, potensi ini menjadi kurang optimal, karena adanya peran toke yang dominan dalam menentukan harga sehingga harga menjadi bersaing antar tempat yang satu dengan tempat yang lain, hal ini secara tidak langsung akan merugikan pihak nelayan.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan perkembangan sektor perikanan, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang akan membangun Tempat Pelelangan Ikan dengan memanfaatkan embrio Tempat Pelelangan Ikan yang tersebar di sekitar Kota Tanjungpinang. Untuk melakukan hal tersebut maka diperlukan suatu kajian terhadap alternatif lokasi embrio Tempat Pelelangan Ikan yang ada. Untuk pengadaan suatu fasilitas, yang dalam hal ini adalah Tempat Pelelangan Ikan, maka diperlukan pendekatan dari sisi *demand*, yaitu kebutuhan terhadap Tempat Pelelangan Ikan. Dalam penelitian, pendekatan tersebut dengan mengidentifikasi persepsi *stakeholder* yang terkait mengenai kebutuhan Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang.

Adapun analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis skoring yang sebelumnya telah ditentukan kriteria-kriteria dalam pemberian skornya. Dengan pemberian nilai skor tersebut diharapkan dapat ditentukan arahan lokasi yang terbaik untuk dijadikan Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang.



GAMBAR 1.3
KERANGKA PEMIKIRAN

Sumber: Hasil Analisis, 2006

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penulisan Tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran dan manfaat penelitian, ruang lingkup substansi dan spasial, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II : ARAHAN LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan sistesis teori yang terkait.

BAB III : KARAKTERISTIK WILAYAH DAN KELAUTAN KOTA TANJUNGPINANG

Bab ini menguraikan tentang kondisi Kota Tanjungpinang secara umum yang melingkupi potensi sumberdaya kelautan yang dimiliki.

BAB IV : ARAHAN LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN KOTA TANJUNGPINANG

bab ini berisi mengenai identifikasi permasalahan bidang perikanan dan kebutuhan tempat pelelangan ikan berdasar persepsi *stakeholder* terkait, analisis terhadap wilayah studi yang terdiri dari identifikasi kriteria-kriteria dalam penentuan lokasi tempat pelelangan ikan tanjungpinang, analisis kondisi alternatif lokasi tempat pelelangan ikan, analisis penentuan lokasi tempat pelelangan ikan, dan arahan lokasi tempat pelelangan ikan kota tanjungpinang yang terpilih.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan kajian yang dilakukan dalam laporan ini beserta rekomendasi penelitian.

BAB II

ARAHAN LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN

2.1 Teori Lokasi

Teori lokasi ini terdiri dari berbagai teori, yaitu Teori Von Thunen, Teori Tempat Pusat (*Central Place*), Alfred Weber, Lord Palander, August Losch dan berbagai teori lain. Namun dengan melihat karakteristik Kota Tanjungpinang, maka teori yang tepat digunakan untuk penentuan lokasi ini adalah Teori Christaller. Adapun karakteristik Kota Tanjungpinang tersebut, adalah:

1. Wilayah perairan Kota Tanjungpinang bersifat homogen.
2. Aksesibilitas dari dan ke Kota Tanjungpinang cukup bagus, baik dari dalam Pulau Bintan maupun dari luar negeri.
3. Pada umumnya, konsumen hasil tangkapan sumberdaya perikanan ini tersebar merata di seluruh wilayah.
4. Selain itu, konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimasi jarak/biaya.

Walter Christaller pada tahun 1933 menulis buku yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul *Central Places in Southern Germany* (diterjemahkan oleh C.W. Basuki pada tahun 1996). Dalam buku ini, Christaller mencoba menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam suatu wilayah. Teori Christaller ini terkenal dengan sebutan Teori Tempat Pusat (*Central Place*).

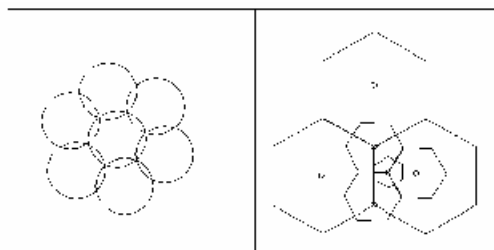
Christaller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri-ciri berikut:

- Wilayahnya adalah dataran tanpa romen, semua adalah datar dan sama.
- Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah (*isotropic surface*).
- Penduduk memiliki daya beli yang sama, dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah.
- Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimasi jarak/biaya.

Dalam pengamatannya, Christaller menyimpulkan bahwa suatu tempat pusat akan terbentuk oleh adanya pengelompokan produksi dan pelayanan barang-barang dan jasa-jasa yang beragam, yang ditujukan untuk melayani permintaan dari populasi yang tersebar di sekitarnya. Ukuran wilayah pelayanan ini dapat berbeda-beda untuk setiap jenis barang atau jasa yang diproduksi, dimana luas wilayah pemasaran ini ditentukan oleh besarnya jarak (radius) dari tempat pusat pelayanan ke batas ambang pemasaran untuk setiap barang dan jasa yang dihasilkan. Suatu pasar dari setiap komoditas memiliki batas jangkauan luas pasar (*range*). Jarak atau radius tersebut merupakan fungsi dari jarak ekonomi yang ditentukan oleh faktor-faktor jarak, dan biaya transportasi maksimum yang masih dapat ditanggung oleh konsumen untuk mendapatkan pelayanan barang atau jasa yang tersedia.

Dalam teorinya, Christaller juga mengemukakan bahwa tingkat kepentingan atau tingkat kepusatan dari suatu tempat pusat sangat bergantung kepada jumlah orde dari barang dan jasa yang disediakan. Oleh karena itu, Christaller mengemukakan bahwa sistem tempat pusat membentuk suatu sistem hirarki yang umum dari tempat-tempat pusat tersebut. Bentuk dari hirarki tempat pusat tersebut berkembang berdasarkan prinsip yang mengatakan bahwa suatu tempat pada level tertentu di dalam hirarki menyediakan barang dan jasa yang tidak hanya dibutuhkan pada level tersebut, tetapi barang atau jasa tersebut juga akan dibutuhkan oleh hirarki pada level yang lebih rendah.

Berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu ruang datar yang sangat luas *threshold* (batas ambang wilayah pelayanan) dari suatu produsen atau suatu pusat pelayanan akan mengatur jumlah dan lokasi dari pusat-pusat penyediaan barang-barang dan jasa. Barang-barang dan jasa yang memiliki orde yang rendah, yaitu barang-barang dan jasa yang memiliki wilayah pemasaran yang relatif sempit akan disediakan oleh sejumlah besar produsen dengan lokasi yang relatif berdekatan. Semakin tinggi orde yang dimiliki oleh suatu barang dan jasa, yang juga berarti bahwa batas wilayah ambang pemasaran yang relatif semakin luas, maka jumlah lokasi penyediaanya pun menjadi semakin sedikit dengan jarak antar lokasi yang semakin jauh.



Sumber: Christaller, 1993

GAMBAR 2.1
PERKEMBANGAN WILAYAH PASARAN HEKSAGONAL DAN
HIERARKI TEMPAT TINGGAL

Hal yang bisa disimpulkan dari teori ini adalah bahwa suatu tempat pusat akan mempunyai pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Pengaruh tersebut akan dipengaruhi oleh biaya transportasi efektifitas, serta *profit* yang maksimum.

Berdasarkan kajian teratur tersebut, maka penelitian ini akan mengacu pada Teori Christaller di dalam memberikan arahan untuk menentukan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terbaik di Kota Tanjungpinang. Hal tersebut disebabkan teori ini lebih sesuai dengan karakteristik Kota Tanjungpinang.

2.2 Pengelolaan Sumberdaya Perairan

Wilayah perairan Indonesia dibagi dalam sembilan wilayah pengembangan yang tingkat pemanfaatannya tidak merata sejalan dengan tingkat kepadatan penduduk dan nelayan di wilayah tersebut yang telah memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berlebih dengan tidak memikirkan tingkat kelestarian sumber. Dalam upaya pemanfaatan potensi sumberdaya ikan dan pengembangan wilayah, maka perlu dibuat sentra-sentra pertumbuhan yang dalam hal ini pelabuhan perikanan guna menunjang perkembangan ekonomi wilayah dalam suatu *masterplan* pengembangan prasarana pelabuhan perikanan yang dapat mengakomodasi pengembangan perikanan di wilayah yang bersangkutan, serta penyesuaian dengan pengembangan sektor-sektor lainnya di masa yang akan datang (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003).

Pada perairan yang mempunyai sumberdaya ikan yang berlimpah dan belum dieksploitasi dengan baik secara historis menciptakan lapangan usaha

perikanan rakyat yang berskala kecil dengan menggunakan kapal tanpa motor, maupun motor tempel yang mampu bergerak sampai perairan 4 mil sepanjang pantai. Pada wilayah tersebut akan terbentuk kampung-kampung nelayan secara tradisional yang melakukan usaha *one day fishing*, yaitu pergi ke laut setiap hari. Hasil tangkapan nelayan didominasi untuk kebutuhan Rumah Tangga Perikanan (RTP) sehari-hari dan sisanya dipasarkan lokal kepada masyarakat setempat.

Pada umumnya para nelayan memanfaatkan kondisi lingkungan alam sebagai tempat berlindung seperti muara-muara sungai, *lagune*, teluk pada musim-musim tertentu sebagai tempat berlindung kapal ikan. Secara alamiah daerah perkampungan nelayan akan tumbuh di sekitar muara sungai yang tidak dipengaruhi gelombang laut. Beberapa lokasi pelabuhan perikanan di pantai tumbuh pada perairan yang dangkal dengan tingkat sedimentasi tinggi. Pola pendekatan yang digunakan pada lokasi seperti ini adalah memandang pelabuhan perikanan sebagai *Community Fishery Development*, yaitu pelabuhan perikanan lebih mengarah pada pembangunan perkampungan nelayan yang menyangkut berbagai aspek sosial, sanitasi lingkungan, sedangkan fasilitas pelabuhan perikanan lebih mengarah pada melakukan pengamanan tempat berlabuh kapal-kapal nelayan yang sangat terpengaruh oleh gangguan kondisi alam serta dukungan terhadap industri pasca panen secara tradisional.

Pada daerah yang sudah berkembang, yang mempunyai daya serap tinggi terhadap jumlah ikan yang didapatkan, perkembangan lebih lanjut pelabuhan perikanan akan tumbuh menjadi tempat pemusatan produksi ikan dari berbagai daerah sekitarnya untuk didistribusikan ke *hinterland* atau interinsuler, dalam

bentuk ikan segar atau ikan olahan. Hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan ini terkumpul dari kapal ikan ataupun pengangkut yang mengumpulkan ikan dari pusat-pusat pendaratan di daerah perkampungan nelayan (*community fishery*). Volume ikan yang didaratkan mencapai skala ekonomis bagi pengembangan usaha perikanan tangkapan dan pengelolaan pasca panen (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003).

Kondisi perdagangan di pelabuhan perikanan menciptakan iklim usaha perdagangan dan pengolahan pasca panen dalam skala yang ekonomis atau dengan kata lain bahwa hasil perikanan yang didaratkan akan didominasi untuk perdagangan skala besar (sebagian kecil dikonsumsi masyarakat setempat sekitar pelabuhan). Kegiatan pelelangan ikan akan lebih tampak, serta transaksi-transaksi dengan volume besar sangat mendominasi kegiatan perdagangan. Karena ikan akan dipasarkan kembali secara regional baik melalui darat maupun laut.

Dalam mengembangkan pelabuhan perikanan perlu diperhatikan indikator-indikator pertumbuhan produksi, pasar dan pasca panen serta RUTRD dan lahan yang cukup guna mewujudkan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003):

- Menciptakan pasar ikan yang besar (volume dan nilai)
- Kawasan industri pasca panen hasil perikanan
- Keterpaduan sistem transportasi. Karena pada pelabuhan perikanan ini akan terjadi pergantian model transportasi (transportasi laut ke transportasi darat), untuk distribusi ke *hinterland* dan *interinsuler*.

2.3 Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan program pengembangan pelabuhan perikanan dilakukan melalui pokok-pokok kegiatan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003) sebagai berikut:

1. Melakukan penataan kembali pelabuhan perikanan yang sudah dibangun dan yang baru secara nasional, regional dalam bentuk *Master Plan* Prasarana Tangkap secara nasional untuk mendukung kerjasama bilateral, internasional dalam memanfaatkan sembilan wilayah pengelolaan perikanan guna menciptakan kawasan andalan yang strategis, produktif, dan cepat tumbuh sebagai sentra produksi dan sentra industri bagi pengembangan ekonomi terpadu.
2. Melengkapi fasilitas di pelabuhan perikanan dalam upaya mendukung pelaksanaan konvensi hukum laut guna pemanfaatan potensi sumberdaya ikan di perairan nusantara, ZEE, dan *High Seas Area*, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan perikanan.
3. Meneliti dan mengkaji ulang seluruh Pelabuhan Perikanan yang sementara ini digolongkan sebagai tingkat operasionalnya sangat rendah, guna memperoleh pertimbangan untuk dilakukan peningkatan operasional dan jika perlu peralihan fungsi atau penghapusan.
4. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam aspek pengembangan kemampuan teknis maupun non-teknis untuk menunjang pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.

5. Meningkatkan operasional dengan rehabilitasi atau renovasi fasilitas pelabuhan, sehingga menjadi Pelabuhan Perikanan yang bersih dan higienis di seluruh pelabuhan perikanan terutama pelabuhan yang melaksanakan ekspor maupun pasar dalam negeri dengan penyediaan air bersih, pabrik es, drainase, instalasi pengolahan air limbah dan sebagainya.
6. Menyiapkan dan membangun Pelabuhan Perikanan baru di kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui KAPET yang telah direncanakan guna mendukung pemanfaatan potensi perikanan di perairan nusantara, serta membangun pusat-pusat pertumbuhan perikanan baru yang berada pada posisi lingkaran luar wilayah Indonesia, guna mendukung pemanfaatan potensi perikanan di *High Seas Area*.

2.4 Tahapan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Pembangunan Pelabuhan Perikanan/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PP/ PPI) merupakan pekerjaan yang kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal, karena meliputi pekerjaan darat dan laut serta menyangkut sosial ekonomi nelayan, sehingga perencanaannya memerlukan pentahapan yang matang. Tahapan yang dilaksanakan dalam pembangunan PP/ PPI adalah melalui *Study, Investigation, Detail Design, Construction, Operation and Maintenance* (SIDCOM). (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003).

2.4.1 Studi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan mengetahui lokasi yang terbaik bagi suatu PP/ PPI dan sejauh mana sesuatu lokasi

dapat dibangun PP/ PPI, berdasarkan parameter makro (ipoleksosbudhankam).

Pada tahap ini dapat diperoleh kebijakan pemerintah, yaitu:

1. Pembangunan PP/ PPI di daerah perbatasan atau terpencil guna menciptakan ekonomi lokal dan pertahanan.
2. Pembangunan PP/ PPI di KAPET dan daerah berkembang (*Growth Center*)
3. Pembangunan PP/ PPI di daerah pesisir yang potensial dan daerah tertinggal untuk pemerataan pembangunan.
4. Pembangunan PP/ PPI untuk cek point kapal asing.
5. Pembangunan PP/ PPI untuk tempat berlindung di daerah *remote*.

2.4.2 Investigasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Tahapan ini dimaksudkan untuk menentukan layak/ tidaknya rencana pembangunan PP/ PPI dari aspek teknis konstruksi, teknis perikanan dan sosial ekonomi. Apabila dianggap layak untuk dibangun PP/ PPI, maka dilanjutkan dengan pembuatan rencana induk (*master plan* yang menggambarkan kapasitas pelayanan terhadap kapal, industri pendukung, dan industri pasca panen) serta rencana *layout* tata ruang PP/ PPI. Parameter mikro di bidang perikanan menjadi fokus penelitian.

2.5 Karakteristik Masyarakat Nelayan

2.5.1 Pengertian Nelayan

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nakhoda kapal ikan bermotor, ahli

mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian (Ensiklopedi Indonesia: 1999).

Merujuk pada definisi tersebut, maka rumah tangga yang kegiatan utamanya bukan menangkap ikan, namun menggunakan ikan sebagai bahan proses produksi yang bukan dikategorikan sebagai rumah tangga nelayan. Sehingga para pedagang ikan sekalipun hidup di tepi pantai juga tidak tergolong kepada kategori nelayan. Nelayan berbeda dengan petani tambak. Perbedaan yang mendasar adalah nelayan memanfaatkan wilayah pesisir sebagai tempat bekerja, sedangkan petani tambak mengelola daerah rawa, sungai, sawah, dan sejenisnya untuk mengelola ikan dan produk perikanan lainnya (Ismail: 2000).

Petani tambak tidak tergantung dengan musim ikan, karena petani tambak yang komersil biasanya mengelola perikanan dengan siklus tertentu. Sedangkan nelayan sangat tergantung dengan cuaca dan musim, walaupun keduanya menghasilkan ikan, namun ikan dari petani tambak biasanya dibudidayakan, dan sangat tergantung pada keberadaan bibit, makanan, perawatan, dan sebagainya. Sedangkan nelayan tidak ikut dalam proses budidaya, kecuali secara alami mereka berupaya untuk menangkap ikan yang sudah terbudidaya dengan sendirinya mengikuti ekosistem kelautan. Gabungan antara nelayan pantai dengan petani tambak lazimnya dikenal dengan Rumah Tangga Perikanan (Masyarakat Perikanan Indonesia: 1996).

Walaupun pendefinisian nelayan telah berkembang sedemikian rupa, tapi Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa orang yang bekerja sebagai nelayan adalah termasuk individu yang bekerja minimal 1 jam pada sektor

perikanan, dan memiliki status pekerjaan baik mereka terikat dengan sistem upah atau tidak. Juru mudi, nakhoda, tukang selam, penebar jaring dan sejenisnya termasuk ke dalam kategori jenis pekerjaan seseorang. Namun demikian, BPS masih terbatas dalam mempublikasikan data khusus tentang nelayan, sehingga perkembangannya serta analisis sulit untuk dilakukan, tidak seperti informasi tentang aspek kependudukan menurut lapangan kerja lainnya.

Dengan sulitnya informasi tersebut, maka penelitian tentang nelayan menjadi cenderung dilakukan dengan survai yang terbatas atau bahkan dilakukan secara studi kasus dengan maksud untuk menjawab penelitian tugas akhir perkuliahan, atau penelitian dari dinas dan instansi pemerintah. Selain itu, juga tidak diketahui secara pasti mengenai berapa banyak jumlah rumah tangga yang bergerak pada sektor perikanan laut ini. Hasil estimasi dari BPS memperlihatkan bahwa pada tahun 1997, dari dua juta rumah tangga perikanan yang ada di Indonesia, sebanyak 443 ribu diantaranya merupakan rumah tangga perikanan laut. Sekitar 117,7 ratus ribu di Sumatera, 90 ribu di pesisir Sumatera.

Jika diasumsikan rumah tangga nelayan memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 6 orang, maka jelaslah jika jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya dari hasil perikanan laut. Pada tahun 1998, di Indonesia terdapat sebanyak 2,6 juta orang (BPS, 1998). Asumsi pertumbuhan penduduk pertahun nelayan rata-rata sebesar 2,3%, maka jumlah penduduk nelayan pada tahun 2000-an adalah sekitar 3 juta orang atau sekitar 1,5% dari jumlah kelompok rumah tangga nelayan miskin (sebesar 70%). Seperti pada hasil-

hasil penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa tidak kurang dari 2,1 juta penduduk nelayan termasuk dalam kategori miskin.

Dari gambaran tersebut, maka jelaslah bahwa perhatian kepada rumah tangga nelayan menuntut suatu penelitian yang komprehensif sebelum menemukan bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaannya.

2.5.2 Nelayan Tradisional Melayu dan Modern

Dalam perkembangannya, nelayan telah terikat dengan dualisme sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan selama ini. Gustav Ranis mendefinisikan bahwa sektor tradisional adalah sektor yang belum tersentuh teknologi. Dalam konteks nelayan, diskusi mengenai masalah ini pernah membedakan antara nelayan tradisional, yaitu mereka yang bergerak di sektor kelautan dengan menggunakan perahu layar tanpa motor bermesin, dengan mereka yang berusaha dengan menggunakan kapal bermesin yang dikatakan sebagai nelayan modern. Jika dilihat dari penggunaan alat mesin/ modern, maka jelas sekali mereka termasuk kategori nelayan modern, namun jika tradisional atau modern dilihat dari sisi penghasilan, maka terjadi kesulitan dalam mendefinisikan hal itu.

Sejarah perkembangan nelayan Indonesia yang menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang nelayan Indonesia akan menjadi suatu kelompok masyarakat yang turun temurun. Pada zaman pemerintahan Belanda, kelompok nelayan di Indonesia memiliki suatu derajat kemajuan yang besar. Pada awal

tahun 1990-an, misalnya nelayan Indonesia memiliki daya beli yang sama dengan nelayan yang berasal dari Jerman dan Denmark (dari Eropa). Dalam hal ini disimpulkan bahwa nelayan di Indonesia merupakan lapisan masyarakat yang mengalami pasang-surut. Kecenderungan dari sisi jumlah meningkat dari tahun ke tahun, namun dari kehidupan sosial ekonomi telah mengalami derajat penurunan dari tahun ke tahun (Mashuri: 1995).

Untuk memahami jawaban mengenai apakah yang melatarbelakangi berkembangnya rumah tangga nelayan, maka telah dibuat dua kemungkinan jawaban, yaitu nelayan yang muncul akibat kegiatan warisan yang turun-temurun alternatif lain adalah nelayan yang tumbuh dengan didasarkan pada pertimbangan ekonomis semata, artinya rumah tangga nelayan bertambah karena adanya tuntutan secara ekonomis dan permintaan akan hasil ikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asri memperlihatkan bahwa pada kalangan nelayan tradisional yang bercirikan berusaha dengan perahu tanpa motor, sekitar 70% dari jawaban responden menyatakan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang mereka kembangkan merupakan suatu kegiatan yang turun temurun. Artinya nelayan tradisional muncul sebagai kelanjutan dari usaha orang tua yang juga memiliki kegiatan utama sebagai nelayan (Asri: 2000).

Perkembangan usaha nelayan terjadi dalam masalah pertimbangan ekonomi, dan bahkan jawaban tersebut semakin jelas dengan semakin besarnya alat mesin yang digunakan untuk penangkapan ikan. Dari temuan tersebut, maka

jelaslah kiranya bahwa terjadinya dualisme pada masyarakat nelayan, yaitu tradisional dan modern. Dapat disimpulkan pula bahwa nelayan tradisional tumbuh tidak lain karena adanya kegiatan yang turun temurun. Sedangkan rumah tangga nelayan “modern” berkembang sedemikian rupa sebagai reaksi dari sumberdaya laut. Dengan kata lain, pertimbangan ekonomi atau komersialisasi jauh lebih berperan dibandingkan dengan pertimbangan karena status sebagai turun-temurun.

2.5.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Nelayan

Permasalahan rumah tangga nelayan yang relatif dekat dengan pusat pelayanan pendidikan masih dihadapkan pada keterbatasan jenjang pendidikan. Dari data historis, memperlihatkan bahwa ditemukan sebanyak 25% dari responden kepala rumah tangga yang tidak pernah sekolah atau tidak menamatkan pendidikan. Tidak hanya kaum pria, pendidikan kaum wanitanya juga relatif rendah, angka putus sekolah pada wanita/ istri responden mencapai 25% dari responden lainnya. Hal ini menandakan bahwa berbagai persoalan permintaan akan pendidikan menjadi bahan temuan pada rumah tangga nelayan daerah sampel. Bila digabungkan mereka yang tidak tamat dengan tamat pendidikan baik kepala rumah tangga maupun istri, maka dapat disimpulkan bahwa sekitar dua pertiga responden hanya mengecap pendidikan tertinggi adalah tamat SD. Untuk sebagian kecil 10% dari responden sudah menamatkan pendidikan SLTA.

Masalah pendidikan orang tua kemudian juga diikuti secara struktural oleh anak-anak keluarga nelayan. Angka partisipasi anak nelayan usia 7-15 tahun

untuk mengecap pendidikan dasar masih berkisar 76% yang masih jauh dari yang diinginkan sebesar 100%, dan pada saat bersamaan pencapaian angka partisipasi sekolah anak-anak di Kota Tanjungpinang sudah mencapai 90% (Elfindri: 2001).

Relatif rendahnya angka partisipasi sekolah ini bukan disebabkan karena tidak tersedianya bangunan SLTP jika mengacu jenjang ini adalah batas untuk *basic universal education*, atau sebagai tempat penampungan tamatan SD. Namun karena persepsi orang tua tentang pendidikan, tidak jelas serta terlibatnya anak-anak dalam kegiatan manajemen ikan mulai dalam proses persiapan penangkapan, kemudian pada proses pendaratan kapal, khususnya pada kapal nelayan tradisional. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa anak-anak terlibat dalam penghelan perahu, serta persiapan pengangkatan bekal yang akan dibawa oleh anak buah kapal untuk berlayar. Kemudian pada saat pendaratan juga secara bersama-sama ikut menarik kembali sebagian lagi, anak-anak yang sudah menamatkan jenjang pendidikan dasar mengikuti proses penangkapan ikan. Fungsi anak-anak usia 13-18 tahun adalah sebagai penyelam untuk memperbaiki posisi alat tangkap dan menggiring ikan untuk masuk perangkap alat tangkap.

Selain proses penangkapan, anak-anak yang membantu proses produksi memperoleh bagi hasil berupa ikan yang dapat mereka jual kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu dalam skala kecil, jatah yang diberikan kepada mereka merupakan penghargaan atas kontribusinya dalam membantu persiapan dan pendaratan kapal. Anak-anak yang sudah terlibat dalam sistem produksi dan perdagangan serta mengecap *cash money* dalam sistem perikanan. Kenyataan ini secara tidak langsung telah mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak-anak

keluarga nelayan. Dari hasil informasi tersebut tidak terdapat perbedaan yang nyata, dari jenjang pendidikan responden atau pendidikan anak-anak responden. Kecenderungan dari selain rendahnya pendidikan anak-anak nelayan juga secara jelas berkorelasi dengan pendidikan orang tua nelayan.

Dari gambaran singkat tersebut, maka jelaslah kiranya bahwa dalam jangka panjang perkembangan rumah tangga nelayan dihadapkan kepada persoalan struktural yang diperlihatkan oleh masalah rendahnya rata-rata tamatan pendidikan anak-anak nelayan. Sementara pendidikan non-formal yang dikecap oleh anak nelayan juga masih terbatas. Dengan demikian, bahwa upaya pengembangan pendidikan di daerah nelayan perlu dilakukan lebih terarah agar kemudian dapat menjamin kelangsungan pendidikan mereka.

2.5.4 Tipologi Rumah Tangga Nelayan

Persoalan rumah tangga nelayan bersifat lebih kompleks jika dibandingkan dengan rumah tangga tani konvensional. Walaupun dalam sensus sektor perikanan merupakan sub-sektor dari pertanian, namun keberadaan rumah tangga nelayan memiliki ciri khusus bila dibandingkan dengan rumah tangga tani. Perbedaan ini sangat penting dikemukakan mengingat berbagai ciri yang muncul dari kedua tipe rumah tangga. *Pertama*, adalah rumah tangga tani dan petani tambak yang mengandalkan tanah yang terbatas sebagai salah satu faktor produksi, sementara rumah tangga nelayan menggunakan “wilayah pesisir” sebagai suatu faktor produksi. *Kedua*, pada rumah tangga tani lahan terbatas penguasaannya, sedangkan laut bagi rumah tangga nelayan adalah tidak terbatas

yang dibatasi oleh batas-batas teritorial administrasi. *Ketiga*, sungguhpun petani dalam proses produksinya terikat dengan musim, di negara-negara tropis seperti Indonesia, selama musim tropis sekalipun sulit untuk menemukan perbedaan antara musim panas dan hujan. Sementara rumah tangga nelayan sarat dengan siklus bulan. Selama 30 hari perbulan sekitar 20 hari diantaranya melaut dan sisanya merupakan kegiatan yang tidak ada gunanya untuk melaut karena bukan musim yang memungkinkan untuk penangkapan ikan (Syahrial: 2000, Mashuri: 2001).

Dari sisi jam kerja, rumah tangga tani memanfaatkan waktu siang, sedangkan rumah tangga nelayan dalam penangkapan pada umumnya pada malam hari, kecuali nelayan yang mengusahakan budidaya ikan laut dan jenis produk lainnya. Dari sisi *input* tenaga kerja, pada rumah tangga tani besar kemungkinan peranan kaum pria dan wanita bersama-sama melakukan proses produksi. Sementara pada rumah tangga perikanan, penangkapan ikan merupakan suatu pekerjaan kaum pria. Selain cara fisik merupakan lapangan pekerjaan yang tinggi resikonya, kaum wanita sulit untuk terlibat dalam penangkapan ikan karena sangat bertentangan dengan waktu pengasuhan anak-anak.

2.6 Arahan Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

2.6.1 Sejarah TPI

Perkembangan TPI ini mengalami perjalanan yang cukup panjang. Sebelum tahun 1957, TPI dikuasai oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan kewenangan penanganan dalam hal pengurusan organisasi nelayan dan pelelangan

ikan laut masih berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintahan daerah tidak berwenang menanganinya. Hal ini menimbulkan pertentangan dan persaingan yang tidak sehat, sehingga pelelangan ikan tidak dapat berkembang dengan baik. Kondisi demikian diperburuk lagi dengan timbulnya tempat-tempat pelelangan ikan laut yang liar. Mengakibatkan harga ikan tidak stabil karena adanya permainan yang dilakukan oleh pembeli/ bakul dengan petugas pelelangan liar, sehingga menyulitkan peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Pada tahun 1957-an, pengembangan TPI sulit untuk dilakukan dan umumnya TPI masih berskala kecil. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah masih bersifat kedaerahan sehingga sulit dilakukan pengembangan TPI ke daerah lain. Kemudian pada tahun 1962, kewenangan pemerintah pusat di bidang perikanan laut diserahkan kepada pemerintah daerah (pemerintah swatantra tingkat I) termasuk di dalamnya urusan mengenai penanganan penjualan/ pelelangan ikan laut. Kondisi ini mendapat sambutan yang cukup positif dari masyarakat dan para pihak yang berkepentingan terhadap pelelangan ikan. Positifnya sambutan tersebut disebabkan tidak adanya peningkatan terhadap kesejahteraan nelayan selama ini.

Pada tahun 1984, dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban Tempat Pelelangan Ikan guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan serta peningkatan pendapatan daerah, maka umumnya pemerintah daerah di berbagai tempat di Indonesia mulai mengambil tindakan tegas tentang pengaturan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) melalui berbagai penetapan peraturan

daerah. Namun pada saat ini, walaupun telah tersedia TPI, tak sedikit nelayan yang tetap menjual hasil tangkapan pada tengkulak atau pedagang ikan dengan berbagai alasan. Alasan yang sering muncul, pengelolaan TPI kurang profesional dan belum sepenuhnya memihak upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan suatu wadah yang menampung (*collector*) dan menyalurkan (*distributor*) produk perikanan dan kelautan suatu wilayah. TPI ini disediakan dengan tujuan agar hasil tangkapan/ produk laut lain nelayan tidak dijual kepada para tengkulak. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan pelayanan prima antara lain adalah:

1. Menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha sehingga dapat menekan biaya operasional nelayan maupun para konsumen. Dengan demikian diharapkan TPI ini dapat menjadi pendukung pusat pengembangan ekonomi berbasis perikanan tangkap di daerah
2. Dengan tersedianya tenaga yang handal dan profesional serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, diharapkan TPI dapat menjadi *agent of development* bagi usaha perikanan
3. Diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi daerah sekitar (*Backwash Effects* dan *Spread Effect* yang serasi). Hal ini menuntut kelengkapan fasilitas sesuai kebutuhan
4. Dapat menjadi barometer bagi perkembangan perikanan di suatu daerah selain dari pelabuhan perikanan.

Pengembangan dermaga perikanan ini diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian perikanan dan sektor lainnya seperti perdagangan, pariwisata

dan industri penunjang perikanan yang berupa dok kapal, pabrik es, suplai BBM, suplai perbekalan dan alat tangkap. Di bidang ketenagakerjaan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja untuk kegiatan di kapal, bongkar muat ikan, suplai BBM, air, es, dan umpan dan hasil akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dampak positif lainnya dari keberadaan TPI adalah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa negara dari sektor perikanan dan kelautan, serta terkendali dan terawasinya pemanfaatan sumberdaya ikan.

2.6.2 Faktor-Faktor Lokasi Tempat Pelelangan Ikan

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan lokasi menurut Djojodipuro (1992), adalah:

1. Faktor *Endowment*

Faktor ini sebagai faktor produksi, baik secara kuantitatif atau kualitatif yang meliputi tanah tenaga dan modal. Dalam konteks lokasi pengembangan TPI adalah:

- Tersedianya lahan yang memungkinkan dibangunnya sarana dan prasarana TPI. Lahan harus terletak dimuara sungai/ perairan pantai yang dangkal pada perkampungan nelayan dan ada transaksi produksi perikanan secara alamiah/ dipandang potensial untuk aktivitas jual beli hasil tangkapan ikan
- Adanya konsentrasi nelayan yang merupakan tenaga kerja perikanan
- Tersedianya modal berupa peralatan penangkapan ikan, sarana prasarana produksi, transportasi dan lain-lain.

2. Pasar dan Harga

Untuk terciptanya pemanfaatan TPI, maka pada lokasi tersebut harus memiliki pasar bagi hasil tangkapan ikan, yakni ketersediaan pedagang ataupun pengusaha untuk menyerap hasil tangkapan dengan harga bersaing.

3. Bahan Baku dan Energi

Terkait dengan jumlah produksi penangkapan ikan yang diharapkan memenuhi kebutuhan pasar bagi pedagang dan pengusaha serta nelayan berupa tersedianya suku cadang dan perbekalan bagi yang melaut.

4. Aglomerasi

Dapat memberikan kondisi yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas perikanan, sehingga memudahkan usaha dan penghematan *ekstern*. Aglomerasi yang diharapkan adalah aglomerasi sarana dan prasarana serta industri pengolahan ikan. Namun terjadinya kecenderungan dari perusahaan sejenis dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat menyebabkan eksternalitas negatif. Terjadinya kondisi tersebut perlu campur tangan pemerintah. Disamping mempunyai peranan tersebut, pemerintah yang secara langsung bertindak secara *locator* dari berbagai aktor yang langsung ditangani, contohnya penentuan lokasi berbagai sarana dan prasarana oleh pemerintah biasanya didasarkan pada usaha memaksimalkan pelayanan pada masyarakat (Budi Harsono, 2001: 23).

5. Kebijakan Pemerintah

Terkait dengan usaha memfasilitasi masyarakat nelayan dengan masyarakat usaha bidang perikanan. Adapun bentuk tindakan tersebut adalah melalui

alokasi sarana dan prasarana dan regulasi yang memungkinkan bangkitnya usaha perikanan

6. Kebijakan Pengusaha

Terkait dengan kebijakan dari pengusaha perikanan.

7. Biaya Angkutan

Terkait dengan alokasi TPI, ketersediaan sarana prasarana angkutan sangat berpengaruh pada perkembangan TPI. Dengan ketersediaan sarana dan akses yang baik akan menekan biaya angkutan

2.6.3 Kriteria dan Pertimbangan Lokasi TPI

Dalam penentuan lokasi penempatan fasilitas diperlukan kriteria/ standar, dengan tujuan agar dalam penentuan lokasi diperoleh lokasi yang optimal/ sesuai dengan tujuan peletakan. Adapun kriteria-kriteria, pertimbangan, dan klasifikasi pelabuhan perikanan di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II.1
KRITERIA LOKASI TPI

No	Pertimbangan	Uraian
1.	Sumberdaya perikanan (DKP, 2002)	<ul style="list-style-type: none"> - Perairan yang mempunyai sumberdaya ikan yang belum dieksplorasi dengan indikator <i>social welfare</i> dan <i>safety</i> kapal, yang secara historis dalam kawasan ini menciptakan pola usaha perikanan rakyat skala kelurahan. - Daerah kampung-kampung nelayan secara tradisional yang melakukan usaha <i>one day fishing</i>, yaitu pergi ke laut setiap hari. - Secara alamiah daerah perkampungan nelayan akan tumbuh di sekitar muara sungai yang tidak dipengaruhi oleh gelombang laut - Pada perairan dangkal, daerah teluk/ terlindungi oleh gelombang laut.
2.	Pusat perdagangan ikan dan distribusi hasil (DKP, 2002)	<ul style="list-style-type: none"> - Pada daerah yang sudah berkembang yang punya daya serap terhadap ikan yang didaratkan. - Dalam pengembangan pelabuhan perikanan perlu memperhatikan RUTRD dan lahan.
3.	Kawasan prioritas (DKP, 2002)	Pada daerah prioritas dengan aktivitas perikanan sebagai sektor basis.

lanjutan

No	Pertimbangan	Uraian
4.	Perilaku keruangan konsumen (Hartshorn, 1980)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan lokasi kegiatan dipengaruhi lokasi, daya tarik, dan waktu - Jika ketiga faktor sama, maka yang berperan adalah waktu, dan jika tidak sama maka yang berperan lokasi dan daya tarik.
5.	Preferensi konsumen (Yeates, 1980)	Bagaimana keinginan masyarakat dari segi bentuk, ukuran dan peletakan pusat lokasi.
6.	Kualitas persaingan (Susilowati, 1992)	Untuk identifikasi fasilitas perdagangan yang ada dan evaluasi jangkauan pelayanan.
7.	Faktor <i>endowment</i>	Tersedianya lahan, tenaga dan modal terkait dengan perikanan.
8.	Pasar dan harga	Pasar barang hasil produksi.
9.	Bahan baku dan energi	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi berapa jumlah produksi yang memenuhi kebutuhan - Tersedia suku cadang dan perbekalan.
10.	Aglomerasi	Potensi aglomerasi sarana prasarana serta industri perikanan
11.	Kebijakan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - RTR yang menunjukan zonasi lokasi pembangunan - Alokasi sarana prasarana yang mendukung pembangunan fasilitas - Regulasi
12.	Biaya angkutan	Tersedia sarana transportasi dan akses yang baik akan mengurangi biaya angkutan.

Sumber: PPI Kota Semarang, 2002

TABEL II.2
PERTIMBANGAN LOKASI TPI

No.	Pertimbangan	Uraian
1.	Fleksibilitas lahan	Berupa ketersediaan lahan bagi alokasi TPI dan kemungkinan perluasannya.
2.	Aksesibilitas	Kemudahan mencapai lokasi TPI/ ke lokasi pusat pemasaran tangkapan ikan.
3.	Utilitas	Ketersediaan jaringan prasarana penunjang kegiatan TPI
4.	Peran dan proses kegiatan	Kemudahan operasi dan prasarana kegiatan bongkar muat hasil tangkapan.
5.	Biaya pembangunan	Besar kecilnya biaya dalam pembangunan TPI dan pendukungnya
6.	Citra arsitektur	Citra visual yang dilihat pada lokasi
7.	Kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan	Perairan tenang untuk kapal agar lebih dekat dengan lokasi bongkar muat
8.	Nilai ekonomi	Terkait pengembalian modal/ keuntungan dari muatan kapal
9.	Dampak lingkungan	Akibat dari pantai berupa pencemaran dan pendangkalan pantai

Sumber: Djodipuro, 2004.

TABEL II.3
KLASIFIKASI PELABUHAN PERIKANAN DI INDONESIA

No	Kriteria Pelabuhan Perikanan	PPS	PPN	PPP	PPI	TPI
1.	Daerah operasional kapal ikan yang dilayani	Wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) dan perairan internasional	Perairan ZEEI dan laut teritorial	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, wilayah ZEEI	Perairan pedalaman dan perairan kepulauan	Perairan pedalaman dan perairan kepulauan
2.	Fasilitas tambat/ labuh kapal	>60 GT	30-60 GT	10-30 GT	3-10 GT	3-10 GT
3.	Panjang dermaga dan kedalaman kolam	>300 m dan >3 m	150-300 m dan >3 m	100-150 m dan >2 m	50-100 m dan >2 m	<50 m dan >2 m
4.	Kapasitas menampung kapal	>6000 GT (ekivalen dengan 100 buah kapal berukuran 60 GT)	>2250 GT (ekivalen dengan 75 buah kapal berukuran 30 GT)	>300 GT (ekivalen dengan 30 buah kapal berukuran 10 GT)	>60 GT (ekivalen dengan 20 buah kapal berukuran 3 GT)	Kapal dengan kapasitas kecil (<60 GT)
5.	Volume ikan yang didaratkan	Rata-rata 60 ton/hari	Rata-rata 30 ton/hari	-	-	-
6.	Ekspor ikan	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
7.	Luas lahan	>30 Ha	15-30 Ha	5-15 Ha	2-5 Ha	1-2 Ha
8.	Fasilitas pembinaan mutu hasil perikanan	Ada	Ada/ tidak	Tidak	Tidak	Tidak
9.	Tata ruang (zonasi) pengolahan/ pengembangan industri perikanan	Ada	Ada	Ada	Tidak	Tidak

Sumber: DKP RI, 2004.

2.6.4 Pendekatan Lokasi TPI

1. **Pendekatan meminimalkan harga**, oleh Alfred Weber bahwa penentuan lokasi suatu kegiatan didasarkan atas biaya transportasi terkecil atau meminimalkan biaya transportasi.
2. **Pendekatan lokasi pemasaran**, pendekatan Weber hanya mementingkan *input* saja dan kurang memperhatikan *output*, dengan asumsi bahwa semua produksi dapat diletakkan dimana saja. Menurut Losch, perlu dilihat dari sisi

permintaan dengan mempertimbangkan ukuran optimal pasar, menurutnya bahwa lokasi optimum adalah terjadinya keuntungan maksimal.

3. **Pendekatan memaksimalkan keuntungan**, pendekatan di atas merupakan pendekatan dari sisi *input* dan *output*, Greenhut mencoba memodifikasi, bahwa lokasi optimal adalah tempat yang terdapat keuntungan besar, dimana baik biaya dan penerimaan beragam menurut lokasi (Budi Harsono, 2001: 23-26).

TABEL II.4
PENGELOMPOKAN VARIABEL DAN PENGELOMPOKAN KRITERIA PEMILIHAN LOKASI TPI

No	Sumber Literatur	Variabel	Uraian	Kriteria
1.	- Faktor <i>endowment</i> (Djojodipuro 1992)	Ketersediaan lahan	Tidak terdapat luas TPI yang resmi, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah dengan melihat kondisi luasan TPI di Indonesia. Dari data yang ada (khususnya TPI di Pulau Jawa) diketahui bahwa luasan TPI berkisar 100-3600 m ² , sedangkan untuk standar PPI adalah minimal luas 1 Ha, PPP 5 Ha, PPN 10 Ha, dan PPS 30 Ha.	Kondisi fisik alternatif lokasi TPI
	- Aksesibilitas (Rencana PPI Kota Semarang, 2000)	Aksesibilitas	Aksesibilitas merupakan kemudahan suatu lokasi TPI alternatif untuk dicapai atau diakses dari pusat-pusat kegiatan.	
	- Utilitas (Rencana PPI Kota Semarang, 2000) - Ketersediaan transportasi (Djojodipuro, 1992) - Operasi dan proses kegiatan (Rencana PPI Kota Semarang, 2000)	Prasarana pendukung	Ketersediaan prasarana pendukung pada lokasi alternatif TPI, antara lain: jalan, jaringan air bersih dan jaringan listrik.	
	- Kedalaman pantai (DKP, 2004) - Kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan (Djojodipuro, 2004)	Kondisi perairan	Kondisi hidrooceanografi yang terkait erat dengan TPI meliputi muara sungai, baltimeri (kedalaman permukaan air laut), gelombang, dan pasang surut.	
	Daerah operasional kapal penangkap ikan (DKP, 2004)	Wilayah cakupan penangkapan ikan	Cakupan wilayah perairan yang dapat dicapai oleh nelayan yang melakukan aktivitas di suatu alternatif lokasi TPI	

lanjutan

No	Sumber Literatur	Variabel	Uraian	Kriteria
2.	- Kawasan prioritas (DKP, 2002) - Pusat perdagangan dan distribusi hasil tangkap ikan (DKP, 2002)	Aktivitas perikanan sebagai sektor basis	- Pada daerah prioritas dengan aktivitas perikanan sebagai sektor basis. - Pada daerah yang sudah berkembang yang punya daya serap terhadap ikan yang didaratkan.	Pendukung perkembangan perikanan
	- Aglomerasi (Djojodipuro, 1992) - Adanya konsentrasi nelayan sebagai tenaga kerja (Djojodipuro, 1992)	Keberadaan tenaga kerja di bidang perikanan	Tenaga kerja yang termasuk dalam bidang ini, antara lain: nelayan, buruh tangkap, toke dan lainnya	
	- Keberadaan industri di bidang perikanan (DKP, 2004) - Aglomerasi (Djojodipuro, 1992)	Industri perikanan	Terdapat industri yang terkait dengan bidang perikanan di sekitar alternatif lokasi TPI	
	- Kebijakan pemerintah (Djojodipuro, 1992) - Adanya tata ruang untuk bidang perikanan (DKP, 2004)	Arahan/ kebijakan pemerintah	- Adanya RTR pesisir/ pantai - Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan TPI	
3.	Utilitas (Djojodipuro, 1992)	Teknologi penangkapan	Teknologi penangkapan ikan sangat mempengaruhi volume tangkapan ikan. Jika teknologi semakin modern, maka akan semakin memperbesar volume tangkap ikan.	Teknologi tangkap ikan

Sumber: hasil sintesis, 2006

BAB III

KARAKTERISTIK WILAYAH DAN KELAUTAN KOTA TANJUNGPINANG

3.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang

3.1.1 Letak Geografis

Kota Tanjungpinang merupakan daerah yang sangat strategis yang terletak di Pulau Bintan tepatnya di bagian selatan pulau tersebut dengan menghadap ke arah Barat Daya pada $0^{\circ} 50' 54,62''$ LU dan $104^{\circ} 20' 23,40''$ BT – $104^{\circ} 32' 49,9''$ BT. karena pada saat sekarang ini disamping menjadi pusat Ibukota Kepulauan Riau, juga menjadi tempat persinggahan dari berbagai jalur perhubungan laut yang menghubungkan antar kabupaten di Kepulauan Riau seperti: Batam Tanjung Balai, Batam, Singkep Natuna dan kabupaten-kabupaten lain yang berada di wilayah Kepulauan Riau.

Batas Kota Tanjungpinang dengan wilayah lainnya adalah:

- sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Bintan Timur
- sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Galang (Kodya Batam)
- sebelah timur dibatasi oleh Kecamatan Bintan Timur, dan
- sebelah selatan dibatasi oleh Kecamatan Galang (Kodya Batam).

Luas wilayah Kota Tanjungpinang keseluruhan adalah $239,5 \text{ Km}^2$. Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri atas daratan/pulau dan lautan sehingga dapat dikategorikan menjadi dua kategori wilayah yaitu Tanjungpinang Daratan dan Tanjungpinang Lautan. Yang termasuk sebagai Tanjungpinang Daratan adalah

wilayah kota yang menjadi bagian langsung dari Pulau Bintan, sedangkan Tanjungpinang Lautan meliputi pulau-pulau di luar Pulau Bintan yang masih termasuk dalam wilayah Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang dibagi menjadi 4 kecamatan, 18 kelurahan dengan luas wilayah adalah 239,5 Km², yang antara lain:

TABEL III.1
NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG
DAN LUAS WILAYAHNYA TAHUN 2003

No	Nama Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
I.	Kecamatan Tanjungpinang Barat terdiri dari : 1. Kelurahan Tanjungpinang Barat 2. Kelurahan Kemboja 3. Kelurahan Kampung Baru 4. Kelurahan Bukit Cermin	34,50 11,00 7,00 6,50 10,00
II.	Kecamatan Tanjungpinang Kota terdiri dari : 1. Kelurahan Tanjungpinang Kota 2. Desa Penyengat 3. Desa Kampung Bugis 4. Desa Senggarang	52,50 1,50 4,00 24,00 23,00
III.	Kecamatan Bukit Bestari terdiri dari : 1. Kelurahan Tanjungpinang Timur 2. Kelurahan Tanjung Unggat 3. Kelurahan Tanjungayun Sakti 4. Kelurahan Dompok 5. Kelurahan Sei jang	69,00 7,00 10,50 10,50 30,50 10,50
IV.	Kecamatan Tanjungpinang Timur terdiri dari ; Kelurahan Kampung Bulang Kelurahan Melayu Kota Piring Kelurahan Air Raja Kelurahan Pinang Kencana Kelurahan Batu Sembilan	83,50 11,50 12,00 12,00 15,00 23,00
Total Luas Wilayah Kota Tanjungpinang		239,50

Sumber: Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2003

3.1.2 Kependudukan

Data terakhir dari Kantor Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa jumlah penduduk kota awal tahun 2003 adalah 127.623 jiwa WNI dan 401 WNA. Total jumlah penduduk keseluruhan adalah 128.024 jiwa.

Jumlah penduduk di atas selanjutnya dapat dirinci berdasarkan kecamatan, kelurahan, jenis kelamin, dan kewarganegaraan seperti terlihat pada tabel III.2. Mobilitas sosial penduduk Kota Tanjungpinang berdasarkan data Laporan Tahunan Pemerintah Tanjungpinang Tahun 2003 adalah: datang 502 orang, pindah 301 orang, lahir 218 orang, dan mati sebanyak 42 orang. Berdasarkan pada data ini dapat disimpulkan bahwa penduduk yang datang menempati urutan tertinggi dari mobilitas sosial, melebihi dari jumlah penduduk yang pindah. Tingginya mobilitas sosial penduduk yang datang dan pindah menunjukkan bahwa transportasi di daerah ini cukup lancar.

TABEL III.2
JUMLAH PENDUDUK KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN
KECAMATAN, KELURAHAN, JENIS KELAMIN DAN
KEWARGANEGARAAN TAHUN 2003

No	Kelurahan	WNI		WNA		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Tanjungpinang Barat	8398	7947	9	6	16360
2	Kamboja	6372	6486	123	107	13088
3	Kampung Baru	3939	4039	2	6	7986
4	Bukit Cermin	4476	4540	9	5	9030
5	Melayu Kota Piring	3285	2867	-	-	6152
6	Kampung Bulang	3199	3038	2	2	6241
7	Air Raja	1734	1133	-	-	2867
8	Batu IX	2766	2673	61	66	5566
9	Pinang Kencana	995	915	-	-	1910
10	Tanjungpinang Kota	3116	3116	2	1	6235
11	Kampung Bugis	3433	2158	-	-	5591

lanjutan

No	Kelurahan	WNI		WNA		Jumlah
		L	P	L	P	
12	Senggarang	1818	1781	-	-	3599
13	Penyengat	1047	1125	-	-	2172
14	Tanjungpinang Timur	3863	3621	-	-	7484
15	Dompak	906	647	-	-	1553
16	Tanjung aum Sakti	3375	3321	-	-	6696
17	Sei Jang	7209	7610	-	-	14819
18	Tanjung Unggat	5696	5179	-	-	10875
	Total	65627	62196	208	193	128224

Sumber: Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun, 2003

3.1.3 Pendidikan

Pendidikan di Kota Tanjungpinang merupakan titik sentral dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Melalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi menjadikan masyarakat mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan mengatur kehidupannya secara layak dan baik.

Dari fasilitas pendidikan yang ada di Kota Tanjungpinang, untuk Taman Kanak-kanak pada tahun 2001/2002 telah mencapai 40 unit. Dibanding dengan tahun sebelumnya sebanyak 33 unit, dengan peningkatan kurang lebih 21,21%. Sedangkan jumlah Sekolah Dasar Negeri telah mencapai 250 unit, sementara Sekolah Dasar Swasta hanya sebanyak 6 unit.

Jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Sekolah Dasar. Jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama pada tahun 2001/2002 adalah 37 unit. Jumlah ini telah menurun sebesar 7,5% dibanding dengan tahun 2000/2001 atau berkurang dari 40 unit menjadi 36 unit. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Atas, antara sekolah negeri dan swasta

hampir sama, yaitu sebanyak 13 unit sekolah negeri dan 10 unit sekolah swasta atau mengalami peningkatan sebanyak 3 unit sekolah swasta.

3.1.4 Sistem Perekonomian

Mata pencaharian anggota masyarakat Tanjungpinang sangat bervariasi dan kompleks. Namun demikian, jenis lapangan usaha yang digeluti oleh sebagian besar warganya adalah pertanian (38,08%). Ini artinya bahwa sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan atau dekat dengan pantai. Pertanian yang dimaksud meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hasilnya, kehutanan dan perikanan. Jadi tidak hanya berkebun semata, melainkan juga sebagai nelayan.

Tumbuh dan berkembangnya perekonomian Kota Tanjungpinang dan Bintan pada umumnya tidak lepas dari letak yang dekat dengan Selat Malaka; suatu selat yang dilayari oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Singapura yang menjadi tempat bongkar dan muat barang dari berbagai penjuru dunia tadi, dengan demikian mempunyai peranan yang sangat berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kota Tanjungpinang.

Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa masyarakat Tanjungpinang di dalam berkehidupan ekonomi sebagian besar masih mengacu kepada sikap mental kebudayaan agraris dan bukan kebudayaan industri; terlebih para nelayannya mereka masih berpandangan bahwa masa lalu, kini, dan yang akan datang adalah sama. Hal ini tercermin dari sikap dan tingkah laku mereka yang cenderung menghabiskan apa yang diperoleh hari ini, dengan perkataan lain, gaya hidup mereka cenderung konsumtif.

Sub-sektor perikanan termasuk dalam sektor pertanian yang mempunyai potensi dan memberikan sumbangan lebih menonjol dibandingkan dengan sub-sektor lainnya baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam hasil produksi. Kuantitas dan nilai produksi perikanan dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup berarti dan di masa mendatang, sesuai dengan potensi perairan laut yang masih dapat terus ditingkatkan. Produksi perikanan Kepulauan Riau pada tahun 1998 mencapai 23.265,1 ton dengan nilai sebesar Rp 128.217.974. Produksi perikanan terbesar, yaitu mencapai 5.206,5 ton dihasilkan dari perairan Bintan Timur, kemudian disusul dari Kecamatan Senayang yang mencapai 5.187,5 ton. Sedangkan kecamatan dengan produksi perikanan terendah adalah Kecamatan Tanjungpinang Barat, yaitu hanya 694,7 ton dan ini tentu sesuai pula dengan wilayah lautnya yang tidak begitu luas. Selain Kecamatan Tanjungpinang Barat, kecamatan lain yang memproduksi diatas 1.000 ton, bahkan ada yang memproduksi diatas 3.000 ton, yaitu Kecamatan Singkep dan Tambelan yang masing-masing 3.454,3 ton dan 3.383,3 ton.

3.1.5 Sosial Budaya

Struktur masyarakat dan kebudayaan Melayu melonggar dan terbuka. Kelonggaran dan keterbukaan masyarakat serta kebudayaan Melayu itu disebabkan karena dalam tradisi terwujudnya kebudayaan Melayu terbiasa dengan kontak-kontak dengan dunia luar, proses pembauran, dan akulturasi unsur-unsur kebudayaan sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah mereka. Keterbukaan struktur kebudayaan Melayu memungkinkan untuk mengakomodasi perubahan-

perubahan kebudayaan yang berbeda-beda, sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama (Islam), adat-istiadat, dan sopan santun Melayu.

3.1.6 Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Lapangan Kerja

Tanjungpinang terus berkembang sejalan dengan perkembangan yang berlangsung di Pulau Batam, terutama sejak *Agreement* kerjasama SIJORI tersebut ditandatangani. *Agreement* ini dilakukan pada tahun 1990, negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990, telah melahirkan suatu kebijakan untuk mengembangkan kawasan Riau Kepulauan bersama-sama dengan negara Singapura dan Malaysia. Pada akhirnya guna mendukung pembangunan di wilayah Riau Kepulauan, pada tahun 1992 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 memberikan peluang yang lebih kepada wilayah kerja Badan Otorita Batam kepada Pulau Galang, Rempang dan sekitarnya yang selanjutnya dikenal dengan nama Bareleng.

Adanya konsep segitiga pertumbuhan ekonomi (*Growth Triangle*) sejak kesepakatan tiga negara yang dikukuhkan (Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yang bertujuan untuk melakukan kegiatan kerjasama ekonomi. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dirantau ini, maka segitiga yang semula hanya direncanakan di Pulau Bintan kini telah meluas dan telah menjangkau wilayah pulau-pulau lainnya di Kabupaten Kepulauan Riau.

Dari pihak negara Indonesia, dukungan utama kepada kerjasama ekonomi ini (Riau), Singapura dan Malaysia (Johor), dimulai pada tahun 1990. Pada hakikatnya Indonesia mulai melakukan perubahan strategi pembangunan ekonominya dan menempuh strategi *pro-growth*. Tujuan dari arti program seperti

itu untuk memperkenalkan kepada investor internasional, khususnya dalam pengembangan industri dan teknologi serta mempercepat ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN. Dalam pada itu, untuk meluaskan kegiatan kerjasama yang berkelanjutan, SIJORI kemudian diubah menjadi IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapore-*Growth Triangle*) dengan sasaran utama kepada pembangunan industri dan pariwisata.

Seiring dengan itu, kegiatan *entertainment* semakin berkembang dan semakin semarak serta dengan cepat menempatkan Tanjungpinang menjadi satu diantara daerah tujuan wisata. Dampaknya ialah jumlah penduduk Pulau Bintan secara absolut terus meningkat, bahkan di Kecamatan Bintan Utara tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata selama tahun 1990 hingga 1996 mencapai 3.4%. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan tiga kecamatan lain yang ada di Pulau Bintan pada waktu itu.

Di dalam perkembangan IMS-GT ditemukan juga pembangunan kawasan pariwisata yang bertaraf internasional di Bintan (Lagoi). Ini menempatkan sebagian dari belahan Pulau Bintan menjadi kawasan khusus di tengah-tengah masyarakat Melayu setempat. Wisatawan dari berbagai negara khususnya Singapura semakin mengenal Bintan dengan kawasan alami di Lagoi. Hal ini menyebabkan Pulau Bintan menjadi tempat tujuan migrasi, serta tempat untuk mencari lowongan pekerjaan. Sehingga jadilah kawasan ini sebagai tempat perburuan ekonomi dari semua daerah di Indonesia.

3.1.7 Transportasi

Lancarnya arus transportasi baik laut maupun darat menyebabkan daerah Riau Kepulauan menjadi incaran para calon migran. Hal ini berimplikasi pada tingkat urbanisasi yang terus berlanjut dengan konsentrasi permukiman yang terus berkembang, dan akibatnya tingkat kepadatan penduduk pun terus semakin meningkat. Hal ini mulai dirasakan khususnya di daerah Pulau Bintan yang mengarah ke timur dan utara. Sementara di kawasan Kota Tanjungpinang masalah permukiman kumuh sudah mulai tampak khususnya pada tempat rawa-rawa dan kawasan *mangrove*. Orang-orang Melayu, Bugis dan Jawa yang telah bermukim lebih dari 30 tahun menjual tanah dan rumahnya kepada pihak swasta membangun rumah toko dan perumahan lainnya serta tempat-tempat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi tinggi. Penduduk tempatan membeli tanah di kawasan kampung-kampung yang berdekatan dengan perbatasan Kecamatan Bintan Timur. Secara perlahan lahan etnis Melayu dari lapisan bawah terus bergerak dan semakin merangkak ke daerah pinggiran (*marjinal*).

Di Tanjungpinang atau Bintan umumnya tenaga kerja perempuan maupun laki-laki kebanyakan hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD). Keadaan ini menumbuhkan suatu persoalan utama bagi tenaga kerja setempat. Tidak heran jika berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah untuk menyokong supaya dapat berkiprah di daerahnya sendiri. Selama ini dipahami bahwa kekuasaan ada di tangan investor yang dekat dengan puncak kekuasaan maka isu yang dihembuskan ialah lowongan pekerjaan yang tersedia bagi penduduk setempat terbatas kepada pekerjaan kasar. Orang-orang Melayu tidak

mampu bersanding dengan tenaga kerja pendatang karena kurang minat, tidak memiliki etos kerja serta pemalas (Ali Alatas, 1985; 1988; Rab, 1990 dan Ahmad; 1997). Dalam perkembangannya, Tanjungpinang atau Pulau Bintan terus menjadi ajang perburuan bagi tenaga kerja pendatang.

3.2 Potensi Sumberdaya Perikanan Kota Tanjungpinang

Luas laut Kota Tanjungpinang mencapai 71% dari luas wilayah Kota Tanjungpinang, dengan populasi terbesar penduduk pada umumnya bermukim ditepi pantai (pesisir). Adapun sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kota Tanjungpinang pada umumnya adalah sungai-sungai kecil yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk mencari nafkah sehari-hari. Jadi tidak heranlah bila kebanyakan masyarakat yang ada di pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Jang, Sungai Timun, dan Sungai Ladi.

Secara umum wilayah Kepulauan Riau termasuk Kota Tanjungpinang memiliki beberapa daerah potensial bagi budidaya ikan. Daerah ini juga berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan, sekaligus sebagai tempat transaksi bagi pembelian maupun penjualan hasil tangkapan ikan. Berikut adalah daerah potensial bagi budidaya ikan di Kepulauan Riau.

TABEL III.3
DAERAH POTENSIAL PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN
DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

Kecamatan	Daerah / Perairan	Jenis Ikan	Jenis Kegiatan Budidaya
1. Senayang	Selat Senayang, Rejai, Tajur Biru, Tekoleh, P. Medong, P. Mamut	Kerapu Sunuk, Kerapu Tikus, Ketarap dan Lebam.	Keramba jaring apung, keramba tancap
2. Singkep	Kuala Raya, Bakong, Kota, Teluk Sekana.	Kerapu Sunuk	Tambak, Keramba jaring apung
3. Lingga	Teluk Limbung, Penuba, Pancur, Kelumun, Merawang / Tg. Buton.	Kerapu	Keramba jaring apung.
4. Bintan Timur	P. Mantang, P. Serai, Selat Gin, Dan Numbing, Siulung, Telang, Kelong Dan Mapor, P. Ajap Dan Ngalih, P. Bunut, P. Dendun.	Kerapu Sunuk	Keramba jaring apung
5. T. Pinang Timur / Barat	Selat Dompok, Selat Air Raya, Sei Jang, Kampung Lama Dan Dompok, Kampung Kelam Pagi, P. Los.	Kerapu Sunuk, Kerapu Hitam, Kakap Merah, Dingkis	Keramba jaring apung, Keramba Tancap
6. T. Pinang Kota	Sengarang, Pelantar	Kerapu, Kakap Merah	Keramba jaring apung
7. Teluk Bintan	Pulau Penghujan	Kerapu	Keramba tancap
8. Bintan Utara	-	-	-
9. Tambelan	P. Tembelan, P. Bedua	Kerapu	keramba jaring apung

Sumber: Bappeda Riau dan PKSPL IPB, 2003 : Bappeda Kepri dan PPLH UNRL, 2003

Struktur dasar perairan laut yang terdapat di wilayah Kota Tanjungpinang, umumnya lumpur berpasir dan berkarang dengan kedalaman perairan berkisar 1-6 m (dapat dilihat pada Tabel III.4)

TABEL III.4
KISARAN KEDALAMAN PERAIRAN
DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG

Kecamatan	Kisaran Kedalaman (m)	Jenis Komoditas
Tanjungpinang Kota	1 - 6	Lebam, udang, selikur, kerapu
Tanjungpinang Barat	1 - 6	Lebam, udang, selikur
Bukit Bestari	1 - 7	Lebam, kerapu, Kakap
Tanjungpinang Timur	1 - 7	Lebam, kerapu, Kakap, Selar

Sumber: BIPP Kabupaten Kepri, 2003

Luas areal usaha budidaya air tawar (kolam) tahun 2003 adalah 18.739 Ha dan pada tahun 2004 seluas 14.168 Ha atau berkurang 24,4%. Sedangkan luas areal budidaya laut pada tahun 2003 tercatat 1.267 Ha dan tahun 2004 meningkat menjadi 1.723 Ha.

TABEL III.5
PRODUKSI PERIKANAN MENURUT ASAL PRODUKSI KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2003 (TON)

No	Produksi Perikanan	Jumlah
1.	Laut dan budidaya	2770,10
2.	Perairan umum	-
3.	Tambak	-
4.	Kolam keramba	33,90
Total		2804

Sumber: Bappeda Kepri Tahun 2005

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah produksi perikanan Kota Tanjungpinang yang terbesar berasal dari perikanan laut dan budidaya, yaitu 2770,10 ton dibandingkan kolam keramba yaitu 33,10 ton. Hal tersebut jelas bahwa potensi perikanan dari hasil laut dan budidaya cukup besar. Adapun jumlah produksi perikanan Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan yaitu pada tahun

2000 sebesar 7367,70 ton menjadi 7563,25 ton pada tahun 2001. hal ini menunjukkan bahwa potensi perikanan Kota Tanjungpinang cukup besar.

3.2.1 Potensi Perkembangan Produksi

Total produksi perikanan Kota Tanjungpinang pada tahun 2004 mengalami peningkatan rata-rata 26,6% yakni dari 5.716,003 ton pada tahun 2003 menjadi 8.453,630 ton pada tahun 2004, dengan perkembangan produksi 2.737.627. Peningkatan produksi tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penangkapan Ikan

Kegiatan perikanan tangkap merupakan kegiatan dominan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir/ nelayan di Kota Tanjungpinang, sehingga produksi perikanan Kota Tanjungpinang hampir 98% berasal dari usaha penangkapan ikan.

Pada tahun 2003 tercatat jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) sebanyak 1.318 RTP dan pada tahun 2004 meningkat 0,02% atau bertambah 28 RTP. Namun sampai saat ini pemanfaatan sumber daya perikanan dirasakan masih belum optimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana produksi atau armada perikanan yang digunakan masih didominasi oleh kapal motor bertonase kecil (1-3 GT), dan perahu tanpa motor. Pada tahun 2004 jumlah armada perikanan di kota Tanjungpinang adalah 899 unit dengan rincian kapal motor 536 unit dan perahu tanpa motor 360 unit. Produksi hasil tangkapan pada tahun 2004 mencapai 8.171,640 ton atau meningkat 49,5 %.

b. Budidaya Ikan Air Laut

Budidaya ikan laut (pembesaran ikan) merupakan usaha yang mempunyai prospek yang cukup cerah karena permintaan terhadap ikan hidup dan harga jual yang tinggi, baik dipasaran lokal maupun ekspor (Singapura dan Hongkong) dengan harga jual \$28-\$40. Namun usaha ini dihadapkan pada masalah keterbatasan benih. Karena selama ini benih masih berasal dari hasil tangkapan belum diproduksi sendiri. Lokasi usaha budidaya laut adalah Pulau Los, Tanjung Sebauk, Madong, Tanjung Lanjut, dan Dompok. Jenis ikan yang dibudidayakan di keramba adalah ikan kerapu sunu, ikan kerapu tikus, ikan kerapu macan, kakap, dan ikan merah. Jumlah produksi perikanan yang berasal dari usaha budidaya laut Kota Tanjungpinang, pada tahun 2004 adalah sebanyak 7.105 ton.

c. Budidaya Ikan Air Tawar

Usaha budidaya ikan air tawar (kolam) di Kota Tanjungpinang sudah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, hal ini ditandai dengan banyaknya restoran, rumah makan yang menyajikan masakan yang berasal dari ikan air tawar dan gemarnya masyarakat mengkonsumsi ikan air tawar terutama ikan lele. Lokasi usaha budidaya ikan air tawar di Kota Tanjungpinang berada di Kampung Sidomulyo Kelurahan Batu IX, Sei Carang dan Pinang Kencana. Jenis ikan yang di budidayakan di kolam adalah ikan lele.

d. Pengolahan

Usaha pengolahan hasil perikanan sudah mengalami peningkatan baik dalam jenis maupun jumlahnya diantaranya pengolahan ikan (pembuatan bakso), pengolahan daging kepiting, serta pengolahan ikan beku. Namun yang paling besar usaha pengolahannya adalah pengolahan daging kepiting dan ikan beku yang sudah mencapai taraf ekspor. Sedangkan usaha pengolahan lainnya masih skala rumah tangga.

TABEL III.6
PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN (TON)
DI WILAYAH KOTA TPI TAHUN 2004

No	Produksi	Tahun		Perkembangan produksi	
		2003	2004	Pertambahan	(%)
1.	Penangkapan	5.466.855	8.171.640	2.704.785	49,5
2.	Budidaya laut	144.000	136.895	-7.105	-4,9
3.	Budidaya air tawar	33.000	36.841	3.841	11,6
4.	Pengolahan	72.148	108.254	36.106	50,0
J u m l a h		5.716.003	8.453.630	2.737.627	Rata-rata 26,6

Sumber: Dinas SDA dan PMD, 2004

TABEL III.7
PERKEMBANGAN UNIT PENGOLAHAN
DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG (TON)

No	Jenis Olahan	Tahun		Perkembangan	
		2003	2004	Pertambahan	%
1.	Ikan beku	1	1	-	-
2.	Bakso Ikan	2	1	-1	-50
3.	Dendeng Cumi-cumi	1	1	-	-
4.	Daging Kepiting	3	3	-	-
5.	Ikan Asap	2	1	-1	-50
6.	Beku Filet	-	1	1	50
7.	Teri Kering	-	1	1	50
J u m l a h		9	9	0	0

Sumber: Dinas SDA dan PMD, 2004

Jumlah unit pengolahan pada tahun 2004 tercatat 9 unit, untuk lebih jelasnya unit pengolahan dapat dilihat pada Tabel III.8.

3.2.2 Potensi Perkembangan Pasca Panen dan Pemasaran

a. Pasca Panen

Pembinaan dan pengawasan terhadap produk olahan hasil perikanan di Kota Tanjungpinang untuk konsumsi lokal diarahkan pada pembinaan mutu dan untuk tujuan ekspor dengan melakukan pengawasan dan pengujian mutu produk olahan. Dari total produksi hasil perikanan baru 1,28 % (108,254 ton) penanganannya dilakukan dalam bentuk olahan.

b. Pemasaran Hasil Perikanan

Pemasaran hasil perikanan Kota Tanjungpinang terdiri dari pemasaran lokal, antarpulau, dan ekspor. Pemasaran lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Tanjungpinang, pada tahun 2004 tercatat 8.453,69 ton dengan nilai sebesar Rp 86.626.690.500, selanjutnya pada tahun yang sama pemasaran antar pulau tercatat sebesar 1.818,582 ton dengan nilai Rp 10.175.816.250, sedangkan ekspor hasil perikanan Kota Tanjungpinang tercatat 2.391,690 ton dengan nilai Rp 52.707.303.000. Untuk lebih jelasnya lagi pemasaran hasil perikanan dapat dilihat pada tabel III.8.

TABEL III.8
VOLUME DAN NILAI PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004

No.	Pemasaran	Volume (ton)	Nilai (RP)
1.	Lokal	4.243,358	23.743.571.250,-
2.	Antar Pulau	1.818,582	10.175.816.250,-
3.	Eksport	2.391,690	52.707.303.000,-
J u m l a h		8.453,690	86.626.690.500,-

Sumber: Dinas SDA dan PMD, 2004

c. *Konsumsi Ikan*

Rata-rata konsumsi ikan oleh penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2004 hanya sebesar 24 Kg per kapita per tahun atau 65,75 gram per kapita per hari.

Catatan: perhitungan konsumsi ikan per kapita per tahun dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{[(\text{Produksi} - \text{Eksport} - \text{Antarpulau}) + \text{Import}] \times 0,85}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

3.2.3 Perkembangan Pembinaan Usaha

A *Pengembangan Modal dan Investasi*

Kesempatan usaha bagi perusahaan besar diarahkan untuk dapat melibatkan petani/ nelayan di sekitar kawasan atau lahan yang diusahakan dengan saling menguntungkan melalui pola PIR, Bapak Angkat. Disamping itu, investasi yang telah dilakukan oleh pengusaha, baik yang sudah berjalan maupun yang akan tumbuh tetap menjadi perhatian pembinaan dan pelayanan yang optimal. Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi telah memberikan pinjaman modal untuk petani/ nelayan Kota Tanjungpinang dengan bunga yang sangat rendah (3 % per tahun) sehingga diharapkan petani/ nelayan tersebut mampu berdikari sendiri tanpa harus tergantung pada pemilik modal lagi (tauke).

B *Pembinaan Kelembagaan*

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang sangat penting peranannya dalam membantu dan melancarkan

kegiatan proses produksi sampai ke pemasaran. Sampai saat ini KUD perikanan di Kota Tanjungpinang baru satu unit.

Oleh karena itu pembinaan dan dorongan terhadap KUD senantiasa terus dilakukan agar mampu berperan dalam menangani masalah yang ada.

C Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perikanan

Perusahaan yang bergerak di bidang perikanan mengalami peningkatan baik pengumpul, eksportir maupun pengolah. Untuk lebih jelasnya perkembangan perusahaan yang bergerak dibidang perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III.9
PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PERIKANAN
DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG

No.	Jenis Usaha	Volume	Tahun		Pertumbuhan (%)
			2003	2004	
1.	Pengumpul	Unit	22	30	36,36
2.	Eksportir	Unit	6	6	0
3.	Pengolah	Unit	9	9	0
4.	Budidaya	Unit	4	7	73

Sumber: Dinas SDA dan PMD, 2004

D Perkembangan Pendapatan Petani Nelayan

Salah satu indikasi keberhasilan pembangunan perikanan di Kota Tanjungpinang adalah meningkatnya pendapatan petani nelayan. Dari perhitungan nilai produksi penangkapan dan jumlah RTP Nelayan diperkirakan pendapatan rata-rata nelayan Kota Tanjungpinang pada tahun 2004 sebesar Rp 23.367.539.644/ RTP/ tahun. Sedangkan pendapatan petani ikan budidaya laut dan air tawar masing-masing sebesar Rp 38.266.666/ RTP/ tahun dan Rp 43.974.277/ RTP/ tahun. Pendapatan pengolah hasil perikanan

sebesar Rp 120.282.222/ RTP/ tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III.10
PENDAPATAN KOTOR RTP PETANI NELAYAN KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2004

No.	Jenis Usaha	Jumlah RTP	Nilai Produksi (Rp)	Pendapatan (Rp)
1.	Penangkapan	1.236	28.882.279.000,-	23.367.539.644,-
2.	Budidaya laut	93	3.558.800.000,-	38.266.666,-
3.	BD Air Tawar	9	395.768.500,-	43.974.277,-
4.	Pengolahan	9	1.082.540.000,-	120.282.222,-

Sumber : Dinas SDA, 2004

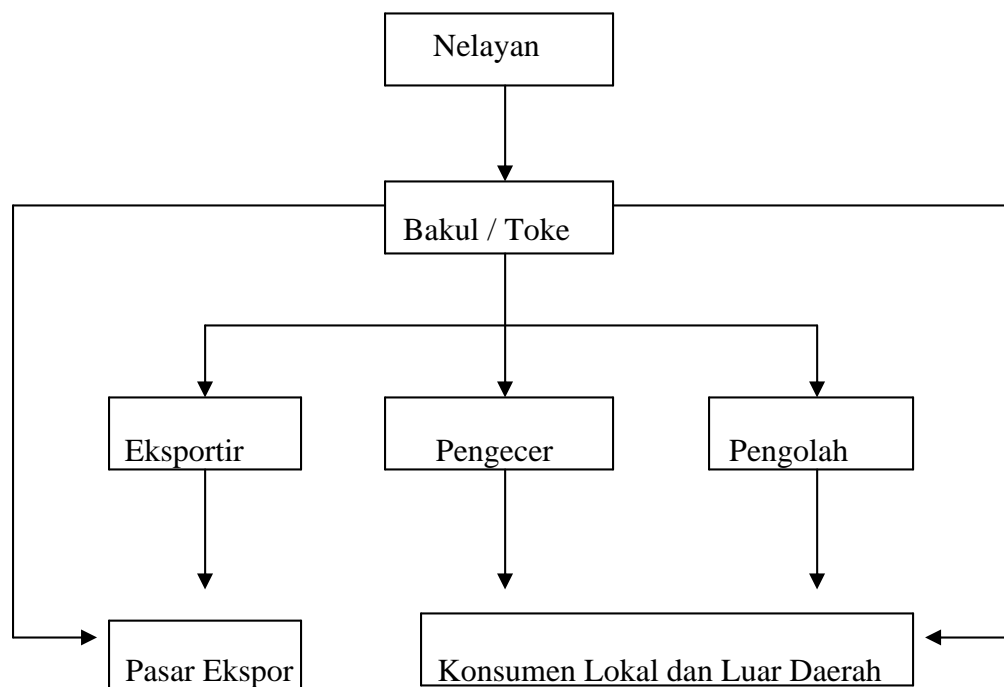
3.3 Pola Koleksi dan Rantai Distribusi Hasil Penangkapan Perikanan di TPI Kota Tanjungpinang

Pasar sangat berperan dalam menyalurkan dan memasarkan hasil perikanan dari pihak produsen ke pihak konsumen. Kegiatan pemasaran produk sangat diperlukan guna meningkatkan kegunaannya (kegunaan tempat, waktu dan kepemilikan). Dalam kegiatan ini melibatkan lembaga-lembaga pemasaran.

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayah Kota Tanjungpinang adalah nelayan, bakul/ toke, pengolah, eksportir, dan pengecer. Toke memiliki peranan yang sangat menentukan dalam kegiatan pemasaran ikan, karena sebagian besar nelayan di wilayah Kota Tanjungpinang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan bakul.

Rantai pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan yang terjadi di wilayah Kota Tanjungpinang adalah:

- a. Nelayan menjual ikan hasil tangkapannya kepada bakul/ toke, selanjutnya toke ini menjual kepada eksportir untuk dijual ke pasar ekspor atau bahkan bagi toke yang memiliki modal besar biasanya langsung mengekspor sendiri ke pasar ekspor, khususnya ke pasaran Singapura. Rantai pemasaran ini terjadi pada pemasaran ikan yang berkualitas ekspor.
- b. Nelayan menjual ikan hasil tangkapannya kepada bakul/ toke, selanjutnya toke ini menjualnya kepada pengolah dan pengecer atau dijual keluar daerah, khususnya ke Jambi. Pengecer ini selanjutnya menjual kepada konsumen di wilayah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya, sedangkan pengolah akan mengolahnya menjadi ikan olahan (ikan asin dan lain-lain). Rantai pemasaran ini terjadi pada pemasaran ikan yang kurang memenuhi standar/ kualitas untuk diekspor.



Sumber: obsevasi dan hasil analisis, 2006

GAMBAR 3.1
RANTAI PEMASARAN HASIL PERIKANAN DI KOTA
TANJUNGPINANG

Hasil tangkapan nelayan sebagian untuk diekspor ke pasar Singapura dalam bentuk ikan segar dan beku, sedangkan sebagian lagi untuk keperluan konsumsi lokal dan luar daerah. Adanya permintaan pasar (ekspor dan lokal) dan potensial *demand* yang tinggi dari penduduk Tanjungpinang dan sekitarnya yang terus meningkatkan peluang bagi usaha penangkapan ikan untuk dapat meningkatkan produksinya. Disamping itu, pemerintah kota juga sedang menggalakkan budaya makan ikan, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.

3.4 Peningkatan Nilai Ekspor Sektor Perikanan

Nilai ekspor yang terjadi dalam sektor perikanan kota Tanjungpinang cukup besar. Tingginya nilai ekspor ini menjadi pendukung bagi perkembangan sektor perekonomian di kota Tanjungpinang. Berikut nilai ekspor sektor perikanan Kota Tanjungpinang.

TABEL III.11
EKSPOR MENURUT PELABUHAN MUAT
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003

No.	Pelabuhan Bongkar	Volume (ton)	(Juta US\$)
1.	Kijang	322012	75612
2.	Tanjungpinang	3884936	2391668
J u m l a h		4206948	2467280

Sumber: BPS, Propinsi Riau Dalam Angka, 2003

Berdasarkan tabel III.11, dapat dilihat bahwa nilai ekspor ikan Kota Tanjungpinang sebesar 4206948 ton dengan nilai jual sebesar 2467280 juta US\$ baik melalui pelabuhan bongkar Kijang maupun Tanjungpinang yaitu masing masing sebesar 32202 ton dan 3884936 ton.

3.5 Lokasi Potensial Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tanjungpinang

Seperti yang telah dijelaskan bahwa untuk mengoptimalkan potensi di bidang perikanan, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang akan membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Berdasarkan RTRW Kota Tanjungpinang (BAPPEDA Kota Tanjungpinang Tahun 2003) terdapat lokasi alternatif pengembangan TPI yaitu Senggarang yang terletak di BWK V, Dompok lama yang terletak di BWK II, dan Pelantar II yang terletak di BWK I. Adapun kondisi umum ketiga TPI di atas adalah sebagai berikut:

A. Wilayah Penangkapan Ikan

Adapun wilayah pelayaran untuk penangkapan ikan di Kepri dan Kota Tanjungpinang secara umum memiliki karakteristik yang sama, yaitu meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, wilayah ZEE. Berbeda dengan Senggarang, Pelantar II dan Dompok memiliki wilayah penangkapan ikan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan seperti Senayang dengan P. Bintan, termasuk juga perairan selat yang ada di Kota Tanjungpinang.

B. Prasarana Pendukung

Pada umumnya prasarana pendukung aktivitas perikanan di ketiga lokasi adalah sama, yaitu memiliki beberapa fasilitas yang cukup lengkap untuk mendukung aktivitas pelelangan ikan seperti jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon dan jaringan air bersih. Secara umum keberadaan prasarana ini cukup baik.

C. Kondisi Perairan

Daerah perairan Selat Singapura-Karimun-Batam termasuk ke dalam lempengan benua perairan dangkal (Paparan) yang disebut Paparan Sunda dengan kedalaman laut relatif dangkal. Terlebih perairan di wilayah Kepulauan Riau ini termasuk perairan dangkal (< 50 m) sehingga pengaruh angin yang relatif kecil hanya menimbulkan gelombang di permukaan laut yang kecil pula.

Kedalaman laut di lokasi pada umumnya di bawah 50 m, termasuk ke dalam perairan laut dangkal. Begitu pula dengan perairan Senggarang, Pelantar II, dan Dompok Lama memiliki kedalaman 1-5 m dan 5 -10 m di sekitar pantai, kedalaman ini tentunya tersebar di seluruh wilayah sekitarnya sesuai dengan karakteristik pantai yang umumnya landai. Kedalaman 5-10 m adalah perairan pedalaman dan perairan antar pulau.

D. Teknologi Penangkapan Ikan

Secara umum, teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan terbagi menjadi dua, yaitu sarana penangkapan berupa kapal bermotor berukuran kecil dengan ukuran 6 GT ke bawah, seperti perahu dengan motor tempel (pompong), dan alat penangkapan ikan seperti pukot pantai, jaring lingkaran, serok, rawai tetap, pancing tonde, pancing ulur, dogol, gilinet, temmel net, jarring insang hanyut, bagan tancap, sero, bubu, bento, muroami dan perangkap lainnya. Penggunaan peralatan ini pada umumnya digunakan oleh para nelayan di Kepulauan Riau begitu pula pada lokasi alternatif yang akan dijadikan TPI yaitu Senggarang, Pelantar II, dan Dompok Lama.

E. Volum Transaksi Jual beli

Secara rinci volume produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL III.12
VOLUME HASIL PERIKANAN
SENGGARANG, PELANTAR II DAN DOMPAK TAHUN 2004

Pemasaran	Senggarang	Pelantar II	Dompok Lama	Jumlah (Ton)
Lokal	865,32	998,67	1253,94	3117,93
Antarpulau	226,3	426,51	623,12	1275,93
Ekspor	321,65	512,32	853,25	1687,22
Jumlah	1413,27	1937,5	2730,31	6081,08

Sumber: Dinas SDA dan PMD, 2004

Berdasarkan tabel III.12 diketahui bahwa jumlah volume hasil perikanan terbesar berasal dari hasil pemasaran lokal, yaitu wilayah Kota Tanjungpinang sebesar 3117,93 ton dengan hasil produksi tertinggi berasal dari Dompok Lama yaitu 1253,94 ton, kemudian diikuti Pelantar II dan Senggarang yaitu masing-masing 998,67 ton dan 865,32 ton. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi untuk pasar lokal cukup tinggi daripada pemasaran antarpulau dan pasar ekspor. Sedangkan volume produksi terbesar berasal dari Dompok Lama yaitu sebesar 2730,31 ton, hal ini menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan di kawasan Dompok Lama cukup tinggi baik untuk pasar lokal, antarpulau maupun ekspor. Dari kondisi tersebut memungkinkan bahwa Dompok Lama dapat dijadikan sebagai pengembangan untuk tempat pelelangan ikan di Kota Tanjungpinang.

F. Proses Koleksi dan Distribusi Pasca Tangkap (Pemasaran)

Secara umum proses pemasaran pasca tangkap ikan di beberapa tempat pendaratan ikan di kota Tanjungpinang adalah sama. Begitu pula untuk

alternatif lokasi Senggarang, Pelantar II dan Dompok Lama, dimana para nelayan menjual hasil tangkapan ikannya kepada toke/ bakul yang didominasi oleh kaum keturunan Cina. Tentunya melalui perantara toke maka harga yang ditawarkan cukup rendah, dengan kondisi demikian para nelayan tidak memiliki pilihan lain selain menjualnya kepada para toke. Kemudian selanjutnya dari bakul/ toke ikan akan disalurkan kepada pihak eksportir, pengecer, dan pengolah. Dimana dalam hal ini para toke akan mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi karena mereka membeli dengan harga yang rendah dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Adanya hal tersebut secara tidak langsung pihak nelayan telah dirugikan. Kemudian dari para eksportir, pengecer, dan pengolah setelah mengalami proses pengolahan kemudian dipasarkan ke pasar ekspor maupun konsumen lokal serta luar daerah. Dari hal tersebut jelas bahwa nelayan cenderung dirugikan karena peran toke yang dominan dalam pemasaran ikan. Bila pemasaran dapat dilakukan oleh nelayan secara langsung kepada pihak pengecer/ ekspor maka nelayan akan mendapatkan keuntungan tanpa melalui perantara toke.

G. Jumlah Nelayan

Berdasarkan RTRW Kepri Tahun 2005, menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga Perikanan Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 tercatat jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) sebanyak 1.318 RTP dan pada tahun 2004 meningkat 0,02% yaitu sebesar 1346 RTP (RTRW Kepri, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perikanan tangkap merupakan kegiatan dominan yang dilakukan oleh

masyarakat pesisir/ nelayan di Kota Tanjungpinang, begitu pula dengan wilayah Senggarang, Pelantar II dan Dompok Lama sehingga produksi perikanan Kota Tanjungpinang hampir 98 % berasal dari usaha penangkapan ikan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun 2003, menunjukkan bahwa jumlah nelayan tertinggi dari tiga alternatif lokasi TPI adalah Dompok Lama yaitu 931 kemudian diikuti oleh Senggarang dan Pelantar II yang masing-masing memiliki jumlah RTP sebesar 445 RTP dan 26 RTP. Dengan demikian bahwa aktivitas perikanan di kawasan dompak ini cukup tinggi dibandingkan kawasan Senggaran dan Pelantar II karena sebgain besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Dompok Lama memiliki aktivitas transaksi jual beli ikan yang cukup tinggi pula. Untuk mendukung aktivitasnya banyak penduduk di kawasan Dompok yang menggunakan perahu dengan motor tempel (pompong) yang digunakan sebagai sarana transportasi masyarakat sekitar untuk beraktifitas melaut.

Berikut adalah kondisi aktivitas perikanan di masing-masing alternatif lokasi tempat pelelangan ikan di Kota Tanjungpinang

A. Pelantar II

o Kondisi Umum

Terletak di Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota. Kawasan ini mempunyai lokasi yang strategis dan mudah untuk diakses. Selain itu, Pelantar II ini telah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung pengadaan TPI. Pelantar II memiliki pola transportasi yang

sangat bagus, mudah untuk diakses baik dari transportasi domestik, nasional maupun regional.

Pelantar II diperuntukkan bagi kawasan permukiman, perdagangan dan jasa dan campuran. Wilayah ini juga berdekatan dengan beberapa pelabuhan dan pasar. Tak jarang kondisi tersebut menyebabkan aktivitas penampungan dan penjualan ikan dapat bercampur dengan aktivitas lainnya. Hal ini akan mempersulit peningkatan produktivitas penjualan ikan.



Sumber: dokumentasi, 2006

GAMBAR 3.2 AKTIVITAS PERIKANAN DAN PERMUKIMAN

○ **Ketersediaan Lahan**

Dilihat dari kondisi eksisting, walaupun tempat ini telah memiliki berbagai fasilitas yang mendukung perikanan, namun hal ini tidak didukung oleh luas areanya. Lokasinya yang sempit menyebabkan Pelantar II belum mampu menampung semua hasil perolehan penangkapan ikan di seluruh wilayah Tanjungpinang. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut tidak hanya digunakan sebagai Tempat Pelelangan Ikan, namun juga sebagai pusat aktivitas perdagangan lainnya, sehingga terkesan sangat kumuh dan tidak teratur.

Dengan lokasi yang kurang memadai itu, segala hasil perikanan dikumpulkan dalam satu gudang ikan yang letaknya di sekitar lokasi tersebut. Hal tersebut tentu menjadi hambatan untuk menampung segala hasil perikanan di Kota Tanjungpinang. Apalagi berdasarkan data produksi usaha penangkapan ikan telah diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah produksi di sektor perikanan semakin bertambah.

○ **Aksesibilitas**

Pelantar II memiliki akses domestik, yaitu dari Pulau Penyengat, Pulau Tujuh, dan Pulau Rempak. Selain itu, Pelantar II juga mudah untuk diakses oleh kapal-kapal dari wilayah lain Pulau Bintan, yakni daerah Kampung Bugis. Akses nasionalnya adalah kapal-kapal yang datang dan pergi ke Kota Batam. Pelantar II juga memiliki akses internasional, yaitu kapal-kapal yang berasal dari negara Singapura dan Malaysia.

Jenis angkutan yang terdapat di kawasan Pelantar II ini bervariasi terutama sarana transportasi laut yang meliputi sampan, perahu motor dan long boat. Jumlah kedatangan kapal di pelabuhan Sri Bintan Pura untuk pelayaran dalam negeri maupun luar negeri mengalami kenaikan selama kurun tahun 1997 sampai dengan 2001 dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 11,83 %.



Sumber: dokumentasi, 2006

GAMBAR 3.3
SARANA TRANSPORTASI LAUT

Berdasarkan peta wilayah studi dapat diketahui bahwa Pelantar II ini mudah dijangkau dari berbagai wilayah. Namun kemudahan aksesibilitas ini tidak hanya diperuntukkan bagi hasil produksi perikanan saja, melainkan juga bagi transportasi manusia dan barang lainnya. Tidak adanya spesialisasi transportasi tersebut menimbulkan tumpang tindih antara angkutan hasil produksi perikanan maupun bagi transportasi lainnya.

B. Kawasan Senggarang

o Kondisi Umum

Pada Kelurahan Senggarang terdapat 4 (empat) perkampungan penduduk yang terletak menyebar dan berjauhan satu sama lain. Perkampungan tersebut adalah sebagai berikut: Kampung Bebek, Kampung Senggarang Besar, Kampung Senggarang Pasar, Kampung Tanjung Sebauk.

Kawasan Senggarang terletak di Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota. Sesuai dengan RTRW Kota Tanjungpinang tahun 2001-2010, Kawasan Senggarang akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang dan berkemungkinan besar juga akan diperuntukkan

menjadi pusat perkantoran bagi Pemerintahan Provinsi, Kepulauan Riau. Sebagian dari kawasan ini merupakan kawasan campuran. Melihat peruntukan kawasan menjadi perkantoran dan campuran tersebut, maka dikhawatirkan kondisi ini akan menjadi kendala dalam pengembangan TPI. Hal ini dikarenakan bercampurnya berbagai aktivitas yang tidak saling mendukung yang akan menyebabkan aktivitas perikanan tidak dapat berjalan lancar.

Distribusi penduduk di kawasan Senggarang berdasarkan mata pencahariannya menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, dimana banyak penduduk di kawasan Senggarang yang mempunyai perahu dengan motor tempel (pompong) yang digunakan sebagai sarana untuk melaut serta sebagai transportasi masyarakat sekitar untuk beraktifitas ke daerah lain seperti ke Tanjungpinang kota. Selain itu di Kelurahan Senggarang tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri.



Sumber: dokumentasi, 2006

GAMBAR 3.4
SARANA DAN ALAT TANGKAP IKAN

○ **Ketersediaan Lahan**

Mengingat kawasan Senggarang akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang maka berimbas akan berkembangnya kawasan perkantoran bagi Pemerintahan Provinsi, Kepulauan Riau. Sedangkan peruntukan lahan yang lainnya merupakan kawasan campuran. Oleh karena itu ketersediaan lahan bagi pengembangan TPI tidak cukup luas yaitu <1 Ha. Untuk perkembangan selanjutnya wilayah ini akan tumbuh berkembang seiring dengan perkantoran serta perdagangan, dan jasa yang berada disekitarnya.

○ **Aksesibilitas**

Penduduk Kelurahan Senggarang rata-rata telah memiliki alat transportasi. Sebagian dari mereka ada yang memiliki alat transportasi darat dan sebagian lagi ada yang memiliki alat transportasi laut, meskipun tidak semua penduduk punya alat transportasi.



Sumber: dokumentasi, 2006

GAMBAR 3.5
KONDISI PANTAI WILAYAH SENGGARANG

Kawasan ini dapat diakses oleh transportasi domestik, yaitu pelabuhan penumpang dan pelabuhan wisata. Namun pada saat ini, lokasi yang diusulkan belum memiliki akses nasional dan internasional. Diharapkan di masa yang akan datang, lokasi yang diusulkan ini akan mudah untuk diakses oleh kapal-kapal dari luar daerah. Jenis angkutan yang ada di Kawasan Senggarang ini juga masih sangat minim, yaitu hanya dilalui oleh angkutan penumpang. Jarak pencapaian dari kawasan ini menuju pelabuhan lain cukup jauh. Pelabuhan terdekat dari lokasi ini adalah pelabuhan penumpang yang terletak di Pelantar II. Sedangkan jarak pencapaian menuju pelabuhan nelayan cukup jauh.

Untuk jaringan transportasi di wilayah ini sebagian besar dilayani oleh ojek, untuk transportasi umum, seperti angkota belum terdapat trayek menuju ke Senggarang. Sedangkan untuk jaringan jalan ke kawasan Senggarang sudah cukup memadai, karena sebagian besar sudah merupakan jalan aspal *hotmix* dengan lebar jalan di atas 15 m. Selain transportasi darat di wilayah Senggarang juga dilayani oleh transportasi laut. Transportasi laut lebih efektif apabila menuju ke Kota Tanjungpinang, karena penduduk hanya menyeberang lewat laut hanya membutuhkan waktu 10-15 menit dibanding dengan menggunakan akses darat yang mencapai sekitar 30 menit. Di wilayah Senggarang juga terdapat dua dermaga rakyat skala lokal, yaitu di Kampung Bugis dan Senggarang.

C. Kawasan Dompok Lama

○ Kondisi Umum

Kawasan Dompok secara administratif meliputi 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Dompok, Kelurahan Sungai Jang dan Tanjung Ayun Sakti yang termasuk dalam Kecamatan Bukit Bestari.

Kawasan Dompok Lama terletak di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari. Berdasarkan RTRW Kota Tanjungpinang tahun 2001-2010, maka kawasan ini akan dikembangkan sebagai kawasan kota baru yang didominasi oleh kegiatan maritim dan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana skala kota.



Sumber: dokumentasi, 2006

GAMBAR 3.6
KONDISI PANTAI WILAYAH Dompok LAMA

Lokasi kawasan ini cukup strategis. Apalagi pelabuhan yang akan dikembangkan sebagai tempat penampungan ikan terpadu ini terletak di Kawasan Dompok, yakni kawasan yang diarahkan menjadi kawasan industri perikanan. Di sisi lain, pada Kawasan Dompok ini terdapat Balai Penelitian Perikanan dan waduk serta beberapa areal zona penangkapan ikan. Hal tersebut akan sangat mendukung pengembangan Tempat Pelelangan Ikan.

○ **Ketersediaan Lahan**

Sesuai dengan arahan RTRW Kota Tanjungpinang tahun 2001-2010 bahwa kawasan ini akan dikembangkan sebagai kawasan kegiatan maritime. Maka penyediaan lokasinya cukup luas yaitu >1 Ha dan membentang sepanjang ± 500 m, serta berbatasan langsung dengan perairan pantai, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai tempat pelelangan ikan dan diharapkan dapat menampung produk perikanan dari berbagai wilayah.

○ **Aksesibilitas**

Pada saat ini, kawasan Dompok Lama hanya memiliki akses domestik saja, yaitu dari Pulau Dompok dan sebagian wilayah Kota Tanjungpinang. Namun jika ditinjau dari kemudahan aksesibilitas, pelabuhan ini cukup mudah untuk dicapai dari dan ke segala wilayah. Pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan maritim dapat mendukung spesialisasi transportasi produk perikanan.



Sumber: dokumentasi, 2006

GAMBAR 3.7
AKTIVITAS TRANSAKSI JUAL BELI IKAN

Kawasan ini juga dekat dengan pelabuhan nelayan. Kedekatan tersebut akan sangat mendukung pengembangan TPI, karena para nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan mudah. Sedangkan untuk jaringan jalan dapat dilewati oleh kendaraan roda dua ataupun empat.

Berikut adalah peta alternatif lokasi yang akan dikembangkan menjadi Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang.

BAB IV

ARAHAN LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN KOTA TANJUNGPINANG

4.1 Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan TPI Kota Tanjungpinang Berdasarkan Persepsi *Stakeholder* Terkait

Seperti yang telah diketahui bahwa Kota Tanjungpinang mempunyai potensi yang sangat besar di bidang perikanan. Tetapi belum terdapatnya TPI, menyebabkan beberapa permasalahan, antara lain:

- pendapatan masyarakat nelayan yang sedikit,
- tidak terkontrolnya harga tangkapan ikan,
- terjadinya persaingan antar lokasi pelelangan yang tidak resmi mendapatkan konsumen
- pemerintah kota tidak dapat menarik retribusi karena aktivitas pelelangan ikan yang tidak resmi.

Pemerintah Kota Tanjungpinang akan membangun TPI Kota Tanjungpinang, sehingga dalam hal ini sudah dipenuhi sisi *supply*, sedangkan dari sisi *demand* juga perlu diperhatikan. Sisi *demand* dalam hal ini adalah kebutuhan akan keberadaan TPI. Dalam penelitian, sisi ini diwakili oleh persepsi *stakeholder* terkait, khususnya dalam bidang perikanan.

4.1.1 Identifikasi *Stakeholder* Yang Terkait

Untuk mengetahui adanya permintaan (kebutuhan) akan adanya Tempat Pelelangan Ikan, maka penelitian ini telah melakukan wawancara dengan beberapa *stakeholder* (pihak) terkait, yaitu:

1. Pihak Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Tanjungpinang

Sebagai pihak yang merencanakan dan mengatur penataan ruang Kota Tanjungpinang.

2. Pihak Pemerintah Kota (Kepala Dinas Sumber Daya Alam)

Sebagai pihak yang berkompeten dalam bidang kelautan dan perikanan untuk wilayah Kota Tanjungpinang.

3. Pihak Nelayan

Sebagai aktor utama dalam hal penangkapan ikan, sehingga dapat mengetahui kondisi, perkembangan, dan permasalahan bidang kelautan dan perikanan.

4. Pihak Pengusaha Bidang Perikanan/ Keluatan

Sebagai pihak yang terlibat dalam bidang perikanan, baik untuk penangkapan, pengadaan peralatan, budidaya, atau transaksi hasil tangkapan ikan.

4.1.2 Permasalahan Bidang Perikanan dan Kebutuhan TPI

Dari hasil wawancara, maka disimpulkan bahwa secara umum permasalahan yang dihadapi adalah masih minimnya sarana dan prasarana pendukung perkembangan perikanan. Untuk ketersediaan prasarana para nelayan yang menjadi kendala adalah mengenai alat tangkap ikan yang sebagian besar masih tradisional, sehingga berpengaruh pada hasil tangkapan ikan. Dengan alat tangkap ikan yang masih sederhana, maka jangkauan penangkapan ikan sebagian besar hanya sampai pada perairan pedalaman dan kepulauan Pulau Bintan. Selain itu juga berpengaruh pada kedalaman laut yang terbatas, jika hanya menggunakan

alat yang sederhana. Terbatasnya alat tangkap ikan juga diakui oleh Dinas Sumber Daya Alam, sehingga jika terdapat metode yang modern dalam penangkapan ikan, maka untuk nelayan di wilayah Kota Tanjungpinang selalu tertinggal dengan nelayan lain, khususnya dari luar negeri.

Untuk lebih jelas mengenai kondisi alat tangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan, maka dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: dokumentasi, 2006

GAMBAR 4.1 ALAT TANGKAP IKAN NELAYAN KOTA TANJUNGPINANG

Sedangkan untuk sarana pendukung aktivitas penangkapan ikan yang paling berpengaruh adalah mengenai keberadaan lokasi pelelangan ikan. Selama ini aktivitas pelelangan ikan Kota Tanjungpinang terjadi dengan alami, di tepi-tepi pantai. Dengan kondisi ini maka pihak yang paling merasakan dampak dari tidak adanya TPI adalah para nelayan. Keberadaan toke (bakul) yang sangat besar dalam transaksi pelelangan ikan dapat mempengaruhi harga ikan di pasaran. Para toke membeli hasil tangkapan ikan dari nelayan dengan harga yang relatif murah. Hal ini dikarenakan posisi toke yang vital, yaitu menjadi penghubung antara nelayan dengan konsumen. Jika tidak ada toke, maka para nelayan tidak dapat menjual ikannya kepada konsumen. Oleh karena itu, para nelayan di Kota

Tangjungpinang mempunyai posisi tawar yang rendah dalam hal transaksi pelelangan ikan. Keberadaan toke juga tidak dapat dihilangkan oleh pihak pemerintah kota karena tidak adanya peraturan yang terkait. Toke tersebut merupakan salah satu mata rantai dalam pelelangan ikan, jika belum terdapat lokasi pelelangan ikan yang resmi dari pihak pemerintah. Dengan penjelasan tersebut, maka keberadaan TPI sangat dibutuhkan oleh para nelayan, khususnya untuk meningkatkan harga ikan di pasaran.

Menurut pihak Bappeko Tanjungpinang, pengadaan lokasi pelelangan ikan masih dalam tahap perencanaan. Hal ini bisa dilihat pada arahan dari produk tata ruang yang mengarahkan alternatif lokasi pada tiga tempat, yaitu Pelantar II, Senggarang, dan Dompok Lama. Sedangkan lamanya waktu pengadaan lokasi pelelangan ikan disebabkan oleh belum terdapatnya kajian atau penelitian yang khusus membahas masalah kesesuaian lokasi TPI. Jika belum terdapat kajian, maka akan sulit untuk menentukan lokasi yang paling ideal bagi TPI. Kajian tersebut tentu saja harus mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu yang dibutuhkan dalam penentuan lokasi TPI. Selain itu, pemerintah tentu saja tidak ingin mengeluarkan anggaran bagi proyek yang belum jelas lokasi penempatannya. Apalagi di perairan Indonseia, banyak lokasi pendaratan atau pelelangan ikan yang tidak berfungsi karena ditinggal oleh para penggunanya. Hal tersebut disebabkan oleh kurang diperhatikannya kriteria penentu lokasi ataupun sisi kebutuhan dari fasilitas tersebut.

Untuk lebih jelas mengenai kondisi, dan permasalahan pengembangan bidang perikanan di Kota Tanjungpinang, maka dapat dilihat pada tabel IV.1

TABEL IV.1
KONDISI DAN KEBUTUHAN BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN
PERSEPSI STAKEHOLDER TERKAIT

No.	Aspek	Stakeholder			
		Bappeko Tanjungpinang	Dinas SDA	Pengusaha/swasta	Ketua Perkumpulan Nelayan
1.	Kondisi perikanan				
a.	Permasalahan	Untuk pengadaan TPI sudah direncanakan dalam RTRW Kota Tanjungpinang, tetapi belum ada kajian ksesuaian lokasi TPI	Perkembangan perikanan terhambat oleh kurangnya alat tangkap ikan yang masih tradisional dan belum adanya lokasi TPI.	Masih kurangnya peran swasta dalam bidang perikanan, diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan insentif dari pemerintah.	Harga ikan di lokasi pelelangan ikan yang ilegal sangat murah. Selain itu, alat tangkap ikan yang sederhana berpengaruh pada volume tangkap ikan.
b.	Kebutuhan/solusi	Diperlukannya kajian tentang kesesuaian lokasi TPI	Diperlukannya pengadaan TPI	Pengadaan industri perikanan dengan membuka peran swasta	Pengadaan TPI dan alat tangkap ikan yang modern dengan harga yang terjangkau.
2.	Adanya kebijakan bidang perikanan	-	Sudah terdapat rencana pengadaan TPI	Arahan dalam pengadaan industri perikanan dan TPI dapat meningkatkan peran swasta dalam bidang perikanan.	Pengadaan lokasi TPI sangat diharapkan untuk meningkatkan harga ikan
3.	Peran dalam aktivitas pelelangan ikan	-	Tidak ada, karena belum terdapat TPI yang resmi dari pemerintah.	Ada yang berperan sebagai pihak pengolah ikan (pengalengan/pengawetan ikan), ataupun sebagai toke.	Sebagai pihak penyedia hasil tangkapan ikan
4.	Kecenderungan peletakan lokasi TPI	Dompok Lama, karena disesuaikan dengan rencana pengadaan industri perikanan	Dompok Lama, karena terdapat rencana pembangunan Balai Penelitian Kelautan dan Perikanan yang dapat mendukung lokasi TPI	Pelantar II, karena keberadaan prasarana seperti jalan, listrik, dan dekat dengan pelabuhan.	Ketiganya merupakan lokasi yang potensial, sehingga tergantung pada hasil penelitian kesesuaian lokasi.

Sumber: hasil wawancara, 2006

Dari tabel di IV.1, maka tidak adanya lokasi TPI yang resmi merupakan permasalahan yang harus diatasi, karena dapat menghambat perkembangan potensi bidang perikanan di Kota Tanjungpinang.

4.1.3 Kecenderungan Peletakan Lokasi TPI

Selain mengkaji arahan peletakan berdasarkan pada literatur yang terkait, maka penelitian ini juga mengidentifikasi persepsi (pandangan) *stakeholder* terkait mengenai kecenderungan peletakan lokasi TPI (dilihat pada lima aspek). Meskipun dari hasil survai primer (wawancara), sebagian besar *stakeholder* berpendapat bahwa tiga alternatif, yaitu Pelantar II, Senggarang, dan Dompok Lama merupakan lokasi yang sesuai untuk pengembangan TPI, tetapi tetap harus terdapat lokasi yang paling sesuai. Sehingga persepsi mengenai kecenderungan lokasi TPI, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.2
PELETAKAN LOKASI TPI KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN
PERSEPSI STAKEHOLDER TERKAIT

No.	Stakeholder	Alternatif Lokasi TPI		
	Variabel	Pelantar II	Senggarang	Dompok Lama
1.	Bappeko Tanjungpinang			
	• Kondisi perairan			✓
	• Akses ke lokasi TPI			✓
	• Prasarana pendukung	✓		
	• Ketersediaan lahan			✓
	• Dukungan tenaga kerja			✓
2.	Dinas SDA			
	• Kondisi perairan			✓
	• Akses ke lokasi TPI			✓
	• Prasarana pendukung	✓		
	• Ketersediaan lahan			✓
	• Dukungan tenaga kerja			✓
3.	Pengusaha			
	• Kondisi perairan	✓		
	• Akses ke lokasi TPI	✓		
	• Prasarana pendukung	✓		

lanjutan

No.	Stakeholder	Alternatif Lokasi TPI		
	Variabel	Pelantar II	Senggarang	Dompak Lama
4.	• Ketersediaan lahan			✓
	• Dukungan tenaga kerja			✓
	Ketua perkumpulan nelayan			
	• Kondisi perairan			✓
	• Akses ke lokasi TPI			✓
	• Prasarana pendukung	✓		
	• Ketersediaan lahan			✓
	• Dukungan tenaga kerja	✓		
	Jumlah	7	0	14

Sumber: hasil wawancara, 2006

Keterangan:

✓ : merupakan lokasi yang paling sesuai berdasar variabel yang dikaji.

Dari tabel IV.2, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi Dompak Lama mendapatkan pilihan yang paling banyak dari para *stakeholder*, dilihat dari lima variabel yang ada.

4.2 Identifikasi Kriteria-Kriteria Dalam Penentuan Lokasi TPI Kota Tanjungpinang

Di dalam penentuan lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), diperlukan beberapa kriteria yang akan dianalisis. Perlunya kriteria ini karena akan menjadi parameter yang akan berpengaruh bagi pengembangan TPI di masa yang akan datang. Kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai arahan lokasi TPI dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kriteria Kondisi Fisik Alternatif Lokasi TPI

Kriteria ini diperlukan karena di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus dimiliki oleh ketiga alternatif lokasi TPI, yaitu Pelantar II, Senggarang, dan Dompak Lama. Persyaratan tersebut antara lain: kondisi perairan, ketersediaan lahan, prasarana pendukung, akses ke lokasi TPI, dan wilayah

pelayanan. Kondisi perairan yang dimaksud adalah pengaruh gelombang air laut terhadap kemudahan kapal-kapal penangkap ikan menuju tempat bongkat muat di pantai. Ketersediaan lahan sangat diperlukan bagi lokasi TPI maupun bagi prasarana pendukungnya. Prasarana pendukung yang dapat berupa jalan, listrik, atau air bersih juga diperlukan bagi pengembangan TPI. Adanya prasarana pendukung, dapat mengurangi biaya pembangunan TPI.

Persyaratan yang keempat adalah akses ke lokasi TPI karena di dalam pengembangan TPI akan sangat dipengaruhi oleh pengembangan transportasi, baik untuk jalur koleksi maupun bagi jalur distribusi potensi perikanan dan kelautan. Tempat penampungan ikan seharusnya memiliki lokasi yang strategis. Kemudahan jangkauan tempat penampungan ikan akan memperluas areal penampungan dan pemasaran dari berbagai wilayah. Kemudahan tersebut juga dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. Di dalam pengembangan TPI, jaringan transportasi yang diperhatikan jangan hanya terpaku pada transportasi domestik saja, melainkan juga pada transportasi skala nasional dan regional. Potensi ini tentunya harus didukung dengan kemudahan aksesibilitas.

Sedangkan variabel yang terakhir adalah adanya wilayah penangkapan ikan dari embrio pelabuhan perikanan, yang dalam hal ini antara lain: perairan internasional, perairan ZEE, laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan. Sedangkan untuk skala pelayanan TPI, minimal mencakup perairan pedalaman atau kepulauan.

b. Kriteria Pendukung Perkembangan Perikanan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini adalah aktivitas/ sektor utama dari embrio TPI, keberadaan tenaga kerja, adanya industri perikanan, dan arahan/ kebijakan pemerintah di bidang perikanan.

Aktivitas penduduk biasanya terkait dengan perkembangan suatu sektor tertentu. Demikian pula dengan wilayah studi yang aktivitas penduduk yang paling banyak adalah perikanan. Tetapi karena perkembangan aktivitas perkotaan, maka terjadi peralihan aktivitas. Seperti yang terjadi pada wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota, dengan aktivitas utamanya adalah pemerintahan dan permukiman. Untuk tenaga kerja dalam aktivitas penangkapan ikan, antara lain nelayan, buruh nelayan/ tangkap, pengumpul hasil tangkapan sampai dengan penjualnya.

Keberadaan industri perikanan, secara langsung juga dapat merangsang perkembangan bidang perikanan, misalnya industri pengolahan hasil tangkap ikan, industri pengawetan atau pengalengan ikan. Adanya campur tangan pemerintah juga dapat mempengaruhi perkembangan suatu sektor.

c. Kriteria Peralatan Tangkap Ikan

Kriteria ini tidak dimasukkan dalam kriteria fisik, karena keberadaan peralatan tangkap ikan secara langsung akan mempengaruhi perkembangan TPI. Jika teknologi tangkap ikan semakin modern, maka akan mempengaruhi hasil tangkapan ikan, sehingga akan memperbesar pemasaran ikan ke konsumen dan berpengaruh pada besarnya hasil pemasaran ikan di TPI. Karena peran dari alat tangkap ikan yang cukup vital ini, maka kriteria ini

perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi TPI. Hal yang harus diperhatikan dalam kriteria ini adalah kondisi sarana dan jenis alat penangkapan ikan.

4.3 Penentuan Nilai Kriteria dan Variabel Penentu Lokasi Tempat Pelelangan Ikan

Dalam menganalisis alternatif lokasi yang akan ditetapkan sebagai pusat TPI, maka dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria dominan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dari tiap kriteria yang ada, maka akan dibagi menjadi beberapa variabel dan tiap kriteria mempunyai nilai bobot yang berbeda. Semakin tinggi nilai bobot kriteria yang dihasilkan, maka akan semakin mendekati kondisi ideal untuk menjadi lokasi terbaik bagi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Bobot akhir dari masing-masing kriteria yang menjadi pertimbangan disusun sesuai dengan jumlah variabelnya. Sebagai misalnya: kriteria fisik alternatif lokasi mempunyai lima variabel, maka bobot kriterianya adalah:

$$(5 / 11) \times 100\% = 500 / 11\%$$

≈ 46% (pembulatan).

TABEL IV.3
BOBOT TIAP KRITERIA PENENTU LOKASI TPI

No.	Kriteria	Jumlah Variabel	Bobot Kriteria (%)
1.	Fisik alternatif lokasi TPI	5	46
2.	Pendukung perkembangan perikanan	4	36
3.	Peralatan tangkap ikan	2	18
	Jumlah	11	100

Sumber: hasil analisis, 2006

Sedangkan untuk penilaian per-variabelnya didasarkan pada kondisi yang sesuai dengan standar atau kondisi yang ideal. Jika sesuai dengan standar yang ada, maka akan mendapat nilai yang tinggi, sedangkan jika tidak sesuai dengan standar maka nilainya rendah. Skala penilaian adalah antara 1 sampai dengan 3, dengan perincian adalah skor 1 untuk kondisi yang tidak memenuhi standar, skor 2 untuk yang kurang memenuhi, dan skor 3 untuk memenuhi standar. Untuk penilaian tiap variabel dapat dilihat pada tabel IV.4

TABEL IV.4
KRITERIA, URAIAN, DAN NILAI VARIABEL PENENTUAN LOKASI TPI

No	Kriteria	Variabel	Uraian	Nilai
1.	Fisik alternatif lokasi TPI	o kondisi perairan untuk operasi kapal	o Perairan dangkal dan pengaruh gelombang laut sehingga kapal mudah mendekat dengan lokasi bongkar muat di lokasi TPI.	1. tidak mudah berlabuh ke pantai 2. mudah berlabuh ke pantai
		o ketersediaan lahan	o Lahan bangunan/ lokasi TPI dan perluasannya	1. lebih sempit (< 3600 m ²) 2. cukup (sampai 1 Ha) 3. luas (>1 Ha)
		o prasarana pendukung	o Prasarana pendukung pengembangan TPI	1. hanya jaringan jalan 2. jaringan jalan, dan listrik 3. jaringan jalan, listrik, air bersih dan lainnya
		o akses dan sarana transportasi	o Kemudahan mencapai lokasi TPI/ pusat pemasaran ikan	1. hanya dapat dilewati kendaraan roda 2 2. dapat dilewati kendaraan roda 2 dan 4 3. ada angkutan umum
		o wilayah penangkapan ikan	o Wilayah tangkap ikan pada alternatif lokasi TPI	1. perairan pedalaman 2. perairan pedalaman dan antarpulau
2.	Pendukung perkembangan perikanan	o aktivitas utama	o Aktivitas perikanan yang merupakan aktivitas utama di sekitar alternatif lokasi TPI	1. bukan aktivitas perikanan 2. aktivitas perikanan
		o tenaga kerja	o Jumlah nelayan dan buruh	1. nelayan tidak ada 2. nelayan sedikit 3. nelayan cukup banyak
		o industri perikanan	o Keberadaan industri perikanan	1. tidak ada 2. ada
		o Arahan/ kebijakan pemerintah	o Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan aktivitas perikanan	1. tidak ada 2. ada
3.	Teknologi penangkapan ikan	o peralatan penangkapan ikan	o Jenis teknologi alat tangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan	1. tradisional 2. semi modern 3. modern
		o sarana penangkapan ikan	o Kondisi sarana tangkap perikanan	1. perahu tanpa motor 2. perahu bermotor 3. perahu bermotor dan kapal

Sumber: hasil analisis, 2006

4.4 Analisis Penentuan Lokasi Tempat Pelelangan Ikan

Setelah mengetahui kriteria, dan variabel yang digunakan dalam penentuan lokasi TPI, maka dapat dilakukan analisis penentuan lokasi TPI. Analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu melakukan identifikasi terhadap kondisi alternatif lokasi TPI, dan melakukan penentuan lokasi TPI. Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi adalah dengan penskoran terhadap kondisi terdapat pada tiga alternatif lokasi TPI, yaitu Pelantar II, Senggarang, dan Dompok Lama.

4.4.1 Analisis Kondisi Alternatif Lokasi TPI

Kondisi alternatif lokasi terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu kondisi fisik, pendukung perkembangan perikanan, dan peralatan tangkap ikan.

4.4.1.1 Kriteria Fisik Alternatif Lokasi TPI

Kriteria ini terbagi dalam lima variabel, sebagai berikut:

a. Kondisi perairan

✓ Pelantar II

Kondisi perairan Kota Tanjungpinang termasuk dalam Pulau Bintan yang merupakan bagian dari Paparan Kontinental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda dan merupakan sisa erosi atau pencetus daerah daratan pra-tercier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Bangka dan Belitung di bagian selatan. Dengan kondisi tersebut, maka Kota Tanjungpinang yang merupakan gugusan pulau memiliki kecepatan angin tidak begitu besar, juga dengan adanya pulau-pulau yang

bertebaran mengakibatkan angin yang bertiup di daerah ini sudah mengalami penurunan, sehingga gelombang yang ditimbulkannya juga relatif kecil. Perbedaan tinggi gelombang dan panjang gelombang nampak terasa pada daerah kepulauan dan yang berhadapan langsung dengan laut lepas, dimana pada daerah kepulauan tidak sebesar di daerah laut lepas. Terlebih perairan di wilayah Kepulauan Riau ini termasuk perairan dangkal (< 50 m) sehingga pengaruh angin yang relatif kecil hanya menimbulkan gelombang di permukaan laut yang kecil pula. Sedangkan untuk pantai yang terdapat di Pelantar II mempunyai kedalaman antara 1-6 m (sumber: BIPP Kabupaten Kepri, 2003). Dengan kedalaman perairan tersebut, maka tentu saja aman bagi aktivitas nelayan yang pada umumnya menggunakan kapal semi-modern (perahu tanpa motor maupun perahu bermotor).

Dengan kenyataan bahwa gelombang laut yang relatif cukup kecil, maka hasil penangkapan ikan di pantai.kapal-kapal nelayan mudah untuk melakukan aktivitas bongkat-muat

✓ Senggarang

Perairan di wilayah ini mempunyai kisaran kedalaman antara 1-6 m (sumber: BIPP Kabupaten Kepri, 2003), sehingga termasuk dalam perairan dangkal. Kondisi ini tentu saja aman bagi aktivitas dan pelabuhan nelayan, karena jenis kapal yang digunakan tidak memerlukan kedalaman yang terlalu dalam.

Sedangkan untuk gelombang laut di perairan wilayah ini hampir sama dengan yang ada di Pelantar II, yaitu relatif kecil. Selain itu, juga didukung

oleh kondisi geografis Senggarang yang berbentuk tanjung. Dengan kondisi tersebut, maka kapal-kapal nelayan mudah untuk berlabuh ke wilayah pantai untuk melakukan aktivitas bongkar muat.

✓ Dompok Lama

Perairan di wilayah Dompok Lama mempunyai kisaran kedalaman antara 1-7 m (sumber: BIPP Kabupaten Kepri, 2003), sehingga termasuk dalam perairan dangkal. Kondisi ini tentu saja termasuk aman bagi aktivitas dan pelabuhan nelayan, karena jenis kapal nelayan yang digunakan tidak memerlukan kedalaman yang lebih. Kondisi gelombang laut di perairan wilayah Dompok Lama termasuk tenang, sehingga kapal-kapal nelayan dapat dengan mudah berlabuh atau mendekat ke wilayah pantai. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dari alternatif lokasi TPI yang berupa teluk, dan di sebelah baratnya terdapat Pulau Dompok, sehingga ombak laut tidak terlalu besar.

TABEL IV.5
KEDALAMAN PERAIRAN PADA ALTERNATIF LOKASI TPI

Kecamatan	Kisaran Kedalaman (m)	Keterangan
Pelantar II	1 – 6	Kedalaman pantai 1-7 m aman untuk alur pelayaran kapal-kapal nelayan dengan ukuran 6 GT ke bawah.
Senggarang	1 - 6	
Dompok Lama	1 – 7	

Sumber: BIPP Kabupaten Kepri, 2003

b. Ketersediaan lahan

✓ Pelantar II

Alternatif lokasi TPI mempunyai lahan yang sempit, yaitu <1 Ha. Hal ini dapat menyebabkan belum mampu menampung semua hasil perolehan penangkapan ikan di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang. Dari kondisi

eksisting, lokasi tersebut tidak hanya digunakan sebagai lokasi bertemunya nelayan dan konsumen (embrio TPI), tetapi juga sebagai pusat aktivitas perdagangan lainnya, sehingga terkesan sangat kumuh dan tidak teratur. Dengan lokasi yang kurang memadai tersebut, segala hasil perikanan dikumpulkan dalam satu gudang ikan yang letaknya di sekitar lokasi tersebut. Hal tersebut tentu menjadi hambatan untuk menampung segala hasil perikanan di Kota Tanjungpinang.

✓ Senggarang

Luas wilayah yang akan digunakan untuk alternatif lokasi TPI tidak terlalu luas, yaitu <1 Ha. Wilayah ini akan dibatasi oleh kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa.

✓ Dompok Lama

Lokasi ini mempunyai luas >1 Ha dan membentang sepanjang ± 500 m, serta berbatasan langsung dengan perairan pantai, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai tempat pelelangan ikan dan diharapkan dapat menampung produk perikanan dari berbagai wilayah.

TABEL IV.6
KONDISI LAHAN ALTERNATIF LOKASI TPI

No.	Lokasi	Penggunaan Lahan Eksisting	Kondisi
1.	Pelantar II	Bercampur dengan aktivitas pelabuhan penumpang dan barang di Pelabuhan Pelantar II	Terkesan kumuh dan tidak teratur karena bercampurnya aktivitas
2.	Senggarang	Wilayah sempit karena harus dibagi dengan guna lahan perkantoran, perdagangan, dan jasa	Lahan kosong dan terbagi dengan guna lahan yang lainnya
3.	Dompok Lama	Lokasi masih luas, kosong, dan memanjang berbatasan dengan pantai	Lahan kosong dan luas.

Sumber: Bappeda Propinsi Kepulauan Riau, 2005



Sumber: dokumentasi, 2006

GAMBAR 4.2
KONDISI LAHAN DI ALTERNATIF LOKASI DOMPAK LAMA

c. Prasarana pendukung

✓ Pelantar II

Lokasi Pelantar II yang berdekatan dengan pelabuhan dan pasar, merupakan nilai tambah bagi alternatif lokasi. Hal ini akan mendukung aktivitas pemasaran hasil tangkapan ikan. Selain itu, keberadaan prasarana pendukung seperti jaringan jalan menuju Pelabuhan Pelantar II, listrik, dan air bersih juga tersedia dengan baik di kawasan ini.

✓ Senggarang

Kawasan Senggarang ini sebagian besar masih merupakan lahan kosong sehingga sarana dan prasarana belum tersedia. Tapi dengan adanya Kantor Pusat Pemerintahan Kota TPI, maka sarana-prasarana akan tersedia namun bukan digunakan untuk kebutuhan pengembangan sektor perikanan. Jaringan jalan di wilayah masih dalam tahap pembangunan, dan direncanakan akan mempunyai jaringan yang cukup luas. Sedangkan untuk jaringan listrik dan air bersih sudah tersedia.

✓ Dompok Lama

Walaupun kawasan ini berdekatan dengan permukiman nelayan, namun kelengkapan sarana dan prasarana masih minim. Fasilitas yang tersedia di kawasan ini hanya jalan dan kawasan parkir yang tidak begitu luas. Di wilayah sudah terdapat jaringan listrik dan air bersih dari air tanah.

TABEL IV.7
PRASARANA PENDUKUNG PENGEMBANGAN TPI

No.	Prasarana	Kondisi di Lokasi Alternatif TPI		
		Pelantar II	Senggarang	Dompok Lama
	<u>Prasarana pokok:</u>			
1.	Jaringan jalan	Jalan menuju lokasi TPI bercampur dengan Pelabuhan Pelantar II	Sebagian besar berupa jalan aspal <i>hotmix</i>	Terdapat jalan aspal, namun terbatas di sekitar lokasi calon TPI
2.	Jaringan listrik	Sudah dilayani listrik	Sudah dilayani listrik	Sudah dilayani listrik
3.	Air bersih	Dari air tanah	Dari air tanah	Dari air tanah
	<u>Prasarana penunjang:</u>			
4.	Drainase	Berupa selokan di samping jalan	Berupa selokan di samping jalan	Berupa selokan di samping jalan
5.	Transportasi	Angkutan kota sudah ada	Angkutan kota belum ada	Angkutan kota belum ada
6.	Telepon	Sebagian besar dilayani telepon	Sudah dilayani telepon	Sudah dilayani telepon

Sumber: Propinsi Kep.Riau dan RTRW Kota Tanjungpinang, 2005

d. Akses ke Lokasi TPI

✓ Pelantar II

Jarak alternatif lokasi pelelangan ikan terhadap tempat berlabuhnya nelayan (pelabuhan nelayan) sangat dekat. Dengan kondisi tersebut, maka para nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan mudah. Selain keberadaan aktivitas pelelangan ikan, di Pelantar II juga terdapat Pelabuhan

Pelantar II yang merupakan pelabuhan penumpang dan barang. Karena adanya pelabuhan tersebut, maka akses menuju alternatif lokasi TPI dapat dilewati oleh kendaraan roda dua ataupun empat dengan baik.



Sumber: dokumentasi, 2006

GAMBAR 4.3
JALAN MENUJU LOKASI PELANTAR II

✓ Senggarang

Jarak pencapaian dari kawasan ini menuju pelabuhan lain cukup jauh. Pelabuhan terdekat dari lokasi ini adalah pelabuhan penumpang yang terletak di Pelantar II. Sedangkan jarak pencapaian menuju pelabuhan nelayan yang merupakan alternatif lokasi TPI Senggarang cukup jauh. Pencapaian ke lokasi TPI dapat dengan menggunakan roda dua ataupun empat, karena luasnya sekitar 10 m.



Sumber: dokumentasi, 2006

GAMBAR 4.4
JALAN MENUJU LOKASI SENGARANG

✓ Dompok Lama

Jarak kawasan ini terhadap pelabuhan nelayan sangat dekat. Kedekatan tersebut akan sangat mendukung pengembangan TPI, karena para nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan mudah. Sedangkan untuk jaringan jalan dapat dilewati oleh kendaraan roda dua ataupun empat.

e. Wilayah Penangkapan Ikan

✓ Pelantar II

Lokasi dari alternatif lokasi Pelantar II yang berdekatan dengan Pelabuhan Pelantar II yang melayani jalur pelayaran internasional. Sedangkan untuk aktivitas penangkapan ikan, maka para nelayan mencapai wilayah perairan ZEE Indonesia, Pulau Batam, Bintan, Kepulauan Riau dan pedalaman Tanjungpinang. Nelayan tersebut menjual hasil tangkapannya di Pelantar II.

✓ Senggarang

Aktivitas penangkapan ikan yang ada juga sudah menjangkau wilayah perairan ZEE Indonesia, Pulau Batam, Bintan, Kepulauan Riau dan pedalaman Tanjungpinang

✓ Dompok Lama

Untuk nelayan yang menjual hasil tangkapannya di Dompok Lama umumnya hanya mencapai wilayah perairan pedalaman dan kepulauan sekitar Kota Tanjungpinang.

Untuk mengetahui jangkauan penangkapan ikan oleh nelayan yang melakukan aktivitas pelelangan ikan di ketiga alternatif lokasi TPI, maka dapat dilihat pada Gambar 4.5.

4.4.1.2 Kriteria Pendukung Perkembangan Perikanan

Kriteria ini terbagi dalam empat variabel, yaitu:

a. Keberadaan aktivitas perikanan

✓ Pelantar II

Perkembangan aktivitas perikanan, yang didalamnya termasuk penangkapan ikan secara langsung dipengaruhi oleh banyak kecilnya jumlah pelaku di bidang tersebut. Dengan jumlah tenaga kerja bidang penangkapan ikan yang sedikit di wilayah Pelantar II, maka perkembangan usaha perikanan relatif kecil setiap tahunnya.

✓ Senggarang

Seperti yang telah dijelaskan bahwa di wilayah ini masih terdapat lahan yang kosong dan belum dihuni oleh penduduk. Arahana guna lahan di wilayah ini sebagian besar adalah untuk perkantoran, dan campuran, maka dapat mengurangi aktivitas perikanan sebagai aktivitas utamanya.

✓ Dompok Lama

Dari kondisi eksisting dapat diketahui bahwa mata pencaharian yang paling banyak di wilayah Kecamatan Bukit Bestari yang merupakan lokasi dari Dompok Lama, adalah sebagai nelayan dan buruh tangkap. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas yang utama adalah sebagai nelayan.



Sumber: dokumentasi, 2006

GAMBAR 4.6
AKTIVITAS PELELANGAN IKAN

b. Tenaga kerja

✓ Pelantar II

Karena lokasi yang berdekatan dengan pusat kota yang merupakan percampuran aktivitas perkantoran, perdagangan-jasa, perkebunan, dan industri, maka akan berpengaruh pada jenis mata pencaharian penduduk. Jumlah tenaga kerja di bidang penangkapan ikan, seperti nelayan, buruh tangkap, dan bakul/ toke, relatif kecil karena didominasi oleh aktivitas perkotaan.

✓ Senggarang

Pada umumnya kawasan ini masih didominasi dengan lahan kosong. Adapun penduduk yang tinggal pada kawasan ini jumlahnya masih sangat sedikit. Mata pencaharian penduduk tersebut bervariasi, diantaranya nelayan, perkebunan, pegawai, dan lain-lain. Melihat kondisi eksisting, Kantor Pemerintahan Kota Tanjungpinang telah dibangun di Senggarang, maka diprediksikan di masa yang akan datang, mata pencaharian penduduk setempat akan didominasi oleh pegawai negeri.

✓ Dompok Lama

Mata pencaharian penduduk di kawasan ini didominasi dengan nelayan. Banyaknya nelayan di kawasan ini disebabkan ikan yang dapat diperoleh dengan mudah di laut maupun Selat Dompok. Selain itu, di kawasan ini juga banyak berkembang budidaya berbagai jenis ikan.

TABEL IV.8
JUMLAH NELAYAN DI TIAP ALTERNATIF LOKASI TPI
TAHUN 2003

No.	Alternatif Lokasi	Jumlah
1.	Senggarang	445
2.	Pelantar II	26
3.	Dompok Lama	931
	Jumlah	1.402

Sumber: Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang, 2003

c. Industri perikanan

✓ Pelantar II

Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mengarahkan wilayah ini untuk aktivitas campuran (permukiman, perdagangan-jasa, dan perkantoran), sesuai dengan perkembangan aktivitas perkotaan di wilayah ini, yang cenderung meninggalkan aktivitas perikanan. Oleh karena itu, tidak terdapat rangsangan dari pemerintah kota (seperti pembangunan industri perikanan, balai penelitian, ataupun pelabuhan perikanan rakyat) yang dapat mempengaruhi perkembangan aktivitas perikanan di wilayah ini.

✓ Senggarang

Sesuai dengan RTRW Kota Tanjungpinang, kawasan Senggarang akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang dan kemungkinan besar juga akan diperuntukkan menjadi pusat perkantoran bagi Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau. Sebagian dari kawasan ini merupakan kawasan campuran. Melihat peruntukan kawasan menjadi perkantoran, dan campuran maka dikhawatirkan kondisi ini akan menjadi kendala dalam pengembangan TPI. Hal tersebut dikarenakan bercampurnya berbagai

aktivitas yang tidak saling mendukung akan menyebabkan aktivitas perikanan tidak dapat berjalan lancar.

✓ Dompok Lama

Lokasi kawasan ini cukup strategis. Apalagi pelabuhan yang akan dikembangkan sebagai tempat penampungan ikan terpadu ini terletak di Kawasan Dompok, yaitu kawasan yang diarahkan menjadi kawasan industri perikanan. Di sisi lain, pada Kawasan Dompok ini terletak Balai Penelitian Perikanan dan waduk, serta beberapa areal zona penangkapan ikan. Hal tersebut akan sangat mendukung pengembangan Tempat Pelelangan Ikan. Untuk mengetahui rencana lokasi industri perikanan, Balai Penelitian, dan waduk dapat dilihat pada Gambar 4.7.

d. Kebijakan pemerintah.

✓ Pelantar II

Tidak adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perkembangan aktivitas perikanan di Pelantar II adalah hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan lokasi TPI di wilayah ini. Karena kecenderungan kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang lebih mengintensifkan perkembangan aktivitas perikanan dan penangkapan ikan di wilayah Kecamatan Bukit Bestari (Dompok Lama).

✓ Senggarang

Dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungpinang tahun 2001-2010, maka sebagian besar wilayah dari Senggarang diarahkan untuk guna lahan perkantoran dan campuran. Meskipun terdapat rencana alternatif

lokasi TPI, arahan aktivitas utama yang bukan perikanan merupakan suatu hambatan bagi perkembangan alternatif lokasi TPI di wilayah ini.

✓ Dompok Lama

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungpinang tahun 2001-2010, maka terdapat arahan yang dapat memacu perkembangan bidang perikanan, yaitu adanya alternatif lokasi TPI, dan lahan khusus bagi industri perikanan rakyat. Untuk mengetahui rencana guna lahan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang berkaitan dengan pengembangan TPI, maka dapat dilihat pada gambar 4.7.

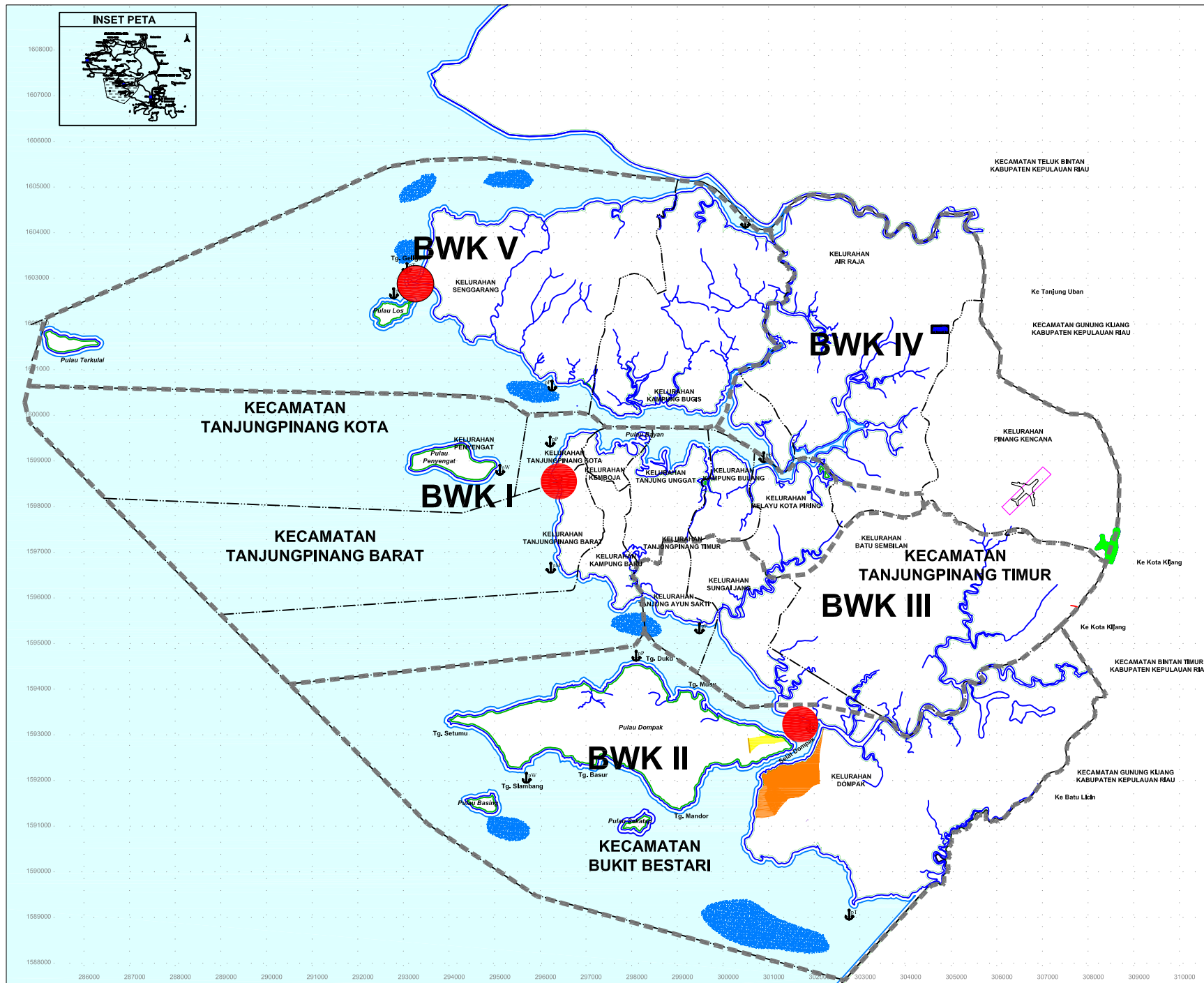
4.4.1.3 Kriteria Teknologi Tangkap Ikan


Dari ketiga alternatif lokasi TPI, yaitu Pelantar II, Senggarang, dan Dompok Lama, maka secara umum nelayan di Kota Tanjungpinang menggunakan kapal bermotor berukuran kecil dengan ukuran 6 GT ke bawah, seperti perahu dengan motor tempel (pompong). Sedangkan untuk alat penangkapan ikan, sebagian besar menggunakan jala dan kapal-kapal pukat. Kondisi ini menyebabkan jumlah tangkapan ikan tidak terlalu banyak dan kurang bersaing dengan kapal-kapal asing dari Singapura ataupun Malaysia.

TABEL IV.9
JENIS DAN JUMLAH ALAT TANGKAP IKAN
DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2000-2002

No.	Jenis	Jumlah			Jenis Teknologi
		2000	2001	2002	
1.	Dogol	2134	431	232	Semi modern
2.	Gilinet	1432	1725	1908	Semi modern
3.	Jaring insang	682	587	1056	Tradisional
4.	Bagan tancap	1786	1657	1635	Tradisional
5.	Pancing	2435	2480	785	Tradisional
6.	Bubu	3704	3215	3819	Tradisional
7.	Pukat pantai	237	268	297	Modern

Sumber: Peta Keragaman Perikanan Tangkap Kep.Riau, 2003























PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2006

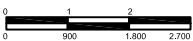

TESIS
ARAHAN LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN
(TPI) KOTA TANJUNGPINANG

PETA

KONDISI EKSISTING DAN RENCANA PENGEMBANGAN
BIDANG PERIKANAN

LEGENDA

 Batas Kabupaten	 Balai Penelitian Perikanan dan Kelautan
 Batas Kecamatan	 Zona Penangkapan Ikan
 Batas Kelurahan	 Rencana Industri Perikanan
 Batas BWK	 Rencana Waduk
 Sungai	
 Alternatif Lokasi TPI	
 Pelabuhan Terpadu	
 Pelabuhan Penumpang	
 Pelabuhan Nelayan	
 Pelabuhan Barang	
 Pelabuhan Wisata	
 Pelabuhan Militer	
 Terminal	
 Bandara	

No. GAMBAR	SKALA
4.7	
UTARA	SUMBER
	<ul style="list-style-type: none">- Peta Dasar Digital Wilayah Perkotaan Kota Tanjungpinang Tahun 2000- Skala 1 : 5000- Peta Administrasi Kelurahan Kota Tanjungpinang, Tahun 2004- BPN Kota Tanjungpinang- Hasil Analisis, 2006

4.4.2 Analisis Penentuan Lokasi TPI Kota Tanjungpinang

Setelah mengetahui kondisi-kondisi di ketiga alternatif lokasi TPI, maka dapat dilakukan penskoran untuk mendapatkan nilai tertinggi. Nilai tertinggi tersebut menggambarkan kondisi ideal dari alternatif lokasi yang akan dipilih.

TABEL IV.10
PERBANDINGAN VARIABEL KRITERIA FISIK

No	Variabel	Pelantar II	Skor	Senggarang	Skor	Dompak Lama	Skor
1.	Kondisi perairan	Kapal mudah bersandar ke pantai	2	Kapal mudah bersandar ke pantai	2	Kapal mudah bersandar ke pantai	2
2.	Ketersediaan lahan	Lahan tidak terlalu luas, yaitu <1 Ha	2	Lahan tidak terlalu luas, yaitu <1 Ha	2	Lahan yang tersedia sangat luas (> 1 Ha)	3
3.	Prasarana pendukung	Tersedia dengan lengkap dan baik	3	Hanya tersedia jaringan listrik, dan air bersih.	1	Terdapat jaringan jalan, listrik, dan air bersih.	3
4.	Akses ke lokasi TPI	Dapat dicapai dengan kendaraan roda 2 dan 4	2	Dapat dicapai dengan kendaraan roda 2 dan 4	2	Dapat dicapai dengan kendaraan roda 2 dan 4	2
5.	Wilayah penangkapan ikan	Perairan ZEE, pedalaman, dan kepulauan.	2	Perairan ZEE, pedalaman, dan kepulauan.	2	Perairan pedalaman dan kepulauan	2
	Total		11		9		12

Sumber: hasil analisis, 2006

TABEL IV.11
PERBANDINGAN VARIABEL PENDUKUNG PERKEMBANGAN PERIKANAN

No	Variabel	Pelantar II	Skor	Senggarang	Skor	Dompak Lama	Skor
1.	Aktivitas perikanan	Aktivitas perikanan yang dominan	2	Masih berupa lahan kosong dengan aktivitas yang paling banyak adalah perkantoran dan campuran.	1	Aktivitas perikanan yang dominan	2
2.	Kebijakan pemerintah	Tidak terdapat kebijakan pemerintah yang merangsang perkembangan usaha perikanan	1	Tidak terdapat kebijakan pemerintah yang merangsang perkembangan usaha perikanan	1	Terdapat arahan lokasi TPI, industri perikanan rakyat, dan prasarana pendukung lainnya dari pemerintah	2

lanjutan

No	Variabel	Pelantar II	Skor	Senggarang	Skor	Dompak Lama	Skor
3.	Tenaga kerja	Jumlah nelayan sedikit	2	Jumlah nelayan sedikit	2	Jumlah nelayan banyak	3
4.	Industri perikanan	Tidak terdapat industri perikanan	1	Tidak terdapat industri perikanan	1	Terdapat industri perikanan	2
	Total		6		5		9

Sumber: hasil analisis, 2006

TABEL IV.12
PERBANDINGAN VARIABEL ALAT TANGKAP IKAN

No	Variabel	Pelantar II	Skor	Senggarang	Skor	Dompak Lama	Skor
1.	Sarana tangkap ikan	Sebagian besar nelayan menggunakan perahu kecil yang bermotor	2	Sebagian besar nelayan menggunakan perahu kecil yang bermotor	2	Sebagian besar nelayan menggunakan perahu kecil yang bermotor	2
2.	Alat tangkap ikan	Alat tangkap ikan dalam kondisi semi modern	2	Alat tangkap ikan dalam kondisi semi modern	2	Alat tangkap ikan dalam kondisi semi modern	2
	Total		4		4		4

Sumber: hasil analisis, 2006

Setelah mengetahui skor masing-masing variabel, maka akan dihitung bobot akhir yang akan menentukan lokasi TPI.

TABEL IV.13
PENILAIAN BOBOT AKHIR DARI KRITERIA PENENTU LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KOTA TANJUNGPINANG

No	Kriteria	Jumlah variabel	Bobot kriteria (%)	Pelantar II		Senggarang		Dompak Lama	
				Total skor	Nilai	Total skor	Nilai	Total skor	Nilai
1.	Fisik	5	46	11	506	9	414	12	552
2.	Dukungan perkembangan perikanan	4	36	6	216	5	180	9	324
3.	Teknologi tangkap ikan	2	18	4	72	4	72	4	72
	Total Nilai		100	21	794	18	666	25	948

Sumber: hasil analisis, 2006

4.5 Arahan Lokasi TPI KotaTanjungpinang Terpilih

Faktor-faktor keunggulan dan keterbatasan suatu alternatif lokasi sangat mempengaruhi keputusan dalam penentuan ataupun arahan suatu lokasi fasilitas. Dalam arahan lokasi Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang, keunggulan dan keterbatasan tersebut diwakili oleh empat kriteria dan variabel-variabel penentu lokasi. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah perilaku konsumen dalam memanfaatkan fasilitas di masa yang akan datang. Dalam lingkup wilayah Kota Tanjungpinang, sebenarnya dari ketiga alternatif lokasi mempunyai keunggulan yang tidak terlalu jauh berbeda. Tetapi dalam hal ini, hanya diperlukan satu lokasi TPI dengan pertimbangan bahwa:

1. kondisi geografis yang sama, pangsa pasar yang sama banyaknya, dan adanya kesamaan teknologi penangkapan ikan dari ketiga alternatif lokasi TPI
2. untuk mengkonsentrasikan lokasi pertemuan, dan transaksi antara pelaku bidang perikanan (nelayan, toke, pemerintah, dan konsumen) dalam satu lokasi TPI
3. untuk mempermudah pemerintah dalam pengaturan, pengawasan, dan pengendalian TPI serta harga pasaran ikan, sehingga dapat mengoptimalkan potensi perikanan di Kota Tanjungpinang
4. untuk meminimalkan biaya pengeluaran untuk pembangunan satu lokasi TPI daripada untuk tiga lokasi TPI.

Dari hasil perhitungan pada tabel IV.13, maka alternatif lokasi bagi pengembangan TPI di Kota Tanjungpinang adalah di Dompok Lama, karena

merupakan lokasi yang ideal dibandingkan dengan Pelantar II, dan Senggarang. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah nilai akhir sebesar 948 untuk Dompok Lama, 794 pada Pelantar II, dan 666 untuk Senggarang. Dengan demikian lokasi alternatif yang dapat dijadikan sebagai pengembangan TPI di Kota Tanjungpinang adalah di Dompok Lama. Sebagai lokasi TPI terpilih, maka Dompok Lama memerlukan beberapa arahan, khususnya yang terkait dengan pengembangan wilayah tersebut sebagai TPI di Kota Tanjungpinang. Arahan tersebut berupa skala pelayanan, kebutuhan fasilitas pendukung TPI, dan zoning pengembangan Dompok Lama

4.5.1 Kondisi Eksisting Dompok Lama

Seperti yang telah dijelaskan bahwa, alternatif lokasi di Dompok Lama mempunyai keunggulan baik dari kriteria fisik, dan perilaku bidang perikanan. Lokasi Dompok Lama tersebut sangat potensial dari segi *supply*, yang dalam hal ini bisa dilihat pada lokasinya yang dekat dengan Selat Dompok. Selain itu, juga didukung oleh jumlah nelayan di wilayah ini, serta adanya arahan dari pemerintah kota dalam pengembangan perikanan di wilayah ini. Tetapi pada kriteria sosial-ekonomi mempunyai kendala dalam persaingan antara penjual ikan. Adanya jumlah nelayan yang sangat banyak, dapat menyebabkan persaingan diantara pelaku tersebut untuk mendapatkan konsumennya.

Secara lebih terperinci, kondisi eksisting yang mendukung Dompok Lama sebagai lokasi TPI di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada kondisi perairan, kependudukan, perkembangan guna lahan, dan kebijakan pemerintah.

A. Kondisi Perairan

Perairan di wilayah Dompok Lama mempunyai kisaran kedalaman antara 1-7 m (sumber: BIPP Kabupaten Kepri, 2003), sehingga termasuk dalam perairan dangkal. Dengan kedalaman yang tergolong dangkal, maka gelombang air laut tidak terlalu besar. Kondisi ini tentu saja termasuk aman bagi aktivitas dan pelabuhan nelayan, karena jenis kapal nelayan yang digunakan tidak memerlukan kedalaman yang lebih, yaitu perahu dengan motor tempel (pompong) yang banyak dimiliki oleh penduduk di wilayah ini. Kondisi gelombang laut di perairan wilayah Dompok Lama termasuk tenang, sehingga kapal-kapal nelayan dapat dengan mudah berlabuh atau mendekat ke wilayah pantai. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dari alternatif lokasi TPI yang berupa teluk, dan di sebelah baratnya terdapat Pulau Dompok, sehingga ombak laut tidak terlalu besar.

Lokasi Dompok Lama yang terletak di bagian selatan Kota Tanjungpinang, sehingga berdekatan dengan wilayah Pulau Batam, Singkep, Karimun dan Lingga yang termasuk zona-zona penangkapan ikan terbesar di Kepulauan Riau. Sehingga bila dilihat dari jarak pencapaian ke lokasi TPI, akan lebih menguntungkan jika lokasi TPI di Dompok Lama.

B. Kependudukan

Komposisi penduduk yang terkait dengan perkembangan TPI, adalah komposisi menurut jenis pekerjaan. Dari kondisi eksisting, maka jumlah pekerja nelayan mendominasi daripada jenis pekerjaan yang lainnya, dimana banyak penduduk di wilayah ini yang mempunyai perahu dengan motor tempel (pompong) yang digunakan sebagai sarana transportasi masyarakat sekitar untuk

beraktivitas melaut. Dengan jumlah penduduk yang lebih banyak berprofesi di bidang perikanan, maka akan mendukung pertumbuhan usaha perikanan dan arahan pemerintah yang akan menjadikan wilayah Dompok Lama sebagai area pengembangan bidang perikanan, khususnya setelah dibangun Tempat Pelelangan Ikan.

Wilayah ini juga didominasi oleh permukiman nelayan, yang letaknya menyebar satu sama lain. Masing-masing permukiman nelayan tersebut membentuk koloni sendiri-sendiri sehingga menyebar ke dalam beberapa kampung, seperti kampung Tg. Siambang, Tg. Duku, Sekatap, Dompok Seberang, Kampung Seberang, Kampung Dompok, Kampung Dompok Lama, Sungai Ungar, Kampung Pagi, dan Kampung Kelam Pagi.



Sumber : dokumentasi, 2006

GAMBAR 4.8 **PERMUKIMAN NELAYAN DI KELURAHAN DOMPAK**

Wilayah Kelurahan Dompok yang berada di pinggir laut, maka kegiatan utama masyarakatnya adalah nelayan ataupun pengelola tambak. Kegiatan melaut (mencari ikan) dijadikan sebagai mata pencaharian utama mereka. Hal ini sesuai dengan banyaknya jumlah lapangan usaha di bidang perikanan di Kota

Tanjungpinang., yaitu 38,08%. Ini artinya bahwa sebagian besar penduduknya yang berada di pedesaan (kelurahan) dan atau dekat dengan pantai sebagai nelayan. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Dompak cenderung homogen dan memiliki corak perikanan. Hal ini mempengaruhi pola hidup dan karakteristik lingkungan tempat tinggal.

Secara umumnya pendapatan para nelayan berkisar Rp. 200.000,00-Rp. 500.000,00/bulan dan Rp. 500.000,00-Rp. 1.000.000,00/perbulan. Pendapatan ini masih tergantung pada musim, sehingga pendapatan penduduk Kelurahan Dompak sangat dipengaruhi oleh musim (cuaca), karena hal ini sangat mempengaruhi kegiatan melaut para nelayan dan siklus perkembangbiakan ikan.

C. Perkembangan Guna Lahan

Menurut kondisi eksisting, maka di wilayah ini sudah berkembang lahan-lahan atau zona yang mendukung pengembangan bidang perikanan. Keberadaan laut dan Selat Dompak yang merupakan zona penangkapan ikan di Kota Tanjungpinang, menyebabkan banyaknya nelayan di kawasan ini disebabkan karena ikan yang dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu, di kawasan ini juga banyak berkembang budidaya berbagai jenis ikan. Wilayah Dompak juga terletak Balai Penelitian Perikanan dan waduk untuk budidaya berbagai ikan yang banyak diminati oleh pasaran. Dengan kenyataan tersebut, maka sangat strategis jika TPI ditetapkan di Dompak Lama.

D. Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungpinang tahun 2001-2010, maka terdapat arahan yang dapat memacu perkembangan

bidang perikanan, yaitu adanya alternatif lokasi TPI, dan lahan khusus bagi industri perikanan rakyat. Keberadaan bidang kependudukan dan guna lahan yang mendukung, serta peran pemerintah sangat nyata dalam mendukung pengembangan wilayah Dompok Lama di bidang perikanan.

4.5.2 Skala Pelayanan dan Kebutuhan Fasilitas Sebagai Tempat Pelelangan Ikan

Dari kondisi eksisting, bahwa embrio dari lokasi TPI di Dompok Lama hanya melayani penduduk yang terdapat di wilayah Kecamatan Bukit Bestari dan Tanjungpinang Timur. Sehingga dalam hal ini diperlukan penentuan skala pelayanan TPI yang lebih luas, meliputi seluruh wilayah Kota Tanjungpinang, jika lokasi TPI ditentukan di wilayah ini. Penentuan skala untuk Kota Tanjungpinang agar dapat memperluas jangkauan pelayanan dengan satu lokasi, yaitu di Dompok Lama.

Setelah mengetahui alternatif lokasi TPI terpilih, yaitu di Dompok Lama dengan skala pelayanan untuk Kota Tanjungpinang, maka perlu diperhatikan fasilitas pendukung bagi TPI, antara lain:

1. **Fasilitas Pokok**, meliputi:
 - a. Lahan; dari standar yang ditentukan bahwa luas minimal yang dibutuhkan sekitar 1,5 Ha yang terbagi untuk bangunan pokok sekitar 6.500 m², jalan komplek 2.500 m², dan sisanya untuk bangunan pendukung TPI lainnya.

- b. Dermaga; berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal ikan berukuran 1-30 GT, bongkar muat ikan, tempat penyaluran perbekalan, dan tempat administrasi tambat.
- c. Alur pelayanan, berfungsi untuk mempermudah olah gerak kapal ikan.
- d. Jalan dan parkir; berfungsi untuk memperlancar lalu lintas kendaraan pengangkut ikan dan tempat parkir.
- e. *Water Treatment Plan*, berfungsi untuk penjernihan air.

2. **Fasilitas Fungsional**, meliputi:

- a. Bangunan TPI; berfungsi sebagai tempat penumpukan ikan, sortasi, penimbangan, transaksi jual ikan beli ikan, dengan ukuran minimal bangunan ini adalah 450 m².
- b. Gedung es; berfungsi untuk penumpukan/ penyimpanan es curai/ es balok.
- c. Tangki BBM; untuk menyimpan dan menyalurkan BBM ke kapal ikan
- d. Tangki air; berfungsi bagi penyimpanan dan penyaluran air bersih.
- e. Bengkel mesin; berfungsi untuk perbaikan mesin, beserta peralatan lain di kapal.
- f. Balai Pertemuan Nelayan, digunakan untuk tempat pertemuan bagi para nelayan.
- g. Kantor administrasi, digunakan untuk tempat administrasi yang berkaitan dengan TPI. (*Sumber: DKP RI, 2004*)

4.5.3 Zona Pengembangan Dompok Lama Sebagai TPI Kota Tanjungpinang

Untuk menentukan peletakan fasilitas pendukung TPI, maka didasarkan pada sifat dan fungsi dari fasilitas yang akan dibangun. Pembagian guna lahan yang umumnya digunakan di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas alur pelayaran kapal

Merupakan fasilitas yang langsung berhubungan dengan laut sebagai sumber utama aktivitas perikanan. Sehingga bangunan seperti: dermaga, alur pelayanan, jalan menuju dermaga, dan *Water Treatment Plan*, diletakkan di lokasi yang berdekatan dengan pantai.

2. Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan

Merupakan bangunan utama dari zoning wilayah TPI, yang biasanya lokasinya berdekatan dengan pergudangan dan pabrik es untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan ikan. Lokasi dari TPI ini juga tidak terlalu jauh dari dermaga, agar memudahkan proses bongkar muat ikan.

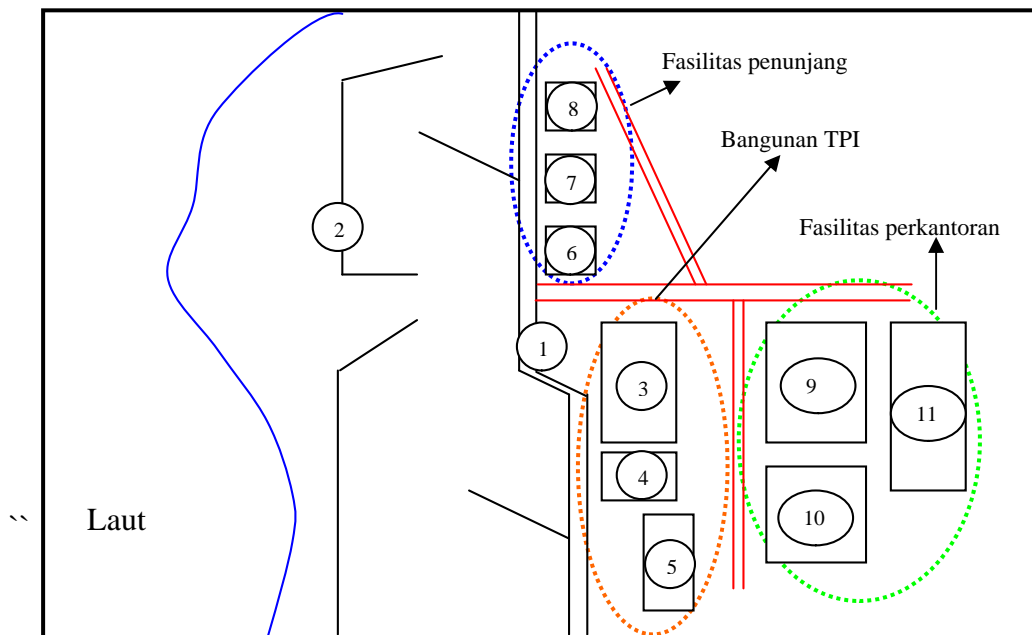
3. Fasilitas penunjang

Merupakan fasilitas yang digunakan untuk perbaikan atau perbekalan bagi aktivitas penangkapan ikan. Bangunan yang termasuk fasilitas ini, antara lain: tangki BBM, tangki air bersih, bengkel mesin perahu. Biasanya lokasi dari fasilitas ini juga tidak terlalu jauh dari dermaga, sehingga agak sejajar dengan lokasi bangunan TPI.

4. Fasilitas perkantoran atau pertemuan

Kelompok bangunan yang terakhir adalah fasilitas fungsional yang tidak berhubungan langsung dengan laut, diletakkan agak sebelah dalam dan tidak berdekatan dengan pantai. Bangunan tersebut, antara lain Balai Pertemuan Nelayan, Kantor Administrasi, atau bangunan tempat tinggal. Lokasinya yang agak dalam dimaksudkan untuk menghindari keramaian dan bau yang tidak enak dari aktivitas perikanan di dekat pantai.

Untuk lebih jelas mengenai zoning pengembangan rencana TPI yang umumnya ada di Indonesia, dapat dilihat pada gambar 4.9.



Sumber: Profil Pelabuhan Perikanan di Indonesia, 2003

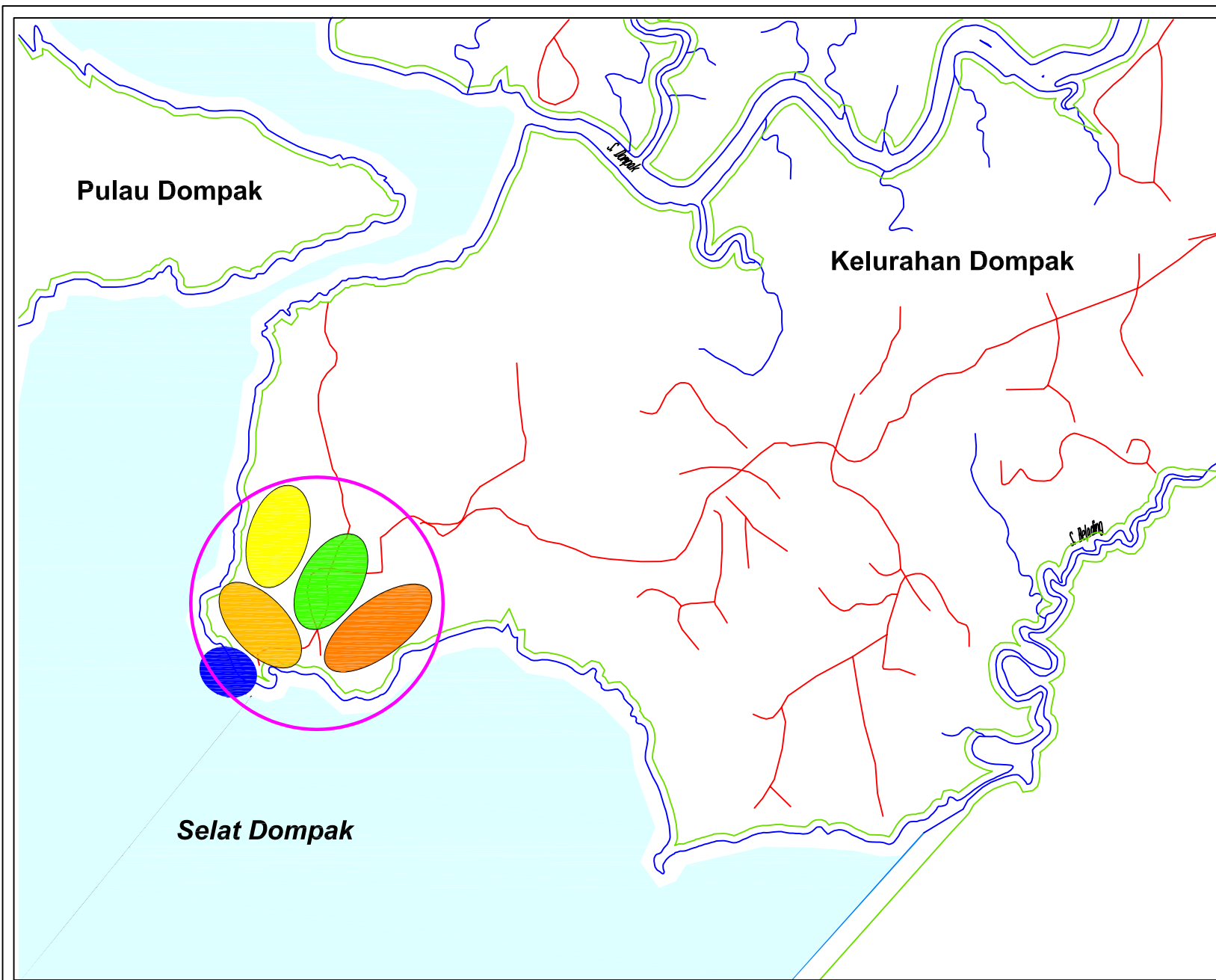
Keterangan:

1. Dermaga
2. Pemecah gelombang laut
3. Tempat Pelelangan Ikan
4. Pabrik es
5. Gudang
6. Bengkel perahu
7. Tangki BBM
8. Tangki air

9. Kantor administrasi
10. Balai pertemuan
11. Balai tempat tinggal

GAMBAR 4.9
DENAH LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Dengan melihat kondisi eksisting lokasi TPI yang terpilih, yaitu Dompok Lama, maka pembagian lahan dan fasilitas TPI pada gambar 4.9 dapat diterapkan di wilayah ini. Hal ini didukung oleh lahan kosong, sehingga masih dimungkinkan untuk pengembangan lahan di masa yang akan datang. Untuk pembagian lahan (zoning) di Dompok Lama dapat dilihat pada Gambar 4.10. Sedangkan untuk peletakan bangunan di tiap zoning tersebut, disesuaikan dengan gambar 4.9.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNANAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2006

TESIS

ARAHAN LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN
(TPI) KOTA TANJUNGPINANG

PETA

ZONING LOKASI TPI TERPILIH
(DOMPAK LAMA)

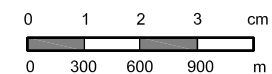
LEGENDA:

- Jalan
- Sungai
- Pulau
- Lokasi TPI
- Dermaga kapal
- Bangunan TPI
- Fasilitas pendukung TPI
- Balai Nelayan dan Kantor Administrasi
- Gudang dan pabrik es

No. GAMBAR

SKALA PETA

4.10



UTARA

SUMBER:



- BPN Kota Tanjungpinang, 2004
- Hasil analisis, 2006

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), maka beberapa kriteria penentu yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. **kondisi fisik alternatif lokasi TPI;** dengan variabel kondisi perairan calon lokasi TPI, ketersediaan lahan, akses ke lokasi calon TPI, prasarana pendukung, dan wilayah penangkapan ikan.
- b. **Pendukung perkembangan perikanan;** dengan variabel aktivitas perikanan, tenaga kerja, industri perikanan, dan arahan/ kebijakan pemerintah.
- c. **kondisi alat tangkap ikan;** dengan variabel kondisi sarana dan alat tangkap ikan.

Terpilihnya Kawasan Dompok Lama sebagai alternatif terbaik bagi lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Tanjungpinang dengan skor yang tertinggi, yaitu 948. Terpilihnya Dompok Lama disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung, antara lain: lokasi geografis di tepi pantai dengan gelombang laut tidak tinggi. Selain itu, adanya prasarana pendukung (jalan, listrik, dan air bersih) dapat mengurangi biaya pembangunan TPI di lokasi ini. Apalagi pelabuhan di kawasan akan dikembangkan menjadi tempat industri perikanan rakyat, sehingga akan mendukung pengembangan tempat pelelangan ikan.

Ditinjau dari kependudukan juga sangat mendukung, yaitu sebagian besar penduduk di wilayah ini mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, dan akan meningkatkan jumlah pelaku bidang perikanan di wilayah ini. Selain itu, adanya arahan dalam RTRW Kota Tanjungpinang yang berupa peruntukan lahan bagi industri perikanan rakyat akan mendukung keberadaan TPI nantinya.

Agar menjadi lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Tanjungpinang yang optimal, maka diperlukan arahan pengembangan yang dalam penelitian ini berupa zona-zona pengembangan dan penentuan skala pelayanan TPI terpilih, yaitu di Dompok Lama. Zona-zona tersebut merupakan arahan peletakan bangunan atau fasilitas pendukung aktivitas pelelangan ikan.

Selain memperhatikan pada sisi *supply*, yaitu pengadaan Tempat Pelelangan Ikan, maka juga diperlukan pendekatan sisi *demand*. Dalam penelitian ini, maka pendekatan ini diwakili oleh persepsi *stakeholder*, terkait perlunya TPI di Kota Tanjungpinang. *Stakeholder* tersebut, antara lain: pihak Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Tanjungpinang, Dinas Sumber Daya Alam, nelayan, dan pengusaha perikanan. Dari hasil wawancara yang menggambarkan persepsi *stakeholder*, maka permasalahan yang menghambat perkembangan bidang perikanan adalah mengenai ketersediaan alat tangkap ikan yang sederhana, dan tidak adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Tanjungpinang.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat direkomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1 Lokasi Dompok Lama yang berada di wilayah Kecamatan Bukit Bestari merupakan lokasi yang ideal dibandingkan dengan Pelantar II, dan Senggarang untuk menjadi lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Tanjungpinang. Kondisi ideal tersebut dilihat dari dari tiga kriteria, yaitu kondisi fisik, pendukung perkembangan perikanan, dan teknologi alat tangkap ikan.
- 2 Untuk mengoptimalkan fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terpilih, maka diberikan beberapa arahan, yaitu: penentuan skala pelayanan TPI yang melingkupi seluruh wilayah Kota Tanjungpinang sehingga memperluas jangkauan pelayanan, dan pengadaan fasilitas pendukung TPI sehingga dapat berfungsi dengan optimal.
- 3 Pada lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terpilih, yaitu Dompok Lama maka perlu dibangun industri perikanan yang dapat mendukung aktivitas pelelangan ikan, seperti pabrik es untuk pengawetan ikan atau indutri pengalengan ikan. Dengan keberadaan industri tersebut, juga dapat memberikan kesempatan sektor swasta untuk berperan di bidang perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Affendi dan Setia Hadi. 2006. "Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan". Jakarta: Majalah Prisma.
- Asri. 2000. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Perikanan Laut." Tesis, Program Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas, Padang.
- Astrijo, P. 1995. *Laporan Penyelidikan Geologi dan Geofisika Kelautan di Perairan Singkep*. Bandung: Pusat Pengembangan Geologi Kelautan
- ATLAS Sumberdaya Wilayah Pesisir dan :Lautan Kepulauan Riau*. Bappeko Kota Tanjungpinang, 2001
- Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Bengen, W.D.G. 2003. "Definisi, Batasan, dan Realitas Pulau Kecil." Makalah disampaikan dalam Semiloka Penentuan Definisi dan Pendataan Pulau Kecil di Indonesia, Jakarta, 26 Mei 2003.
- Dahuri, R. J. Rais. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dahyar. M. 1999. "Penerapan Pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Dalam Pembangunan Pariwisata di Kepulauan Derawan Propinsi Kalimantan Timur." Tesis, Program Pascasarjana, IPB, Bogor.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Elfindri. 2001. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Padang: Andalas University Press.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya*. Jakarta: LP3ES.
- Kerlinger, Fred N. 2000. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusmana. 1994. *Peta Geologi Lembar Tajungpinang, Sumatera*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.

- Laporan Tahunan Perikanan Kota Tanjungpinang*. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Riau, 2003.
- Mashuri. 1995. “Pasang Surut Usaha Perikanan Laut: Tinjauan Sosial Ekonomi Kenelayanan Jawa dan Madura 1850-1940”. LIPI.
- Mustopadjaja, A.R. 1994. “Analisis Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Majalah Manajemen Pembangunan*, Nomor 8/II, Juli.
- Pembangunan Jangka Menengah Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2001-2010*. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah. 2001.
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Tanjungpinang*. Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang, 2003.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2001-2010*. Bappeko Kota Tanjungpinang, 2001.
- Riyadi dan Deddy Supriady B. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susilowati, Indah. 1998. “Identifikasi Lokasi Potensial Pengembangan Pusat Perbelanjaan di Area Sub-Urban Kotamadya Semarang.” Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Siagian, S.P. 1994. *Manajemen Modern: Bunga Rampai*. Jakarta: CV. Masagung.
- Tanjungpinang Dalam Angka Tahun 2002*. Kantor Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2002.
- Thomas, Robert H. 1996. Perencanaan Tata Guna Lahan, dalam Perencanaan Kota. Ed: Anthony J. Catanes dan James C. Snyder. Edisi II. Jakarta: Erlangga.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1998. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Zamrawis, Ismail. 2000. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Indonesia Menapak Abad 21: Kajian Ekonomi Politik*. Jakarta: LIPI.